

**DAMPAK PERKEMBANGAN KAWASAN
WISATA PANTAI KARTINI TERHADAP
MASYARAKAT SETEMPAT
DI KABUPATEN JEPARA**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh:

**MOH FAIZUN
L4D 007 010**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

DAMPAK PERKEMBANGAN KAWASAN WISATA PANTAI KARTINI TERHADAP MASYARAKAT SETEMPAT DI KABUPATEN JEPARA

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh:

**MOH FAIZUN
L4D 007 010**

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 23 Juni 2009

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, Juni 2009

Tim Penguji:

Ir. Mardwi Rahdriawan, MT - Pembimbing Utama
Landung Esariti, ST, MPS - Pembimbing Pendamping
Ir. Rina Kurniati, MT - Penguji I
Dr.rer.nat. Imam Buchori - Penguji II

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Universitas Diponegoro

Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc

PERNYATAAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain/Institusi lain maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab

Semarang, Juni 2009

MOH FAIZUN
NIM L4D 007 010

- ✓ Manusia Cenderung Mencari Alasan Sebagai Pembena Ats
Kekurangannya
- ✓ Belajarlah Dari Keberhasilan Orang Lain Atau Kegagalan Diri
Sendiri
- ✓ Kepuasan Seseorang Bukan Diukur Dari Seberapa Besar Hasil
Yang Telah Dicapai, Tetapi Seberapa Besar Usaha Yang Telah
Dilakukan
- ✓ Ketekunan dalam Belajar dan Bekerja Kunci Kesuksesan.

Tesis ini kupersembahkan untuk:
Istriku Wendyastuti Pangestuning Widhi, S.Sos
Anak-anakku M. Zunidar Rakanditya dan
Raihanna Aulia Rahmandita

ABSTRAK

Kawasan wisata Pantai Kartini merupakan kawasan wisata yang perkembangannya cukup pesat di Kabupaten Jepara, terletak di Kelurahan Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Disamping sebagai kawasan wisata, di Pantai Kartini terdapat masyarakat pesisir yang berubah kondisi ekonomi, sosial, lingkungan fisik dan fungsi permukimannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak dari perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini terhadap masyarakat setempat di Kabupaten Jepara. Instrumen utama adalah angket menggunakan kuesioner untuk pengujian hipotesis statistik Chi-Kuadrat dan menjelaskan variabel penelitian dengan analisis deskriptif kuantitatif. Pengambilan sampel berdasarkan *purposive sample* dari populasi masyarakat yang tinggal di kawasan wisata Pantai Kartini 314 orang adalah rumah tangga dengan responden kepala rumah tangga 62 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini terbukti timbul dampak baik positif maupun negatif. Perkembangan kawasan pariwisata Pantai Kartini berdampak positif terhadap perubahan kondisi ekonomi masyarakat setempat, dijelaskan oleh munculnya 32,3% kesempatan kerja baru sektor pariwisata seperti: industri dan penjual souvenir dari limbah laut, penarik perahu wisata, dan usaha penginapan. Tingkat pendapatan masyarakat tinggi 53,2% berasal dari pendapatan pariwisata. Peningkatan harga lahan, karena kepemilikan lahan merupakan hak milik (96,8%) dan harga lahan tinggi (24,2%). Demikian pula berdampak negatif terhadap perubahan kondisi sosial masyarakat dijelaskan oleh karena masyarakat pesisir yang awalnya tergantung perikanan laut, berubah ketergantungan tinggi 69,1% pada pariwisata. Terjadinya kesenjangan sosial antara sektor perikanan dan pariwisata, perikanan hanya 9,7% cukup, sedangkan pariwisata 17,7% cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun tidak berdampak negatif terhadap migrasi, karena dari pendatang 25,8% hanya 9,7% yang bekerja sektor pariwisata.

Adapun dampak terhadap perubahan lingkungan fisik juga positif dijelaskan dari jalan lingkungan baik (100%) *pavingblock* lebar 1 m; seluruhnya (100%) menggunakan air bersih dari PDAM; tidak terjadi genangan (96,8%); dan memiliki tempat sampah diluar rumah (96,8%) dan lokasi TPS (95,2%). Perubahan fungsi permukiman dipengaruhi oleh faktor-faktor tingginya harga lahan (0,484), penataan lingkungan permukiman (0,476), tingginya tingkat pendapatan pariwisata (0,369), dan pekerjaan sektor pariwisata (0,308).

Kata kunci: dampak pariwisata, kawasan wisata, masyarakat setempat.

ABSTRACT

The Pantai Kartini tourism area is the most development of tourism areas in Jepara Regency, located in Sub-District Bulu, District Jepara. Beside for tourism area, inside Pantai Kartini tourism area there is the coastal communities. The economics, social, physical of settlement area, and functions of coastal settlement are change. The objective of this research is intended to explained the impact of the development Pantai Kartini tourism area to local communities in Jepara Regency. Polling is used as the main instrument to prove the hipotesis statistically chi-square of significant 95% ($\alpha=0,05$) with descriptive analyses. The purposive sampling is used to get the sample from the local communities who living in Pantai Kartini tourism area is 314 of population. Household become the unit analysis of this research, while, the research respondent is the household head taken is 62 persons.

Result of research indicates that after development of the Pantai Kartini tourism area emerges has proven impact either positive and also negativity. Development of Pantai Kartini tourism area has given the positive impact to economic of local communities explained by the lessen of fisherman or fishery on remains 21,0%, caused emerges 32,3% new job opportunity of tourism sector like: industry and seller souvenir from sea waste, tourism boat drawer and homestay. Local community incomes was to higher degree 53,2% comes from tourism incomes. Increase of the land prices, because ownership of land of settlement is proprietary (96,8%) and the land prices is height (24,2%). Thus, it also has given the negativity impact to socials change be explained that the coastal communities of lifes before all dependent on fishery change its lifes to highest dependent on tourism activity 69,1%. The social gaps happened between fishery and tourism sector, fishery sector 9,7% only, while tourism sector was 17,7% enough fulfill basics needs of life. But its not given the negativity impact to migration, the migrant 25,8% and working on tourism sector until 9,7% only.

Also has given the positive impact to the physical change of settlement area be explained from good settlement streets on pavingblock the wide 1 metre; all household has used water from PDAM; not happened pond; and household has owned outdoors ash can and existence of TPS. Based on contingency coefficient indicated that the highest land prices (0,484), the physical of settlement area (0,476), highest degree of tourism incomes (0,369), and job category of tourism sector (0,308), is the factors which influenced the additional function of the coastal communities houses for economic activities.

Key word: *tourism impact, tourism area, local communities.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hanya atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan mata kuliah Tesis yang berjudul “Dampak Perkembangan Kawasan Wisata Pantai Kartini Terhadap Masyarakat Setempat di Kabupaten Jepara”. Tesis ini merupakan salah satu tahapan yang harus diselesaikan dalam studi di Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota (MTPWK) Universitas Diponegoro.

Penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Kepala Pusbindiklatren Bappenas selaku Pemberi Beasiswa Program Pendidikan dan Pelatihan Gelar Pascasarjana (S2) Dalam Negeri 13 Bulan;
2. Bupati Jepara beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Jepara yang telah memberikan kesempatan penulis melanjutkan pendidikan di Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota (MTPWK) Universitas Diponegoro;
3. Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc selaku Ketua Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota (MTPWK) Universitas Diponegoro.
4. Ir. Mardwi Rahdriawan, MT selaku Pembimbing Utama dan Landung Esariti, ST, MPS selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penyusunan Tesis ini.
5. Ir. Rina Kurniati, MT selaku Penguji I dan Dr.rer.nat. Imam Buchori selaku Penguji II yang telah memberi banyak masukan bagi perbaikan Tesis ini.
6. Istri dan anak-anak penulis tercinta yang selalu mendukung dengan segala bantuan, pengorbanan, kesabaran, dan do'a.
7. Bapak, Ibu dan saudara-saudara penulis tersayang yang selalu memberikan perhatian, bantuan dan dorongan.
8. Teman-teman MTPWK-UNDIP Bappenas 4 yang telah banyak membantu dalam menjalani studi.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penulisan Tesis ini, oleh karenanya segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai masukan yang sangat berharga. Semoga penulisan Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, Juni 2009
Penulis,

MOH FAIZUN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.5.1 Lingkup Materi.....	8
1.5.2 Lingkup Wilayah.....	11
1.6 Kerangka Pemikiran	12
1.7 Pendekatan dan Metode Penelitian.....	15
1.8 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data	16
1.8.1 Teknik Pengumpulan Data	16
1.8.2 Teknik Analisis Data	19
1.9 Kedudukan Penelitian dalam Perencanaan Wilayah.....	21
1.10 Sistematika Penulisan.....	24
 BAB II KAJIAN LITERATUR DAMPAK PARIWISATA DAN PERUBAHAN FUNGSI PERMUKIMAN..	 27
2.1 Dampak Pembangunan.....	27
2.2 Pariwisata Bahari dan Kawasan Wisata	30
2.3 Dampak Pariwisata	34
2.3.1 Dampak Ekonomi Pariwisata	35
2.3.2 Dampak Sosial Pariwisata	36

2.3.3 Dampak Pariwisata Terhadap Lingkungan Fisik	37
2.3.4 Dampak Positif dan Negatif Pariwisata	39
2.4 Perubahan Fungsi Permukiman	40
2.5 Masyarakat Pesisir	42
2.6 Sintesa Literatur	45
 BAB III TINJAUAN WILAYAH PESISIR DAN PARIWISATA DI KABUPATEN JEPARA	 47
3.1 Letak Geografis Kabupaten Jepara	47
3.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten	49
3.3 Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Pesisir ..	53
3.3.1 Kawasan Sempadan Pantai	56
3.3.2 Kawasan Budidaya	57
3.4 Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jepara	59
3.5 Kebijakan Penataan Pemukiman Pesisir	62
 BAB IV ANALISIS DAMPAK PERKEMBANGAN KAWASAN WISATA PANTAI KARTINI DAN PERUBAHAN FUNGSI PERMUKIMAN PESISIR	 65
4.1 Analisis Perkembangan Kawasan Wisata Pantai Kartini	65
4.2 Analisis Dampak Ekonomi Perkembangan Kawasan Wisata Pantai Kartini.....	78
4.2.1 Dampak Terhadap Kesempatan Kerja ..	78
4.2.2 Dampak Terhadap Tingkat Pendapatan ..	82
4.2.3 Analisis Dampak Terhadap Kenaikan Harga Lahan.....	86
4.3 Analisis Dampak Sosial Perkembangan Kawasan Wisata Pantai Kartini.....	89
4.3.1 Dampak Terhadap Kesenjangan Sosial ..	90
4.3.2 Dampak Terhadap Ketergantungan	93
4.3.3 Dampak Terhadap Migrasi.....	96
4.4 Analisis Dampak Lingkungan Fisik Perkembangan Kawasan Wisata Pantai Kartini ..	99
4.5 Analisis Dampak Positif dan Negatif Perkembangan Kawasan Wisata Pantai Kartini ..	104

4.6	Analisis Faktor-Faktor Berpengaruh Terhadap Perubahan Fungsi Permukiman di Kawasan Wisata Pantai Kartini	106
4.6.1	Pengaruh Kesempatan Kerja Terhadap Perubahan Fungsi Permukiman	113
4.6.2	Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Perubahan Fungsi Permukiman	115
4.6.3	Pengaruh Harga Lahan Terhadap Perubahan Fungsi Permukiman.....	116
4.6.4	Pengaruh Kesenjangan Sosial Terhadap Perubahan Fungsi Permukiman.....	118
4.6.5	Pengaruh Tingkat Ketergantungan Terhadap Perubahan Fungsi Permukiman	120
4.6.6	Pengaruh Asal Daerah Terhadap Perubahan Fungsi Permukiman.....	121
4.6.7	Pengaruh Lingkungan Fisik Terhadap Perubahan Fungsi Permukiman.....	123
4.7	Temuan Studi.....	125
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	127
5.1.	Kesimpulan.....	127
5.2.	Rekomendasi	129
DAFTAR PUSTAKA	131

DAFTAR TABEL

TABEL II.1	: Variabel Dampak Ekonomi, Dampak Sosial, Dampak Lingkungan Fisik dan Perubahan Fungsi Permukiman.....	45
TABEL III.1	: Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Jepara	48
TABEL III.2	: Jumlah Wisatawan di Kabupaten Jepara Tahun 2007	61
TABEL IV.1	: Objek dan Daya Tarik Wisata di Pantai Kartini.....	70
TABEL IV.2	: Tabulasi Silang Antara Jenis Pekerjaan dengan Kategori Pekerjaan.....	80
TABEL IV.3	: Tabulasi Silang Antara Pendapatan Rumah Tangga dengan Pendapatan Rumah Tangga dari Kawasan Wisata	84
TABEL IV.4	: Tabulasi Silang Antara Harga Lahan di Kawasan Wisata dengan Harga Lahan di Tempat Lain	88
TABEL IV.5	: Tabulasi Silang Antara Pemenuhan Kebutuhan dengan Kategori Pekerjaan.....	91
TABEL IV.6	: Tabulasi Silang Antara Jumlah Anggota Bekerja dengan Jumlah Anggota Bekerja di Kawasan Wisata	94
TABEL IV.7	: Tabulasi Silang Antara Asal Daerah dengan Kategori Pekerjaan	98
TABEL IV.8	: Tabulasi Silang Antara Penataan Lingkungan Permukiman dengan Pengembangan Kawasan Wisata	102
TABEL IV.9	: Matrik Perbandingan Dampak Pariwisata dan Dampak Perkembangan Kawasan Wisata Pantai Kartini.....	104
TABEL IV.10	: Tabulasi Silang Antara Kategori Pekerjaan dengan Perubahan Fungsi Permukiman	114
TABEL IV.11	: Tabulasi Silang Antara Pendapatan dari Kawasan Wisata dengan Perubahan Fungsi Permukiman	115

TABEL IV.12 : Tabulasi Silang Antara Harga Lahan dengan Perubahan Fungsi Permukiman	117
TABEL IV.13 : Tabulasi Silang Antara Pemenuhan Kebutuhan dengan Perubahan Fungsi Permukiman.....	119
TABEL IV.14 : Tabulasi Silang Antara Jumlah Anggota Bekerja di Kawasan Wisata dengan Perubahan Fungsi Permukiman	120
TABEL IV.15 : Tabulasi Silang Antara Asal Daerah dengan Perubahan Fungsi Permukiman	122
TABEL IV.16 : Tabulasi Silang Antara Penataan Lingkungan Fisik dengan Perubahan Fungsi Permukiman.....	124

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	: Peta Wilayah Studi Kawasan Wisata Pantai Kartini Jepara	12
GAMBAR 1.2	: Kerangka Pemikiran.....	14
GAMBAR 1.3	: Kerangka Analisis	22
GAMBAR 1.4	: Perencanaan Pariwisata Terpadu di Wilayah Pesisir	24
GAMBAR 2.1	: Skema Hubungan Antara Tujuan Aktivitas Manusia dengan Dampak Pada Lingkungan	29
GAMBAR 3.1	: Diagram Penggunaan Lahan di Kabupaten Jepara	49
GAMBAR 3.2	: Peta Tata Guna Lahan Kabupaten Jepara.	54
GAMBAR 3.3	: Peta Rencana Tata Guna Lahan Wilayah Pesisir Kecamatan Jepara	58
GAMBAR 3.4	: Peta Wisata Kabupaten Jepara	62
GAMBAR 4.1	: Peta Perkembangan Kawasan Wisata Pantai Kartini.....	66
GAMBAR 4.2	: Akuarium Kura-Kura sebagai Ikon Wisata Pantai Kartini	67
GAMBAR 4.3	: Permainan Anak-Anak Komedi Putar.....	68
GAMBAR 4.4	: Permainan Anak-Anak Mandi Bola	68
GAMBAR 4.5	: Gazebo untuk Menikmati Panorama Laut	69
GAMBAR 4.6	: Pemandangan Laut dan Dermaga Penyeberangan Menuju Taman Laut Nasional Karimunjawa	69
GAMBAR 4.7	: Grafik Kunjungan Wisatawan di Pantai Kartini Periode Tahun 2004-2008.....	71
GAMBAR 4.8	: Diagram Jenis Kelamin Responden	74
GAMBAR 4.9	: Diagram Usia Responden	74
GAMBAR 4.10	: Diagram Tingkat Pendidikan Responden.	75
GAMBAR 4.11	: Diagram Masyarakat Bekerja di Kawasan Wisata Pantai Kartini	76
GAMBAR 4.12	: Diagram Jumlah Anggota Rumah Tangga Responden.....	77
GAMBAR 4.13	: Diagram Jumlah Anggota Rumah Tangga Bekerja	77

GAMBAR 4.14 : Diagram Jenis Pekerjaan Responden.....	79
GAMBAR 4.15 : Diagram Kepemilikan Usaha di Kawasan Wisata Pantai Kartini	82
GAMBAR 4.16 : Diagram Tingkat Pendapatan Rata-Rata Responden	83
GAMBAR 4.17 : Diagram Kepemilikan dan Luas Lahan Permukiman.....	86
GAMBAR 4.18 : Diagram Harga Lahan Permukiman di Kawasan Wisata Pantai Kartini	87
GAMBAR 4.19 : Diagram Pemenuhan Kebutuhan Hidup Responden	90
GAMBAR 4.20 : Diagram Jumlah Anggota Rumah Tangga Responden Bekerja di Kawasan Wisata ...	93
GAMBAR 4.21 : Diagram Asal Daerah Responden.....	96
GAMBAR 4.22 : Diagram Lama Tinggal Responden	97
GAMBAR 4.23 : Kondisi Jalan Lingkungan Permukiman...	100
GAMBAR 4.24 : Diagram Fungsi Fisik Rumah Responden	107
GAMBAR 4.25 : Diagram Fungsi Sosial Permukiman	108
GAMBAR 4.26 : Diagram Fungsi Ekonomi Permukiman ...	109
GAMBAR 4.27 : Rumah Untuk Usaha Kios/Warung Makan	110
GAMBAR 4.28 : Rumah Untuk Usaha Toko Cenderamata (<i>Souvenir</i>)	110
GAMBAR 4.29 : Rumah Untuk Usaha Toilet dan Mandi Bilas.....	111
GAMBAR 4.30 : Rumah Untuk Usaha Penginapan	111
GAMBAR 4.31 : Diagram Jenis Perubahan Fisik Rumah di Kawasan Wisata Pantai Kartini	112

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A	: Kuesioner.....	137
LAMPIRAN B	: Pedoman Wawancara	143
LAMPIRAN C	: Hasil Wawancara	145
LAMPIRAN D	: Hasil Analisis SPSS	149
LAMPIRAN E	: Tabel Chi-Kuadrat (X^2)	159

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kota-kota di Indonesia pada dasarnya dimulai dari perkembangan permukiman tempat terpusatnya berbagai kegiatan, penduduk dan masuknya pengaruh dari luar di wilayah pesisir. Secara sosial ekonomis penduduk yang hidup di kota-kota atau permukiman pesisir sangat terkait dengan sumber perekonomian dari wilayah laut. Kecenderungan perkembangan ini kemudian berlanjut berkembang dengan motivasi perkembangan lain yaitu pemanfaatan potensi wilayah pantai secara ekonomis (Prianto, ed., 2005). Pemanfaatan wilayah pesisir secara ekonomi ini sesuai dengan peranan sumber daya pesisir dan kelautan yang dapat dilihat dari 4 (empat) aspek (Dahuri, 2003) yaitu: (1) Aspek ekonomi, (2) Aspek ekologis, (3) Aspek pertahanan dan keamanan, dan (4) Aspek pendidikan dan penelitian. Aspek ekonomi memandang bahwa sumber daya pesisir dan kelautan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan ekonomi di wilayah pesisir termasuk pariwisata bahari. Bahkan Bengen (2001) menyebut wilayah pesisir yang menyediakan sumber daya alam produktif baik sebagai sumber pangan, tambang mineral dan energi, media komunikasi maupun kawasan rekreasi atau pariwisata, merupakan tumpuan harapan manusia di masa mendatang.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 3,1 juta km² (Dahuri et al, 1996: 1), merupakan potensi sumber daya pesisir yang besar sebagai modal dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat pesisir. Modal tersebut dapat dimanfaatkan melalui pembangunan kepariwisataan di wilayah pesisir, sebagaimana tujuan kepariwisataan di Indonesia yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, dan mendorong pembangunan daerah (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990).

Pembangunan wilayah pesisir dan laut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat pesisir sebagai pelaku dan tujuan pembangunan wilayah pesisir dan lautan harus mendapatkan manfaat terbesar dari kegiatan pembangunan tersebut. Demikian pula dalam pembangunan wilayah pesisir untuk kegiatan pariwisata harus dilakukan dengan mengedepankan upaya deversifikasi usaha dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat pesisir disamping usaha perikanan. Pariwisata seperti yang ditegaskan oleh Wahab (2003:5), adalah salah satu dari industri gaya baru mempunyai dimensi-dimensi dan persepsi-persepsi yang bervariasi mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di daerah tujuan wisatawan.

Kabupaten Jepara termasuk wilayah pesisir di utara Pulau Jawa, mempunyai garis pantai sepanjang 72 km termasuk gugusan kepulauan Karimunjawa. Kondisi geografis wilayah pesisir di Kabupaten Jepara dengan pantai pasir putih berbatu memiliki nilai ekonomi dan banyak berkembang menjadi kawasan wisata. Potensi wilayah pesisir yang dimiliki ini dikembangkan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan pariwisata dan menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan (sektor ekonomi basis) guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah. Kebijakan ini dilakukan karena sektor pariwisata dapat mendatangkan devisa dari pengeluaran wisatawan, sebagaimana dinyatakan oleh Tarigan (2006:62) bahwa sektor ekonomi basis merupakan sektor-sektor yang hasil produksinya dapat dijual ke luar daerah atau mendatangkan uang dari luar daerah. Beberapa wilayah pesisir yang selama ini dikembangkan menjadi kawasan wisata antara lain: Pantai Kartini di Kelurahan Bulu, Pulau Panjang di Kelurahan Ujungbatu, Benteng Portugis di Ujung Watu, Pantai Tirto Samudro di Desa Bandengan, dan Taman Wisata Nasional Karimunjawa.

Keberhasilan pengembangan suatu wilayah maupun kawasan dapat diukur dari beberapa faktor, salah satunya adalah dampak atau pengaruh positif terhadap masyarakat. Demikian pula keberhasilan dalam pengembangan kawasan wisata di wilayah pesisir yang diukur dari dampak positif yang diberikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan pesisir. Gunn (1993) mengemukakan bahwa suatu

kawasan wisata yang baik dan berhasil bila secara optimal didasarkan kepada empat aspek yaitu mempertahankan kelestarian lingkungannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut, menjamin kepuasan pengunjung dan meningkatkan keterpaduan dan *unity* pembangunan masyarakat di sekitar kawasan dan *zone* pengembangannya.

1.2 Perumusan Masalah

Perkembangan wilayah pesisir yang pesat untuk kegiatan pariwisata di Kabupaten Jepara adalah kawasan wisata Pantai Kartini yang berada di pusat pemerintahan kota Jepara. Wilayah pesisir Pantai Kartini sebelum dikembangkan menjadi kawasan wisata, masih merupakan tempat wisata milik umum (*common property*) yang alami dan letaknya terpencil (jauh) dari wilayah di sekitarnya. Pada kurun waktu tersebut terdapat permukiman masyarakat pesisir yang sekitar tahun 1971 direlokasi di wilayah pesisir yang berbatasan dengan Pantai Kartini karena lokasi semula dibangun untuk Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau (BBPBAP).

Perkembangan Pantai Kartini yang banyak dikunjungi wisatawan disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dengan terus menerus menyediakan berbagai objek dan daya tarik wisata, amenitas serta aksesibilitas ke daerah tujuan wisata dan dijadikan sebagai kawasan wisata (*private property*). Perluasan lahan pengembangan kawasan wisata dan kebutuhan privatisasi Pantai Kartini menjadikan permukiman masyarakat masuk di

dalam kawasan wisata, sehingga secara sosial ekonomi dan lingkungan fisik permukiman bersentuhan langsung dengan kegiatan pariwisata. Dengan perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini ini muncul permasalahan sebagai berikut:

1. Perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang tampak dari jumlah masyarakat yang memiliki mata pencaharian nelayan/perikanan laut semakin berkurang. Tingkat pendapatan masyarakat yang bekerja/berusaha pariwisata lebih tinggi dibandingkan masyarakat lainnya dan harga lahan permukiman di kawasan wisata Pantai Kartini lebih tinggi dari wilayah sekitarnya.
2. Perubahan kondisi sosial masyarakat yaitu masyarakat pesisir kehidupannya tidak bergantung dari hasil perikanan laut. Demikian pula terjadi kesenjangan sosial diantara masyarakat dan perpindahan penduduk dari luar bermukim di kawasan wisata Pantai Kartini.
3. Adanya penataan lingkungan fisik permukiman berupa pembangunan jalan lingkungan, program peningkatan kualitas permukiman, dan pemugaran rumah.
4. Perubahan fungsi permukiman, dimana rumah-rumah di permukiman kawasan wisata Pantai Kartini difungsikan sebagai sebagai tempat usaha yang dapat menghasilkan keuntungan (komoditas).

Permasalahan ini diidentifikasi sebagai dampak perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini. Masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan wisata menerima dampak paling besar dari kegiatan pariwisata dikarenakan mereka menjadi

pelaku ekonomi di daerah tujuan wisata. Menurut Wiranatha (2008), perkembangan kepariwisataan memberikan dampak positif maupun negatif terhadap daerah dan masyarakat dimana kegiatan pariwisata tersebut dilaksanakan. Secara umum, pariwisata berdampak positif terhadap perekonomian yaitu peningkatan pendapatan masyarakat di daerah tujuan wisata, membuka lapangan pekerjaan, dan peningkatan infrastruktur/fasilitas umum di daerah tujuan wisata. Namun, pariwisata juga dapat berdampak negatif, seperti terjadinya degradasi sosial-budaya masyarakat. Dampak negatif juga bisa terjadi pada perekonomian masyarakat dimana terjadi kesenjangan pendapatan/kesejahteraan masyarakat antara pelaku pariwisata dengan masyarakat lain yang tidak bersentuhan dengan pariwisata secara langsung, serta ketidakberdayaan masyarakat lokal dalam hal persaingan ekonomi dengan investor dari luar daerah.

Kemudian aktivitas baru pariwisata dan permukiman pesisir dalam sebuah kawasan mengakibatkan perubahan terhadap fungsi-fungsi permukiman yang terbentuk di kawasan tersebut. Rossi (1982) menyatakan bahwa perubahan fungsi sebuah kota/permukiman sangat dipengaruhi oleh perubahan aktivitas dan gaya hidup masyarakat, dimana perubahan tersebut merupakan bentuk adaptasi (penyesuaian) antara kebutuhan masyarakat dengan kondisi lingkungannya.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan dampak pariwisata yang ditimbulkan terhadap masyarakat di daerah tujuan wisata, maka dengan perkembangan kawasan wisata

Pantai Kartini diatas muncul permasalahan pokok sebagai pertanyaan penelitian (*research question*) yaitu: “Bagaimanakah dampak perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini terhadap masyarakat setempat di Kabupaten Jepara?”

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

Beberapa pendekatan teoritis tentang dampak kegiatan pariwisata dari berbagai literatur, khususnya yang didasari atas tinjauan perencanaan dan beberapa disiplin ilmu lainnya, analisis dampak pariwisata yang meliputi dampak ekonomi, sosial dan lingkungan fisik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fungsi permukiman. Berdasarkan hal tersebut perlu dilihat implementasi dari teori tersebut di kawasan wisata Pantai Kartini sebagai daerah tujuan wisata. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan dampak perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini terhadap masyarakat lokal di Kabupaten Jepara. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui sasaran penelitian sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini.
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi ekonomi, sosial masyarakat dan lingkungan fisik serta fungsi permukiman pesisir sebelum perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini.
- c. Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi ekonomi, sosial masyarakat dan lingkungan fisik serta fungsi permukiman pesisir setelah perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini.

- d. Mengidentifikasi dan menganalisis dampak positif dan negatif perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini
- e. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahan fungsi permukiman pesisir di Pantai Kartini

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian secara teoritis maupun praktis dalam perencanaan wilayah pesisir yaitu:

1. Manfaat teoritis bagi akademis diharapkan dapat menambah kajian analisis dan evaluasi yang objektif dampak pariwisata terhadap masyarakat setempat di wilayah pesisir, sehingga akan bermanfaat untuk mendorong perencanaan dan pengelolaan sumber daya pesisir.
2. Manfaat praktis bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam penetapan kebijakan pengembangan kawasan wisata Pantai Kartini dimasa mendatang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1 Lingkup Materi (*Substansial*)

Untuk membatasi permasalahan dan pengertian dalam penelitian ini perlu dirumuskan lingkup materi (*substansial*) penelitian sebagai berikut:

1. Pariwisata bahari adalah kegiatan rekreasi menikmati keindahan lingkungan alam dan atraksi wisata yang langsung memanfaatkan wilayah pesisir dan lautan (seperti: berperahu, berenang, *snorkling*, menyelam dan memancing), dan tidak secara langsung (seperti: olah raga pantai dan menikmati laut).
2. Kawasan wisata adalah kesatuan ekologi dengan luas tertentu terdiri dari daratan dan lautan yang dikelola untuk kebutuhan pariwisata.
3. Objek dan daya tarik wisata adalah hal-hal yang dapat menarik orang untuk berkunjung ke suatu tempat tujuan wisata.
4. Fasilitas wisata adalah sarana-sarana pelengkap yang disediakan untuk kenyamanan bagi wisatawan.
5. Dampak pariwisata adalah perubahan-perubahan yang terjadi terhadap masyarakat sebagai komponen dalam lingkungan hidup sebelum ada kegiatan pariwisata dan setelah ada kegiatan pariwisata.
6. Dampak ekonomi pariwisata adalah perubahan terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan serta produktivitas masyarakat akibat aktivitas/kegiatan pariwisata. Indikator: kesempatan kerja adalah munculnya jenis pekerjaan/usaha baru di kawasan wisata; pendapatan adalah jumlah nilai uang yang diterima oleh seluruh anggota keluarga bekerja dalam rupiah per bulan; dan harga lahan adalah nilai jual lahan sesuai luas yang ditempati dalam rupiah per m².

7. Dampak sosial pariwisata adalah pengaruh aktivitas/kegiatan pariwisata terhadap terjadinya perubahan sosial yaitu gejala berubahnya struktur sosial dalam masyarakat akibat aktivitas/kegiatan pariwisata. Indikator: kesenjangan sosial adalah adanya jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat oleh perbedaan status sosial maupun status ekonomi; ketergantungan adalah ketergantungan ekonomi masyarakat pada kegiatan pariwisata yang diukur dari jumlah anggota keluarga yang bekerja di kawasan wisata; dan migrasi adalah kedatangan penduduk dari luar bermukim di kawasan wisata yang diukur dari asal daerah dan lama tinggal.
8. Dampak lingkungan fisik pariwisata adalah perubahan peningkatan kondisi kualitas lingkungan fisik permukiman diukur melalui penyediaan dan perbaikan prasarana dan sarana dasar permukiman akibat aktivitas/kegiatan pariwisata.
9. Prasarana permukiman adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Indikator: kondisi jalan lingkungan/kampung dan kondisi air bersih di permukiman.
10. Sarana permukiman adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Indikator: kondisi saluran pematusan untuk pembuangan air hujan serta terhindar dari genangan. Persampahan adalah pengelolaan sampah rumah tangga diukur dari penyediaan tempat sampah

diluar rumah dan tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS).

11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
12. Perubahan fungsi permukiman adalah fungsi rumah sebagai sebagai tempat untuk melakukan kegiatan usaha seperti perdagangan dan industri.
13. Masyarakat setempat adalah sekelompok warga yang tinggal di kawasan wisata Pantai Kartini yang hidup bersama dan memenuhi kebutuhan hidupnya.
14. Karakteristik masyarakat pesisir dari kondisi ekonomi memiliki mata pencaharian tradisional usaha perikanan dan tingkat pendapatan masih rendah berada pada garis kemiskinan. Kondisi sosial dicirikan dengan tingkat pendidikan masih rendah dan ketergantungan kehidupannya dari sumber-sumber perikanan di laut. Kondisi lingkungan fisik penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar seperti jalan lingkungan, air bersih, sanitasi dan persampahan sangat terbatas dan tidak mencukupi jauh dari layak huni.

1.5.2 Lingkup Wilayah (*Spatial*)

Adapun lingkup wilayah (*spatial*) penelitian ini dilakukan di kawasan wisata Pantai Kartini Kelurahan Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara (delineasi spasial pada Gambar 1.1).



Sumber: Google Earth, 2008

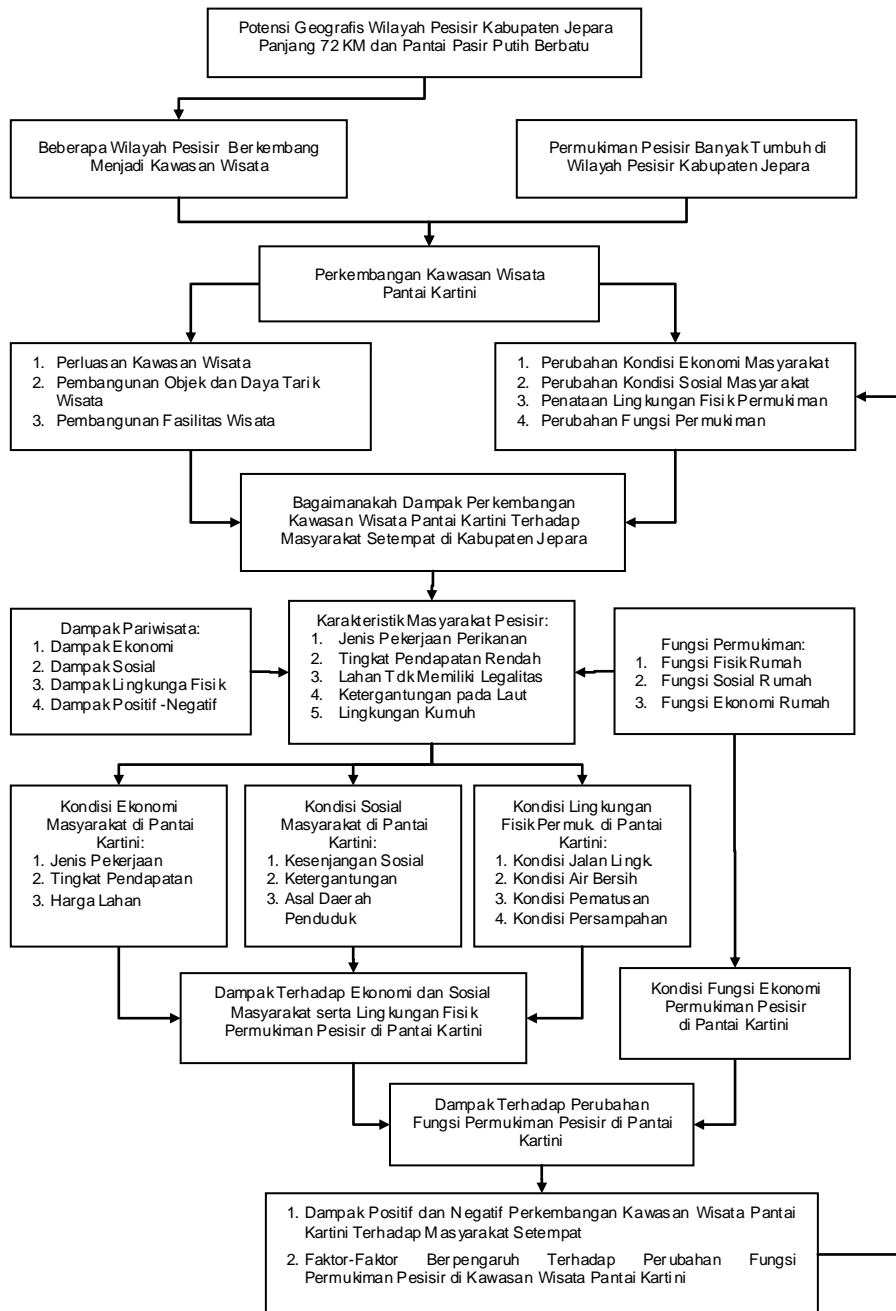
GAMBAR 1.1
PETA WILAYAH STUDI KAWASAN WISATA
PANTAI KARTINI JEPARA

1.6 Kerangka Pemikiran

Gambar 1.2 dibawah ini melukiskan secara skematis proses terjadinya dampak dari perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini. Potensi geografis wilayah pesisir Kabupaten Jepara sepanjang 72 km dengan pasir putih berbatu banyak berkembang menjadi kawasan wisata, dimana kawasan wisata yang perkembangannya pesat yaitu kawasan wisata Pantai Kartini. Perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini menimbulkan

dampak primer berkembangnya aktivitas di kawasan tersebut yaitu pembangunan objek dan daya tarik wisata serta fasilitas penunjang pariwisata. Di wilayah pesisir Pantai Kartini tersebut terdapat permukiman masyarakat pesisir. Permukiman pesisir merupakan permukiman nelayan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat hunian masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.

Masyarakat pesisir memiliki karakteristik ekonomi dengan mata pencaharian tradisional yang kegiatan utama di dominasi oleh usaha perikanan, tingkat pendapatan masih rendah sehingga berada pada garis kemiskinan. Lahan permukiman yang ditempati tidak memiliki status hukum (legalitas) yang merupakan kawasan lindung sempadan pantai dengan harga lahan rendah. Selain itu kondisi sosial dicirikan dengan tingkat pendidikan masih rendah, mata pencaharian umumnya masih tradisional terbatas pada satu produk saja yaitu ikan, dan ketergantungan kehidupannya dari sumber-sumber perikanan di laut, sehingga kurang mendukung untuk melakukan diversifikasi usaha. Demikian pula kondisi lingkungan fisik penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar yang terbatas dan tidak mencukupi. Penyediaan sarana pelayanan dasar seperti jalan lingkungan, air bersih, sanitasi dan persampahan yang terbatas dan tidak mencukupi ini menyebabkan lingkungan permukiman masyarakat pesisir jauh dari layak huni (kumuh) dengan tingkat kepadatan bangunan sangat tinggi dan kualitas bangunan yang sangat rendah.



Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2008

GAMBAR 1.2
KERANGKA PEMIKIRAN

Selanjutnya dampak primer tersebut mengakibatkan dampak sekunder yaitu: perubahan kondisi ekonomi masyarakat pesisir yang diketahui dari jenis pekerjaan, tingkat pendapatan dan harga lahan. Perubahan kondisi sosial masyarakat pesisir dari tingkat kesenjangan sosial, tingkat ketergantungan, dan asal daerah penduduk. Perubahan lingkungan fisik permukiman pesisir dari kondisi jalan lingkungan, air bersih, pematasan dan persampahan. Perubahan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat serta lingkungan fisik permukiman pesisir tersebut mengakibatkan dampak sekunder berikutnya yang ditimbulkan yaitu dampak terhadap perubahan fungsi permukiman masyarakat pesisir di kawasan wisata Pantai Kartini berfungsi ekonomi untuk usaha dalam memenuhi kebutuhan pariwisata (pengunjung).

1.7 Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertitik tolak dari fakta di lapangan (realitas objektif) dan cara berpikir positivistik melalui kajian teoritis untuk melakukan uji statistik. Pendekatan penelitian kuantitatif lebih menekankan dasar teori struktural fungsional, *positivisme*, *behaviorisme*, logika empirik dan sistem teoritik. Pada pendekatan kuantitatif, jenis-jenis bidang pendekatan ialah eksperimen, *hard data*, empirik, positivistik, fakta nyata di masyarakat dan statistik, eksperimen, survei, interview terstruktur, dan seterusnya (Musianto, 2002).

Metode penelitian ini, dari 3 macam tipe penelitian yang dibedakan oleh Gulo (2002:18-19) berdasarkan pertanyaan dasar dari penelitian, yaitu: (1) Apa, untuk penelitian eksploratif, (2) Bagaimana, untuk penelitian deskriptif, dan (3) Mengapa, untuk penelitian eksplanatif. Berdasarkan tipe penelitian tersebut, penelitian ini termasuk jenis penelitian eksplanatif yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel dampak perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini terhadap ekonomi masyarakat dan sosial masyarakat serta lingkungan fisik permukiman pesisir. Selanjutnya menjelaskan pengaruh faktor-faktor ekonomi masyarakat dan sosial masyarakat serta lingkungan fisik terhadap perubahan fungsi permukiman pesisir melalui pengujian hipotesis. Menurut Singarimbun dan Effendi (1995:5), bahwa penelitian penjelasan (*explanatory research*) dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa.

1.8 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

1.8.1 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang dihimpun dari para pelaku yang terlibat dalam perkembangan kawasan wisata Pantai Katini.

a. Data Primer.

Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin,

2005:122). Data primer diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh para responden masyarakat yang bermukim di kawasan wisata Pantai Kartini. Data primer juga di peroleh dari wawancara dengan para pelaku mengetahui secara langsung perkembangan dan pengambil kebijakan pengembangan kawasan wisata Pantai Kartini terdiri dari Kepala bidang pengembangan dan pengelolaan pariwisata Dinas Pariwisata, Kepala bidang penataan ruang Bappeda, dan tokoh masyarakat yang tinggal di kawasan wisata Pantai Kartini. Untuk kebutuhan data primer juga dilakukan observasi atau pengamatan langsung di wilayah penelitian.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder yang dibutuhkan (Bungin, 2005:122). Data sekunder yang bersumber dari data yang telah dihimpun oleh instansi yang terkait dengan pengembangan kawasan wisata Pantai Kartini yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara dan Bappeda Kabupaten Jepara.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi pustaka, dimaksudkan untuk mendapatkan kajian literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti tentang: dampak perkembangan pariwisata, fungsi permukiman dan masyarakat pesisir
- b. Kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pernyataan yang digunakan untuk mengetahui karakteristik responden, sebagaimana Arikunto (1998:140)

bahwa kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi responden dalam arti tentang pribadinya, atau hal-hal yang diketahui dalam penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di kawasan wisata Pantai Kartini sebanyak 314 orang. Menurut Sugiyono (2005: 55) populasi adalah wilayah generalisasi yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Teknik pengambilan sampel didasarkan pada *purposive sample* seperti dinyatakan Sugiyono (2005: 61) adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penentuan sampel penelitian ini berdasarkan pertimbangan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki karakteristik mendekati populasi adalah seluruh rumah tangga yang berada di kawasan wisata dengan responden kepala rumah tangga sebanyak 62 orang. Dengan pengambilan sampel ini diharapkan hasil data dan informasi yang diperoleh dapat merepresentasikan dari populasi.

- c. Wawancara, merupakan pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pelaku yang mengetahui perkembangan kawasan wisata dan kebijakan pengembangan kawasan wisata Pantai Kartini, yaitu:
- Kepala bidang pengembangan dan pengelolaan pariwisata (1 orang).
 - Kepala bidang penataan ruang Bappeda (1 orang).
 - Tokoh masyarakat bermukim di kawasan wisata (1 orang).

- d. Teknik dokumentasi, pengumpulan dan pengambilan dokumen yang berkaitan dan diperlukan dalam penelitian ini. Dokumen di kawasan wisata yaitu objek dan daya tarik wisata, fasilitas wisata, parasarana dan sarana lingkungan permukiman. Demikian juga dokumen dari Dinas Pariwisata selaku unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pariwisata dan Bappeda selaku unsur perencanaan pemerintah daerah.

1.8.2 Teknik Analisis Data

Menurut Purwanto (2007:109-96) analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami untuk di interpretasikan. Analisis data dilakukan dengan dua cara yaitu pertama teknik analisis deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran mengenai perkembangan kawasan wisata, dan kondisi masyarakat dan permukiman pesisir di Pantai Kartini. Kedua teknik analisis data menggunakan tabulasi silang (*Crosstabs*) untuk menganalisis variabel-variabel dalam penelitian ini, sesuai dengan yang dijelaskan Amir (2006: 76) bahwa analisis *Crosstabs* tidak hanya menghasilkan data frekuensi setiap sel, tetapi lebih dari itu dapat mengukur independensi antar variabel atau keterhubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Untuk menguji signifikansi dampak perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini terhadap kondisi ekonomi masyarakat, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan fisik serta fungsi permukiman pesisir digunakan teknik analisis statistik Chi Kuadrat (*Chi-Square*), seperti yang

dijelaskan Sugiyono (2004) bahwa teknik statistik *Chi Square* dipergunakan untuk menguji probabilitas kemunculan/signifikan atau tidak. Apakah perbedaan frekuensi memang mencerminkan keadaan perbedaan pilihan terhadap sesuatu atau hanya akibat kesalahan sampling. *Chi-Square* untuk analisis perbedaan frekuensi data yang berskala nominal. Adapun Chi Kuadrat dua sampel adalah teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif bila datanya berbentuk nominal dan sampelnya besar (Sugiyono, 2005: 139).

Pengujian hipotesis penelitian dengan menggunakan teknik analisis statistik Chi Kuadrat dilakukan pada taraf kepercayaan (nyata) 95% ($\alpha = 0,05$), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Hipotesis

H_0 : Kedua variabel saling bebas

H_1 : Kedua variabel tidak saling bebas

b. Rumus untuk pengujian hipotesis dua sampel:

$$X^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^k \left[\frac{O_{ij}^2 - E_{ij}}{E_{ij}} \right] \quad (1)$$

dengan derajat kebebasan (dk) = $(r - 1)(k - 1)$

dimana : O_{ij} = frekuensi sel yang diamati

E_{ij} = frekuensi yang diharapkan untuk sel-ij

c. Adapun kriteria pengujian dan pengambilan keputusan adalah:

- Jika $X^2_{hitung} > X^2_{tabel}$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak
 - Jika $X^2_{hitung} < X^2_{tabel}$, maka hipotesis nol (H_0) diterima
- atau
- $Asymp. Sig < \text{taraf nyata } (\alpha)$, H_0 ditolak

- *Asymp. Sig* > taraf nyata (α), H_0 diterima

Untuk menguji signifikansi (keeratan) hubungan antar antar variabel diperoleh dari nilai koefisien kontingensi (Sugiyono, 2005: 224) dengan rumus:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{N + X^2}} \quad (2)$$

Dengan kriteria:

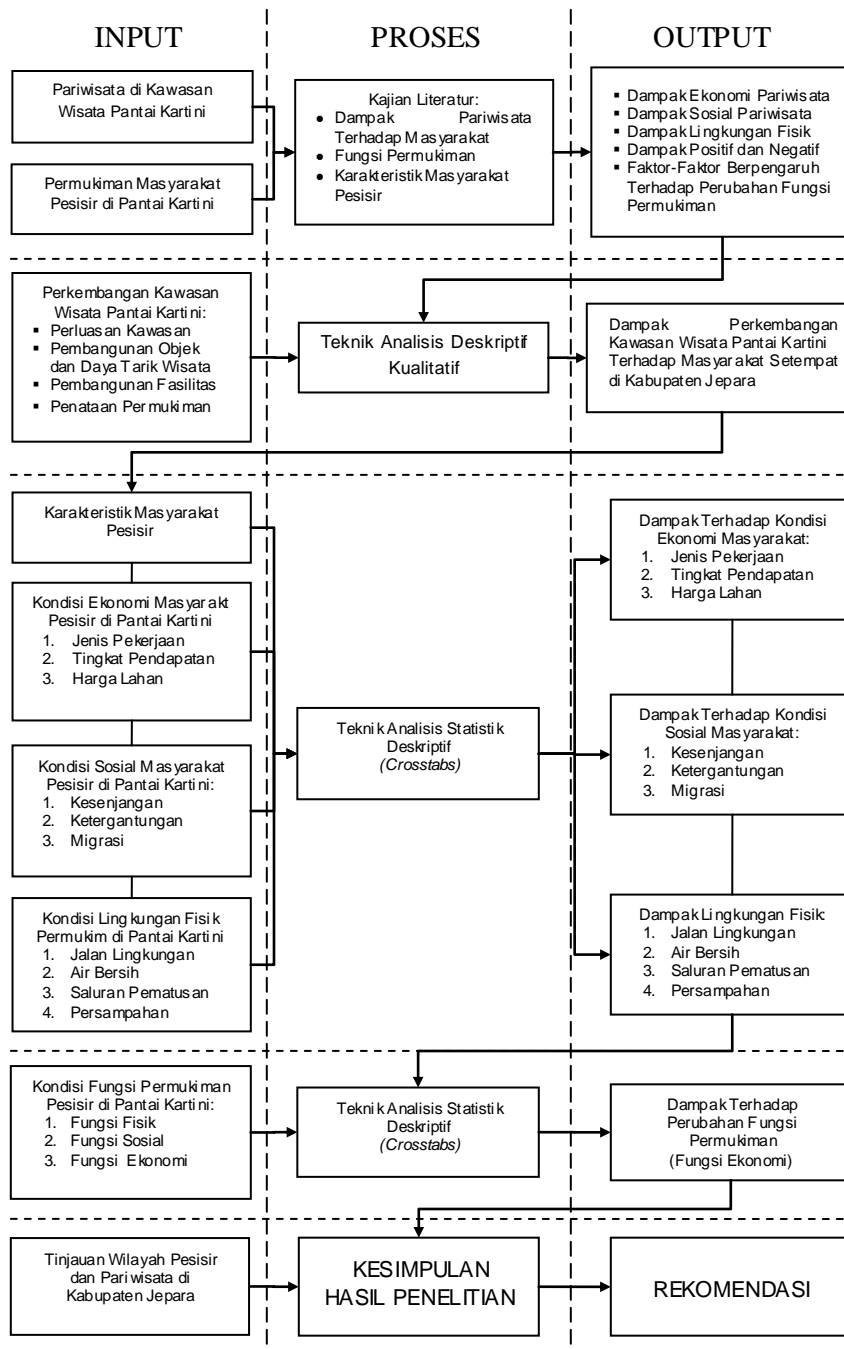
- Koefisien korelasi positif sebesar = 1
- Koefisien korelasi negatif terbesar = -1
- Koefisien korelasi terkecil = 0

Hubungan antara dua variabel atau lebih mempunyai koefisien korelasi = 1 atau -1, maka hubungan tersebut sempurna. Dalam arti kejadian-kejadian yang satu akan dapat dijelaskan atau diprediksi oleh variabel lainnya tanpa terjadi kesalahan (*error*).

Teknik analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak komputer (*software*) program SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) version 11.5 for Windows. Adapun kerangka analisis penelitian ini sebagaimana Gambar 1.3.

1.9 Kedudukan Penelitian dalam Perencanaan Wilayah

Perencanaan pengembangan pariwisata di wilayah pesisir hendaknya dilakukan secara menyeluruh, termasuk diantaranya inventarisasi dan penilaian sumber daya yang cocok untuk pariwisata, perkiraan tentang berbagai dampak (*impact*) terhadap lingkungan pesisir, hubungan sebab dan akibat dari berbagai macam tata guna lahan disertai dengan perincian kegiatan untuk masing-masing tata guna, serta pilihan pemanfaatannya (Dahuri et al., 1996: 215).

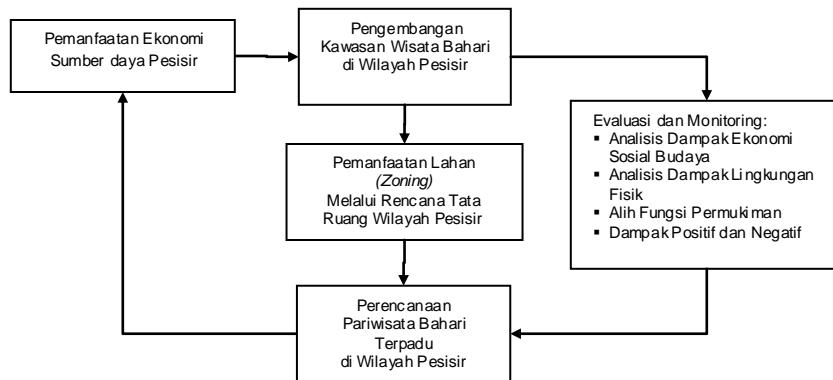


Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2008

GAMBAR 1.3
KERANGKA ANALISIS

Kemudian pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu (*integrated*) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan (*sustainable*). Keterpaduan sudut pandang keilmuan mensyaratkan bahwa di dalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu (*interdisciplinary approaches*), yang melibatkan bidang ilmu ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum dan lainnya yang relevan karena wilayah pesisir pada dasarnya terdiri dari sistem sosial dan sistem alam yang terjalin secara kompleks dan dinamis. Untuk mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan (*sustainable*), maka analisis dampak merupakan unsur penting dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya pesisir, karena substansi perencanaan adalah mengusahakan tercapainya dampak positif dan menghindari dampak negatif.

Pada Gambar 1.4 dibawah ini tampak bahwa kedudukan penelitian ini dalam perencanaan wilayah pesisir sebagai evaluasi dan monitoring dari pelaksanaan pengembangan wilayah pesisir sebagai kawasan wisata yang sudah dilakukan serta masukan dalam perencanaan pengembangan pariwisata bahari terpadu dimasa mendatang.



Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2008

GAMBAR 1.4 PERENCANAAN PARIWISATA BAHARI TERPADU DI WILAYAH PESISIR

1.10 Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab yaitu pendahuluan, kajian literatur, tinjauan wilayah studi, analisis dan pembahasan, dan kesimpulan dan rekomendasi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka pemikiran, pendekatan dan metode penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Literatur Dampak Pariwisata dan Perubahan Fungsi Permukiman

Bab ini mengkaji tinjauan pustaka dan menguraikan literatur yang menunjang penelitian yaitu dampak pembangunan, pariwisata bahari dan kawasan wisata, dampak pariwisata, perubahan fungsi permukiman, dan masyarakat pesisir. Hasil kajian literatur tersebut selanjutnya dirumuskan dalam bentuk sintesa variabel-variabel dampak ekonomi, sosial dan lingkungan fisik serta perubahan fungsi permukiman.

BAB III Tinjauan Pariwisata dan Wilayah Pesisir Kabupaten Jepara

Bab ini memberikan pemaparan mengenai letak geografis Kabupaten Jepara dimana kawasan wisata Pantai Kartini berada, pengembangan pariwisata, kebijakan penataan ruang wilayah pesisir dan penataan permukiman pesisir di Kabupaten Jepara.

BAB IV Analisis Dampak Perkembangan Kawasan Wisata Pantai Kartini dan Perubahan Fungsi Permukiman Pesisir

Bab ini memaparkan analisis data penelitian secara deskriptif tentang dampak perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini terhadap masyarakat setempat dan perubahan fungsi permukiman pesisir dengan memberikan gambaran secara kualitatif berdasarkan perhitungan nilai rata-rata, skor terendah dan tertinggi. Kemudian dilakukan pembahasan kecenderungan dari

variabel-variabel dalam penelitian ini berdasarkan hasil tabulasi silang dan pengujian hipotesis.

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab ini merupakan hasil dari penyusunan tesis yang berisi mengenai kesimpulan berupa temuan dari penelitian dan rekomendasi kepada penelitian selanjutnya dan pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan wilayah pesisir terutama untuk pariwisata bahari sebagai masukan dan evaluasi untuk pengambilan kebijakan dan mengantisipasi dampak negatif.

BAB II

KAJIAN LITERATUR DAMPAK PARIWISATA DAN PERUBAHAN FUNGSI PERMUKIMAN

Bab ini mengkaji tinjauan pustaka dan menguraikan literatur yang menunjang penelitian. Adapun literatur dalam penelitian ini yaitu dampak pembangunan, pariwisata bahari dan kawasan wisata, dampak pariwisata, perubahan fungsi permukiman, dan masyarakat pesisir.

2.1 Dampak Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dikehendaki dan disusun dalam suatu perencanaan. Disamping tujuan-tujuan yang direncanakan dan dikehendaki tersebut, pembangunan dapat mengakibatkan terjadinya dampak pada lingkungan (Soekanto, 1997:488-489). Pembangunan merupakan aktivitas manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti disampaikan Suratmo (2007:2) dapat mengakibatkan dampak berupa perubahan yang terjadi dalam lingkungan. Kemudian dampak pembangunan terhadap lingkungan (Clark, 1978) ialah perbedaan antara kondisi lingkungan sebelum ada pembangunan dan yang diperkirakan akan ada setelah ada pembangunan (Soemarwoto, 2007:39). Dengan demikian dampak pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu perubahan

antara kondisi lingkungan sebelum ada pembangunan dan setelah ada pembangunan.

Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu di sekitar objek yang saling mempengaruhi. Segala sesuatu yang berada dalam suatu lingkungan dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam dan sistem hubungan antara sumber daya alam tersebut. Lingkungan alam adalah suatu kesatuan areal tertentu dengan segala sesuatu yang berada dalam dan sistem hubungan satu sama lainnya. Disini manusia hanya merupakan salah satu komponen yang berada di dalam areal tersebut (Suratmo, 2007:3). Demikian pula Soekanto (1997: 431-432), memberikan pengertian lingkungan adalah hal-hal atau apa-apa yang berada di sekitar manusia, baik sebagai individu maupun dalam pergaulan hidup yang dibedakan dalam kategori-kategori sebagai berikut:

- a. Lingkungan fisik, yakni semua benda mati yang ada di sekeliling manusia;
- b. Lingkungan biologis, yaitu segala sesuatu di sekeliling manusia yang berupa organisme yang hidup (disamping manusia itu sendiri); dan
- c. Lingkungan sosial, yang terdiri dari orang-orang baik individual maupun kelompok yang berada di sekitar manusia.

Berdasarkan pengertian ini, maka masyarakat sebagai komponen dalam lingkungan termasuk yang menerima dampak pembangunan. Hubungan antara tujuan aktivitas manusia dengan dampak pada lingkungan dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:



Sumber: Suratmo (2007:7)

GAMBAR 2.1 **SKEMA HUBUNGAN ANTARA TUJUAN AKTIVITAS** **MANUSIA DENGAN DAMPAK PADA LINGKUNGAN**

Pada Gambar 2.1 diatas ditunjukkan bahwa pembangunan mempunyai sasaran untuk menaikkan tingkat kesejahteraan rakyat. Aktivitas pembangunan itu menimbulkan efek yang tidak direncanakan di luar sasaran, yaitu yang disebut dampak. Dampak dapat bersifat biofisik atau/dan sosial-ekonomi-budaya yang mempunyai pengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai. Dampak primer dapat menimbulkan dampak sekunder, dan seterusnya (Soemarwoto, 2007:39). Demikian pula dampak dapat bersifat langsung ataupun tidak langsung. Dampak langsung atau dampak primer merupakan dampak yang timbul sebagai akibat dari tujuan utama kegiatan atau kebijakan, baik itu berupa biaya atau manfaat (Suparmoko dan Suparmoko, 2000:101).

Biaya dapat didefinisikan sebagai kerugian yang ditanggung oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan proyek pembangunan akibat adanya proyek tersebut, padahal proyek tersebut tidak membayar setiap kerugian tersebut. Biaya ekonomi adalah terganggunya kehidupan ekonomi masyarakat, yang

meliputi faktor-faktor yang menghambat atau mengurangi aktivitas ekonomi mereka. Adapun biaya sosial adalah terganggunya kehidupan sosial masyarakat yang meliputi faktor-faktor yang merusak dan mengganggu kehidupan sosial masyarakat (Antonius Purba, 1996 dalam Tomboelu N. 1999). Manfaat yaitu setiap keuntungan yang diperoleh masyarakat disekitar lokasi kegiatan proyek pembangunan yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi pembangunan proyek tersebut, padahal masyarakat di sekitar proyek tidak memberikan pembayaran/kompensasi dari setiap keuntungan yang dirasakannya. Manfaat ekonomi adalah perkembangan kehidupan ekonomi masyarakat yang meliputi faktor-faktor yang menambah atau mendukung aktivitas ekonomi mereka. Sedangkan manfaat sosial adalah perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang meliputi faktor-faktor yang memperbaiki kehidupan sosial mereka (Antonius Purba, 1996 dalam Tomboelu N. 1999).

2.2 Pariwisata Bahari dan Kawasan Wisata

Kegiatan pariwisata merupakan salah satu bentuk aktivitas manusia, seperti dijelaskan oleh Michael Chubb, et. al., (1981 dalam Sari, 2004) yang mengklasifikasikan aktivitas manusia menjadi lima hal yaitu rekreasi, kebutuhan fisik, spiritual, pekerjaan dan pendidikan, serta tugas-tugas keluarga dan kemasyarakatan. Dimana aktivitas manusia tersebut sebagai suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud

bukan untuk berusaha (*business*) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam (Yoeti, 1985: 109). Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.

Jackson (1989 dalam Pitana dan Gayatri, 2007) menyebutkan bahwa ada empat elemen utama untuk mencapai tujuan umum dan khusus wisatawan, yaitu fasilitas (*facilities*), akomodasi (*accomodation*), transportasi (*transportation*), dan atraksi (*attraction*). Fasilitas dapat didefinisikan sebagai amenitas yaitu penyediaan sarana-sarana pelengkap yang memberikan kenyamanan bagi wisatawan dapat berupa: restoran, kafé, toko souvenir, pusat informasi wisata, biro perjalanan, pos keamanan, dan lain-lain. Akomodasi dan transportasi disebut sebagai aksesibilitas merupakan kemudahan untuk mencapai kawasan wisata. Oleh French (1997:204), disebutkan bahwa aksesibilitas menyangkut jaringan jalan yang lancar dan papan informasi yang jelas, kemudahan perjalanan, tersedianya alat transportasi, dan efisiensi waktu pencapaian menuju kawasan wisata. Atraksi (objek dan daya tarik) merupakan komponen sangat vital, karena atraksi merupakan faktor penyebab utama mengapa seseorang wisatawan mengunjungi suatu daerah tujuan wisata (Pitana dan Gayatri, 2007).

Atraksi dapat diterjemahkan sebagai masa depan yang menarik satu tujuan wisata khusus dimana menjadi alasan utama untuk perjalanan kepada tujuan (tempat). Ini merupakan faktor tarikan dari pariwisata (French, 1997: 124). Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 dinyatakan bahwa objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Objek dan daya tarik wisata (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990) terdiri atas:

1. Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna;
2. Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan.

Kemudian Dahuri et. al. (1996: 215) menyatakan bahwa daya tarik wilayah pesisir untuk wisatawan adalah keindahan dan keaslian lingkungan, seperti kehidupan di bawah air, bentuk pantai (gua-gua, air terjun, pasir dan sebagainya), dan hutan-hutan pantai dengan kekayaan jenis tumbuh-tumbuhan, burung dan hewan-hewan lain.

Pariwisata bahari merupakan kegiatan rekreasi menikmati keindahan lingkungan alam dan atraksi wisata yang ada di wilayah pesisir dan lautan. Dalam kegiatan pariwisata bahari tersebut dilakukan secara langsung dan tidak langsung memanfaatkan wilayah pesisir dan lautan (Nurisyah, 1998). Kegiatan pariwisata bahari yang langsung memanfaatkan wilayah pesisir dan lautan yaitu: berperahu, berenang, *snorkling*,

menyelam dan memancing. Sedangkan pariwisata bahari yang tidak secara langsung memanfaatkan wilayah pesisir dan lautan seperti: olah raga pantai dan menikmati atmosfir laut.

Kegiatan pariwisata bahari tersebut berada dalam kawasan wisata bahari. Kawasan wisata adalah kesatuan ekologi dengan luas tertentu terdiri dari daratan dan lautan yang dikelola untuk kebutuhan pariwisata. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 dinyatakan bahwa kawasan wisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Kawasan wisata sebagai daerah tujuan wisata (destinasi) harus menyediakan berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan agar tujuan kunjungan seorang wisatawan dapat terpenuhi (Pitana dan Gayatri 2007: 101). Hal-hal yang dapat menarik orang untuk berkunjung ke suatu tempat tujuan wisata (Yoeti, 1985:160-180) diantaranya adalah:

1. Benda-benda yang tersedia dan terdapat di alam semesta, yang disebut sebagai *natural amenities* yaitu: iklim (cuaca cerah, banyak cahaya matahari, sejuk, kering, panas, hujan dan sebagainya); bentuk tanah dan pemandangan (tanah datar, lembah pegunungan, danau, sungai, pantai, air terjun, gunung berapi dan pemandangan yang menarik/*panoramic views*); hutan belukar (hutan yang luas dan banyak pepohonan); flora dan fauna (tanaman-tanaman yang aneh, burung-burung, binatang, buas cagar alam, daerah perburuan dan sebagainya); dan pusat-pusat kesehatan (sumber air mineral, mandi lumpur, sumber air panas, dimana diharapkan dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit).

2. Hasil ciptaan manusia (*man made supply*), yaitu benda-benda bersejarah, kebudayaan dan keagamaan (seperti monumen bersejarah dan sisa peradaban manusia masa lampau, museum, *art gallery*, perpustakaan, kesenian rakyat, kerajinan tangan, acara tradisional, pameran, festival, upacara naik haji, upacara perkawinan, masjid, gereja, kuil atau candi maupun pura).
3. Tata cara hidup masyarakat merupakan tata cara hidup tradisional dari suatu masyarakat. Kebiasaan hidup dan adat istiadat masyarakat sebagai daya tarik bagi wisatawan di suatu daerah (seperti: pembakaran mayat (ngaben) di Bali, upacara pemakaman mayat di Tana Toraja, upacara batagok penghulu di Minangkabau, upacara sekaten di Yogyakarta dan sebagainya).

Untuk memenuhi kebutuhan dan pendukung pariwisata, di kawasan wisata dibangun berbagai fasilitas yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha pariwisata yaitu kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990).

2.3 Dampak Pariwisata

Berdasarkan dampak pembangunan dan pariwisata, maka pada prinsipnya Erawan (1987:47 dalam Tashadi, Ed., 1994) membagi menjadi 3 bidang pokok yang dipengaruhi pariwisata

yaitu: ekonomi, sosial dan lingkungan. Demikian pula Pitana dan Gayatri (2005:109) memperkuat dengan menyatakan bahwa pariwisata sebagai suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh masyarakat membawa berbagai dampak. Dampak pariwisata terhadap masyarakat dan daerah tujuan wisata, yaitu: dampak terhadap sosial ekonomi, dampak terhadap sosial budaya dan dampak terhadap lingkungan fisik.

Dampak pariwisata adalah perubahan-perubahan yang terjadi terhadap lingkungan hidup sebelum adanya kegiatan pariwisata dan setelah adanya kegiatan pariwisata baik langsung maupun tidak langsung yang berupa dampak fisik dan non fisik. Adapun masyarakat sebagai salah satu komponen lingkungan hidup juga mengalami perubahan-perubahan. Dampak non fisik terhadap masyarakat yang ditimbulkan yaitu perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kemudian dampak fisik terhadap masyarakat yang terjadi yaitu perubahan lingkungan fisik dan fungsi permukiman.

2.3.1 Dampak Ekonomi Pariwisata

Menurut Sujarto (1993:135) dampak ekonomi adalah pengaruh suatu aktivitas/kegiatan terhadap kondisi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan serta produktifitas masyarakat. Adanya pariwisata mendatangkan devisa negara dan terciptanya kesempatan kerja yang berarti mengurangi jumlah pengangguran serta adanya kemungkinan bagi masyarakat di daerah wisata untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup mereka (De

Kadt, 1979:11 dalam Tashadi, Ed., 1994).

Secara lebih rinci Cohen (1984 dalam Pitana dan Gayatri, 2005: 110) mengkategorikan dampak sosial ekonomi pariwisata terhadap masyarakat kedalam delapan kelompok besar, yaitu: dampak terhadap penerimaan devisa, dampak terhadap pendapatan masyarakat, dampak terhadap kesempatan kerja, dampak terhadap harga-harga, dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan, dampak terhadap kepemilikan dan kontrol, dampak terhadap pembangunan pada umumnya, dan dampak terhadap pendapatan pemerintah.

Adapun dampak terhadap kesempatan kerja diindikasikan dari munculnya sumber-sumber mata pencaharian baru bagi masyarakat (Suratmo, 2007). Kemudian dampak terhadap harga-harga seperti dinyatakan Sari (2004: 80), bahwa pariwisata berdampak terhadap kenaikan inflasi dan harga lahan. Kenaikan inflasi disebabkan para penduduk menawarkan dan menjual barang-barang kepada wisatawan dengan harga mahal. Kemudian minat investor untuk menguasai lahan-lahan di daerah tujuan wisata telah memicu kenaikan harga lahan.

2.3.2 Dampak Sosial Pariwisata

Kuntowijoyo (1991) menyebutkan bahwa industri pariwisata sebenarnya merupakan bagian dari *cultural industry* yang melibatkan seluruh masyarakat, sekalipun dikelola hanya oleh sebagian kecil masyarakat. Meskipun hanya sebagian masyarakat yang terlibat, namun dampak sosial pariwisata lebih

luas seperti dinyatakan Cohen (1984 dalam Pitana dan Gayatri, 2005: 117), secara teoritis dapat dikelompokkan kedalam sepuluh kelompok besar dampak sosial budaya pariwisata. Salah satu diantara dampak sosial pariwisata yaitu dampak terhadap tingkat otonomi atau ketergantungan pada pariwisata.

Kemudian Martin (1998:171 dalam Pitana dan Gayatri, 2005:115) menyatakan dampak sosial pariwisata selama ini lebih cenderung mengasumsikan bahwa akan terjadi perubahan sosial akibat kedatangan wisatawan. Pariwisata berdampak terhadap stratifikasi dan mobilitas sosial (Cohen, 1984 dalam Pitana dan Gayatri, 2005: 117) dengan terjadinya ketimpangan/kesenjangan sosial dalam masyarakat. Sebagaimana disebutkan oleh Wiranatha (2008) bahwa dampak pariwisata terhadap masyarakat termasuk terjadinya kesenjangan pendapatan/kesejahteraan masyarakat antara pelaku pariwisata dengan masyarakat lain yang tidak bersentuhan dengan pariwisata secara langsung. Begitu juga kawasan wisata sebagai daerah tujuan wisata memunculkan aktivitas ekonomi yang menjadi faktor daya tarik penduduk yang menurut Cohen (1984 dalam Pitana dan Gayatri, 2005: 117) berdampak terhadap migrasi dari dan ke daerah pariwisata.

2.3.3 Dampak Pariwisata Terhadap Lingkungan Fisik

Lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang bersifat tidak bernyawa, misalnya air, tanah, kelembaban udara, suhu, angin, rumah dan benda mati lainnya. Dahuri et al. (2001: 226) menyatakan bahwa bila suatu wilayah

pesisir dibangun untuk tempat rekreasi, biasanya fasilitas-fasilitas pendukung lainnya juga berkembang pesat. Wiranatha (2008) menyatakan bahwa secara umum, pariwisata berdampak positif salah satunya peningkatan infrastruktur di daerah tujuan wisata. Dampak terhadap lingkungan fisik di kawasan wisata adalah penyediaan prasarana dan sarana untuk menunjang kegiatan wisata. Adapun dampak lingkungan fisik terhadap permukiman di kawasan wisata sebagaimana Sujarto (1993:134) tegaskan bahwa dampak fisik diperlihatkan oleh peningkatan kondisi kualitas lingkungan fisik yang bersih, nyaman dan bebas banjir melalui penyediaan dan perbaikan prasarana dan sarana dasar bagi permukiman yang memadai.

Dampak pariwisata terhadap lingkungan fisik permukiman di kawasan wisata adalah penyediaan prasarana dan sarana untuk menunjang kegiatan permukiman di kawasan wisata. Prasarana permukiman yang harus dilengkapi di dalam kawasan wisata adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu: jaringan jalan untuk mobilitas manusia dan menciptakan bangunan yang teratur; dan jaringan air bersih untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat. Sedangkan sarana lingkungan permukiman sebagai fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya yaitu: jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan; dan jaringan saluran air hujan untuk pematuan (drainase) dan pencegahan banjir setempat.

2.3.4 Dampak Positif dan Negatif Pariwisata

Perkembangan pariwisata menimbulkan berkembangnya aktivitas di daerah tujuan wisata yaitu pengembangan objek dan daya tarik wisata dan fasilitas di kawasan wisata untuk memenuhi kebutuhan pariwisata yang menimbulkan dampak positif dan negatif. Sebagaimana yang disebut Erawan (1987:47 dalam Tashadi, Ed., 1994), dampak positif merupakan keuntungan berkembangnya pariwisata dan dampak negatif dapat ditelusuri sebagai kerugian yang timbul akibat pengembangan pariwisata.

Dampak positif pariwisata yaitu penerimaan devisa negara dan terciptanya kesempatan kerja yang berarti mengurangi jumlah pengangguran serta adanya kemungkinan bagi masyarakat di daerah wisata untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup mereka (De Kadt, 1979:11 dalam Tashadi, Ed., 1994). Kondisi ini positif karena secara ekonomi menguntungkan bagi negara dan masyarakat di daerah tujuan wisata. Lebih luas manfaat (*benefit*) pariwisata terhadap masyarakat seperti dinyatakan oleh Wiranatha (2008), bahwa selain peningkatan pendapatan masyarakat di daerah tujuan wisata dan membuka lapangan pekerjaan, pariwisata juga berdampak positif terhadap peningkatan infrastruktur/fasilitas umum di daerah tujuan wisata.

Sedangkan dampak negatif pariwisata terhadap masyarakat yaitu terjadinya kesenjangan pendapatan/kesejahteraan masyarakat antara pelaku pariwisata dengan masyarakat lain yang tidak bersentuhan dengan pariwisata secara langsung. Ketergantungan yang berlebihan pada pariwisata juga merupakan dampak negatif (Sari 2004: 79) karena mata pencaharian

penduduk menjadi sangat tergantung pada kunjungan wisatawan. Hal ini mengingat pariwisata sangat rentan terhadap perubahan dari dalam seperti kerusuhan politik di daerah tujuan wisata dan perubahan dari luar seperti krisis ekonomi global. Kemudian migrasi juga dampak negatif pariwisata karena masuknya pendatang bekerja di sektor pariwisata menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat lokal dalam hal persaingan ekonomi dengan investor dari luar daerah Wiranatha (2008).

2.4 Perubahan Fungsi Permukiman

Pengertian permukiman secara terminologis adalah ruang (*space*) bertemunya beragam komunitas (*community*) untuk berinteraksi dan suatu sosialisasi masyarakat (Sukanti, 1979: 39). Permukiman dapat dilihat sebagai ruang dimana keseluruhan interaksi sistem sosial (yang meliputi manusia dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya) berlangsung. Permukiman merupakan kawasan yang difungsikan sebagai tempat hunian untuk melakukan kegiatan menjalani kehidupan bersama dalam pembentukan keluarga (komunitas). Selain itu dalam suatu permukiman terjadi proses saling mengenal baik antar penghuni (sosialisasi) maupun dengan masyarakat di sekitarnya (bermasyarakat).

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 dinyatakan bahwa permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan

tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Berbeda dengan rumah di negara maju yang memang merupakan tempat hunian semata-mata, rumah kebanyakan penduduk kota di Indonesia berfungsi ganda sebagai wahana menambah penghasilan. Kegiatan usaha non formal seperti warung, kios, tempat jahit, urut, cukur, persewaan buku, lazim disebut usaha emper depan (*front-porch business*). Dalam pemintakatan (*zoning*) tata ruang kota, pola tataguna bangunan campuran semacam ini wajib diperhitungkan dan diabsahkan (Budihardjo, 1994:39).

Kemudian Turner (1972: 212-213) menyatakan bahwa rumah dapat diartikan dalam beberapa pendekatan yaitu dalam arti fisik, ekonomi dan sosial. Dalam arti fisik adalah rumah dipandang sebagai tempat berlindung dari perubahan iklim dan cuaca, penyakit, ataupun serangan musuh yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti air bersih, tempat pembuangan kotoran, ventilasi, jumlah ruang tidur dan lain sebagainya. Rumah dalam arti ekonomi adalah rumah dipandang sebagai investasi sehingga dapat dipergunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan ekonomi serta merupakan pendorong kegiatan ekonomi lainnya seperti perdagangan dan industri. Sedangkan rumah dalam arti sosial adalah rumah dipandang sebagai tempat melakukan proses sosialisasi baik bagi keluarga atau pergaulan dengan masyarakat.

Fungsi-fungsi yang terbentuk dalam suatu permukiman ditentukan oleh dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Permukiman maupun kota adalah merupakan suatu konsentrasi/kumpulan elemen-elemen fisik spasial yang selalu

tumbuh dan berkembang. Elemen-elemen fisik tersebut terbentuk karena adanya fungsi-fungsi yang berlangsung dalam suatu lingkungan. Perubahan sebuah kota/permukiman sangat dipengaruhi oleh perubahan aktivitas masyarakat yang mendiami (Rossi, 1982). Dalam hal ini permukiman/kota terbentuk sebagai akibat adanya fungsi dari aktivitas manusia yang luas dan kompleks dan disisi lain juga dapat dilihat sebagai hasil dari bentukan fisik buatan manusia yang terbentuk dari waktu ke waktu dan tumbuh tidak hanya secara fisik namun tumbuh bersama masyarakatnya (Spreiregen, 1985). Adapun Prianto, ed. (2005) menyatakan bahwa perkembangan dan pertumbuhan kota pada dasarnya merupakan konsekuensi dari berbagai perubahan sosial budaya, sosial ekonomi dan politik. Salah satu faktor yang sangat kuat berpengaruh adalah karena perubahan kegiatan usaha dan kehidupan penduduk kota tersebut.

Aktivitas pariwisata yang berkembang dan permukiman masyarakat dalam sebuah kawasan, akan mempengaruhi fungsi permukiman yang terbentuk di kawasan tersebut. Masyarakat di kawasan wisata yang menjadi pelaku ekonomi pariwisata, dimana rumah disamping fungsi fisik sebagai hunian dan fungsi sosial untuk bermasyarakat permukiman juga memiliki fungsi ekonomi yaitu untuk melakukan kegiatan usaha.

2.5 Masyarakat Pesisir

Masyarakat (*Community*) dapat diterjemahkan sebagai masyarakat setempat dimana menunjuk pada warga sebuah desa,

kota, suku atau bangsa, baik kelompok besar maupun kecil yang hidup bersama sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama (Soekanto, 1997: 162). Adapun wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah daratan yang berbatasan dengan laut, batas di daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut dan intrusi garam, sedangkan batas di laut ialah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan (Bengen, 2001).

Masyarakat pesisir adalah sekelompok warga yang tinggal di wilayah pesisir yang hidup bersama dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari sumber daya di wilayah pesisir. Masyarakat yang hidup di kota-kota atau permukiman pesisir memiliki karakteristik secara sosial ekonomis sangat terkait dengan sumber perekonomian dari wilayah laut. (Prianto, ed., 2005). Demikian pula jenis mata pencaharian yang memanfaatkan sumber daya alam atau jasa-jasa lingkungan yang ada di wilayah pesisir seperti nelayan, petani ikan, dan pemilik atau pekerja industri maritim. Masyarakat pesisir yang di dominasi oleh usaha perikanan pada umumnya masih berada pada garis kemiskinan, mereka tidak mempunyai pilihan mata pencaharian, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, tidak mengetahui dan menyadari kelestarian sumber daya alam dan lingkungan (Lewaherilla, 2002). Selanjutnya dari status legalitas lahan, karakteristik

beberapa kawasan permukiman di wilayah pesisir umumnya tidak memiliki status hukum (legalitas), terutama area yang direklamasi secara swadaya oleh masyarakat (Suprijanto, 2006).

Dahuri, et. al., (1996: 285) menyatakan bahwa permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir, antara lain: sarana pelayanan dasar termasuk prasarana fisik masih terbatas; kondisi lingkungan kurang terpelihara, sehingga kurang memenuhi persyaratan kesehatan; air bersih dan sanitasi jauh dari mencukupi; keadaan perumahan umumnya masih jauh dari layak huni; ketrampilan yang dimiliki penduduk umumnya terbatas pada masalah penangkapan ikan sehingga kurang mendukung diversifikasi kegiatan; pendapatan penduduk rendah; pendidikan dan pengetahuan masyarakat umumnya rendah; dan kegiatan ekonomi masyarakat, umumnya masih tradisional terbatas pada satu produk saja yaitu ikan.

Karakteristik masyarakat pesisir secara ekonomi memiliki mata pencaharian tradisional yang kegiatan utama di dominasi oleh usaha perikanan dan tingkat pendapatan masih rendah sehingga mereka berada pada garis kemiskinan. Selain itu kondisi sosial dicirikan dengan tingkat pendidikan masih rendah dan ketergantungan kehidupannya dari sumber-sumber perikanan di laut, sehingga kurang mendukung untuk melakukan deversifikasi usaha. Penyediaan sarana pelayanan dasar seperti jalan lingkungan, air bersih, sanitasi dan persampahan yang terbatas dan tidak mencukupi menyebabkan lingkungan permukiman masyarakat pesisir jauh dari layak huni (kumuh)

dengan tingkat kepadatan bangunan sangat tinggi dan kualitas bangunan yang sangat rendah.

2.6 Sintesa Literatur

Dari berbagai literatur diatas di rumuskan variabel-variabel penelitian dan indikator-indikator dampak perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini dan perubahan fungsi permukiman sebagaimana pada Tabel II.1.

TABEL II.1
VARIABEL DAMPAK EKONOMI, DAMPAK SOSIAL,
DAN DAMPAK LINGKUNGAN FISIK SERTA
PERUBAHAN FUNGSI PERMUKIMAN

SUMBER	SUBSTANSI	VARIABEL	INDIKATOR
Cohen (1984)	Dampak Sosial Ekonomi Pariwisata: Pendapatan, Pekerjaan, Kenaikan harga-harga	Dampak Perkembangan Kawasan Wisata Pantai Kartini Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat	Kondisi Ekonomi Masyarakat: • Jenis Pekerjaan • Tingkat pendapatan • Harga lahan
Sujarto (1993)	Dampak Ekonomi: peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan serta produktifitas masyarakat		
De Kadt (1979:11 dalam Tashadi, Ed., 1994).	Dampak Pariwisata dari ekonomi: terciptanya kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan.		
Sari (2004: 80)	Pariwisata berdampak terhadap kenaikan inflasi dan harga lahan.		
Cohen (1984)	Dampak Sosial Budaya Pariwisata: • Ketergantungan • Statifikasi dan mobilitas sosial • Migrasi	Dampak Perkembangan Kawasan Wisata Pantai Kartini	Kondisi Sosial Masyarakat: • Tingkat Kesenjangan Sosial • Tingkat Ketergantungan • Asal Daerah

Wiranatha (2008)	Dampak pariwisata adalah terjadinya kesenjangan pendapatan/kesejahteraan masyarakat antara pelaku pariwisata dengan masyarakat lain yang tidak bersentuhan dengan pariwisata secara langsung.	Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat	
Sari (2004: 79)	Ketergantungan pada pariwisata, mata pencaharian penduduk tergantung kunjungan wisatawan.		
SUMBER	SUBSTANSI	VARIABEL	INDIKATOR
Sujarto (1993)	Dampak Fisik Terhadap Permukiman adalah Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman	Dampak Perkembangan Kawasan Wisata	Kondisi Lingkungan Fisik Permukiman: •Kondisi Jalan Lingkungan •Kondisi Air bersih •Kondisi Pemasukan/Sanitasi •Kondisi Persampahan
Wiranatha (2008)	Dampak Pariwisata Terhadap Pembangunan Infrastruktur/fasilitas di Daerah Tujuan Wisata	Pantai Kartini Terhadap Kondisi Lingkungan Fisik Permukiman	
De Kadt (1979:11 dalam Tashadi, Ed., 1994).	Dampak positif menguntungkan dalam bidang ekonomi adalah kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan standar hidup masyarakat	Dampak positif dan Negatif Perkembangan Kawasan Wisata Pantai Kartini	Dampak Positif : •Munculnya pekerjaan sektor pariwisata •Kenaikan pendapatan •Kenaikan harga lahan Dampak Negatif: •Terjadinya kesenjangan Sosial • Ketergantungan tinggi pada pariwisata • Masuknya penduduk pendatang
Wiranatha (2008)	Dampak positif pariwisata: peningkatan infrastruktur dan negatif: kesenjangan pendapatan		
Sari (2004: 79)	Ketergantungan pada pariwisata dampak negatif mengingat pariwisata sangat rentan terhadap perubahan dari dalam dan luar.		
Rossi (1982)	Perubahan sebuah kota/permukiman sangat dipengaruhi oleh perubahan aktivitas masyarakat yang mendiami.	Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Perubahan Fungsi Permukiman	Perubahan aktivitas masyarakat •Munculnya pekerjaan sektor pariwisata •Kenaikan pendapatan •Kenaikan harga lahan •Terjadinya kesenjangan Sosial •Ketergantungan tinggi pada pariwisata •Masuknya penduduk pendatang •Penataan Lingkungan Fisik
Spreiregen (1985)	Permukiman/kota terbentuk sebagai akibat adanya fungsi dari aktivitas manusia yang luas dan kompleks.		

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2008

BAB III

TINJAUAN WILAYAH PESISIR DAN PARIWISATA DI KABUPATEN JEPARA

Bab ini menjelaskan letak geografis Kabupaten Jepara dimana kawasan wisata Pantai Kartini berada di Kelurahan Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, kebijakan penataan ruang wilayah pesisir, pengembangan pariwisata dan penataan permukiman pesisir di Kabupaten Jepara.

3.1 Letak Geografis Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak pada 5°43'20,67" sampai 6°47'25, 83" Lintang Selatan dan 110°9'48, 02" sampai 110°58'37,40" Bujur Timur. Sebelah Barat dan Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Pati dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak. Luas wilayah Kabupaten Jepara 1.004,132 Km² (100.413,189 Ha) yang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 194 Desa/Kelurahan. Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimunjawa, yakni gugusan pulau-pulau di Laut Jawa.

Jumlah penduduk Kabupaten Jepara berdasarkan hasil Sensus 2007 adalah sebanyak 1.073.631 jiwa yang terdiri dari 540.293 laki-laki (50,32%) dan 533.338 perempuan (49,68%),

dimana sebaran penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Mlonggo 127.429 jiwa (11,87%) dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Karimunjawa 8.551 jiwa (0,80%). Kepadatan penduduk Kabupaten Jepara mencapai 1.069 jiwa per km². Penduduk terpadat berada di Kecamatan Jepara (3.039 jiwa per km²), sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Karimunjawa (120 jiwa per km²).

Adapun pembagian administrasi dan luas wilayah kecamatan di Kabupaten Jepara dapat dilihat pada Tabel III.1.

TABEL III.1
PEMBAGIAN ADMINISTRASI DAN LUAS WILAYAH
KECAMATAN DI KABUPATEN JEPARA

NO.	KECAMATAN	LUAS (HA)	LUAS (KM ²)	%TASE
1.	Kedung	4.306,281	43,063	4,29
2.	Pecangaan	3.539,896	35,399	3,53
3.	Kalinyamatan	2.417,910	24,179	2,41
4.	Welahan	2.764,205	27,642	2,75
5.	Mayong	6.504,268	65,043	6,48
6.	Nalu msari	5.696,538	56,965	5,67
7.	Batealit	8.887,865	88,879	8,85
8.	Tahunan	3.890,581	38,906	3,87
9.	Jepara	2.466,700	24,667	2,46
10.	Mlonggo	10.295,516	102,955	10,25
11.	Bangsri	8.535,241	85,352	8,50
12.	Kembang	10.812,384	108,124	10,77
13.	Keling	23.175,804	231,758	23,08
14.	Karimunjawa	7.120,000	71,200	7,09
JUMLAH		100.413,189	1.004,132	100,00

Sumber : Jepara Dalam Angka Tahun, 2007

Batas geografis wilayah Kabupaten Jepara di bagian Barat dan sebelah Utara dibatasi oleh laut dengan garis pantai sepanjang 72 km. Sedangkan di bagian Timur dibatasi Gunung Muria. Kondisi ini menyebabkan ketinggian permukaan wilayah Kabupaten Jepara berbeda-beda antara 0-1.301 m dari permukaan laut. Adapun struktur penggunaan lahan di Kabupaten Jepara untuk permukiman sebesar 31,31%; sawah sebesar 26,3%; tegalan sebesar 18,23%; kebun sebesar 1,53%; hutan negara sebesar 17,49%; perkebunan sebesar 3,94%; dan tambak sebesar 1,2% (diagram dapat dilihat pada Gambar 3.1).



Sumber: Jepara Dalam Angka, 2007

GAMBAR 3.1
DIAGRAM PENGGUNAAN LAHAN
DI KABUPATEN JEPARA

3.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan

ruang daerah dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertahanan dan keamanan di wilayah Kabupaten Jepara. Penataan ruang daerah Kabupaten Jepara diarahkan untuk mewujudkan, keterkaitan dan keseimbangan antara wilayah serta keserasian antar sektor dalam meningkatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

- a. Kawasan perlindungan terhadap kawasan disekitarnya/dibawahnya untuk mencegah terjadinya bencana dan menjaga kelestarian kawasan, meliputi: kawasan hutan lindung yang berfungsi sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah (Kecamatan Mayong, Batealit, Mlonggo dan Bangsri); kawasan resapan air diperuntukkan bagi tanaman yang mampu menyimpan air tanah sebagai cadangan air bagi kawasan di bawahnya, meliputi wilayah Kecamatan Keling, Bangsri, Mlonggo, Batealit, Mayong dan Nalumsari.
- b. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan pantai yaitu sepanjang tepian yang bertujuan melindungi pantai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu ekosistem yang ada, meliputi sepanjang pantai yang terdapat di Kecamatan Kedung, Jepara, Mlonggo, Bangsri dan Keling; kawasan sempadan sungai yaitu kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Kawasan ini terdapat dilokasi sempadan dengan jarak 100 m meliputi Kali Bakalan dan Kali Pecangaan, untuk jarak 50 m meliputi Kali Kaweden, Troso,

Sirahan, Mlonggo, Kancilan, Balong, Gelis, Pasokan, Tunggul, Mayong, Sengon, Kedung, Bule, Tuk Abul, Bapangan, Kembang Rawi, Jeruk, Wangkong, Blitar, Wareng dan Suru.

- c. Kawasan suaka cagar alam dan cagar budaya meliputi kawasan suaka alam laut perairan lainnya yang meliputi wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan keunikan ekosistem, dengan lokasi di Kecamatan Karimunjawa; kawasan cagar budaya yaitu kawasan yang mempunyai nilai penting bagi sejarah dan budaya, berupa peninggalan sejarah yang berguna bagi pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan, lokasi di Kecamatan Jepara yaitu Makam Ratu Kalinyamat dan Masjid Mantingan, Benteng VOC sedangkan di Kecamatan Keling adalah Benteng Portugis.
- d. Kawasan Rawan Bencana Alam yaitu wilayah yang sering mengalami atau berpotensi terjadi bencana alam. Pada kawasan ini perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana alam tersebut, yang sering terjadi bencana longsor meliputi Desa Bategede Kecamatan Nalumsari dan Desa Bungu Kecamatan Mayong. Lokasi rawan banjir meliputi Desa Batukali Kecamatan Kalinyamatan, Desa Dorang Kecamatan Mayong, Desa Ketileng Singolelo Kecamatan Welahan. Rawan abrasi pantai meliputi Desa Bulak dan Tanggultlare Kecamatan Kedung, Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan, dan desa Bandungharjo Kecamatan Keling.

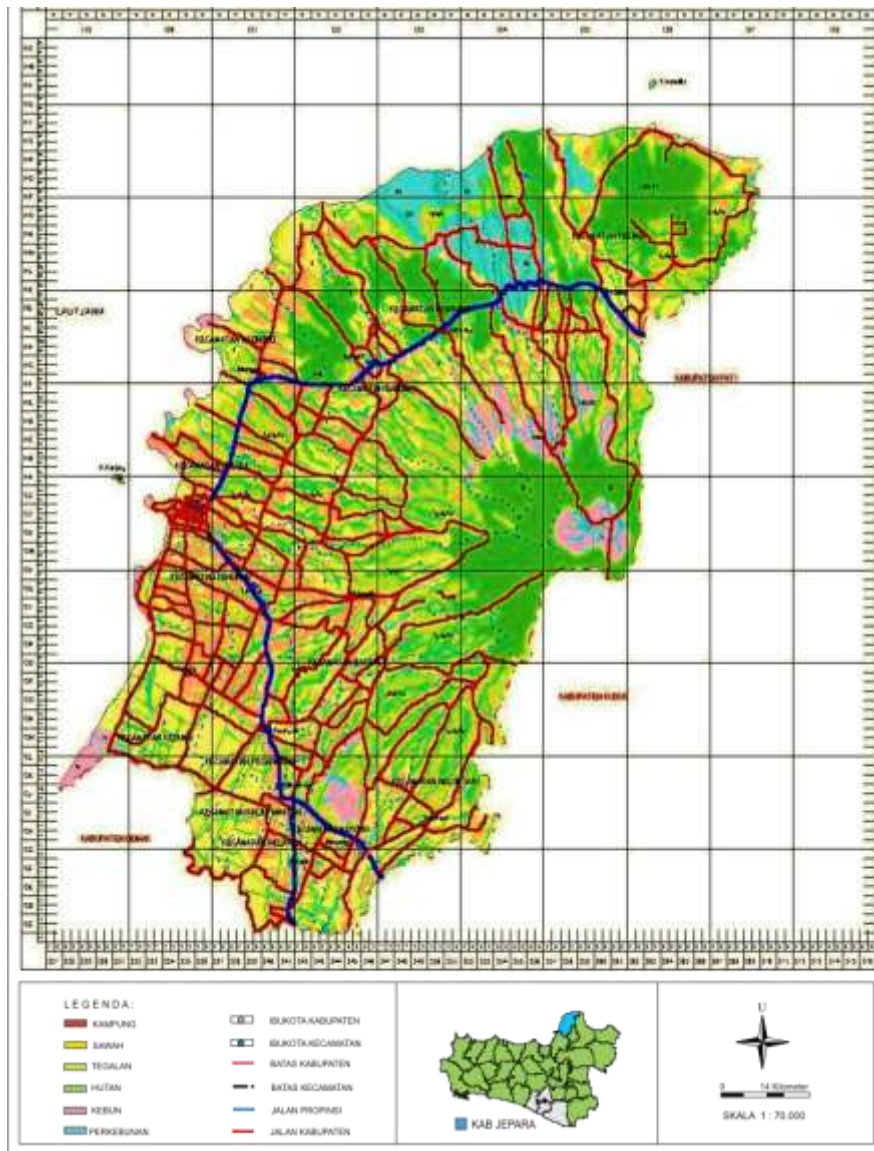
- e. Kawasan Budidaya, yaitu kawasan lindung yang kondisi fisik dan potensi sumber daya alamnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan produksi maupun pemenuhan kebutuhan permukiman, meliputi kawasan tanaman pangan lahan basah dengan pengairan alamiah/teknis meliputi Kecamatan Kedung, Jepara, Tahunan, Pecangaan, Welahan, Mayong, Nalumsari, Mlonggo, Keling dan Batealit. Kawasan tanaman pangan lahan kering yaitu untuk tanaman palawija, hortikultura atau tanaman pangan, lokasi ada di Kecamatan Jepara, Tahunan Pecangaan dan Mayong. Kawasan pertanian tanaman tahunan atau perkebunan yaitu kawasan yang menghasilkan bahan pangan maupun bahan baku industri yang meliputi Kecamatan Nalumsari, Mayong, Kalinyamatan, Pecangaan, Batealit, Tahunan, Jepara, Mlonggo, Bangsri, Keling. Kawasan hutan produksi yang diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas yang eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih dan panen lokasi meliputi Kecamatan Keling, Bangsri, Mlonggo, Batealit dan Mayong. Kawasan perikanan yang bertujuan untuk pengembangbiakan perikanan, meliputi Kecamatan Kedung, Jepara, Mlonggo, Bangsri dan Keling. Kawasan Peternakan tersebar diseluruh wilayah Jepara. Perindustrian dengan sentra–sentra industri meliputi kerajinan mebel dan ukir ada di Kecamatan Jepara dan Tahunan; Tenun Troso ada di kecamatan Pecangaan; monel, emas, rokok ada di Kecamatan Kalinyamatan; rotan dan batu bata ada di Kecamatan Welahan.

- f. Kawasan Pariwisata, terdapat di Kecamatan Jepara meliputi Museum RA. Kartini, Pendopo Kabupaten, Pantai Kartini, Pantai Tirta Samudra, Benteng VOC, Makam dan Masjid Mantingan dan Pulau Panjang; Taman Setro di kecamatan Batealit; Air Terjun Songgolangit di Kecamatan Kembang; Benteng Portugis, Goa Tritip dan Pemandian Sonder di Kecamatan Keling; Monumen Ari-ari RA. Kartini di Kecamatan Mayong; Wana Wisata Sreni Indah Kecamatan Nalumsari; dan Taman Nasional Laut di Karimunjawa.
- g. Kawasan Permukiman yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi permukiman atau tempat hunian dengan berbagai fasilitas sosialnya.

Adapun peta penggunaan lahan di Kabupaten Jepara dapat dilihat pada Gambar 3.2.

3.3 Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Pesisir

Kawasan wisata Pantai Kartini yang berada di Kecamatan Jepara merupakan pusat pengembangan pariwisata di Kabupaten Jepara dan termasuk dalam wilayah perkotaan. Dalam skenario pengembangan wilayah perkotaan berperan sebagai wilayah pendukung pusat pengembangan utama Kota Jepara yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, industri, perdagangan dan jasa serta pariwisata.



Sumber: Bappeda Kabupaten Jepara, 2008

GAMBAR 3.2
PETA TATA GUNA LAHAN KABUPATEN JEPARA

Wilayah perkotaan terhadap wilayah Kabupaten berperan sebagai kota pusat pengembangan pada sub-Wilayah

Pembangunan (SWP) I, yang meliputi wilayah Kecamatan Jepara, Batealit, dengan potensi kegiatan yang meliputi industri, pertanian, perikanan, perdagangan, jasa, dan pariwisata, sebagai Hirarki I (Kota/Pusat pelayanan I) dalam sistem perkotaan dan sistem pelayanan di wilayah Kabupaten Jepara sebagai pusat kota untuk wilayah daerah Kabupaten Jepara. Wilayah Kecamatan Jepara dan Tahunan, berperan sebagai kota pusat Kecamatan. Peran yang diemban Kota Jepara sebagai pusat administrasi Daerah kabupaten Jepara adalah: (1) Sebagai wilayah pusat pengembangan permukiman untuk mendukung pengembangan Kabupaten Jepara; (2) Sebagai kota pusat kerajinan ukiran dan industri mebel kayu, untuk skala regional Provinsi Jawa Tengah, dan nasional; (3) Sebagai kota pusat pelayanan perdagangan dan jasa untuk wilayah Kabupaten Jepara; (4) Sebagai kota pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, dan jasa-jasa pelayanan sosial lainnya untuk wilayah Kabupaten Jepara; (5) Sebagai kota administrasi pemerintahan untuk wilayah Kecamatan Jepara dan Tahunan; dan (6) Sebagai kota pengembangan kegiatan pariwisata, khususnya untuk mendukung pengembangan Kawasan Kepulauan Karimunjawa.

Penataan ruang wilayah pesisir merupakan penjabaran dari Tata Ruang Daerah Kabupaten Jepara dan Tata ruang Kota Jepara ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah pesisir di Kabupaten Jepara. Kebijakan penataan ruang wilayah pesisir tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pantai Kecamatan Jepara yang meliputi kawasan lindung sempadan pantai dan kawasan budidaya.

3.3.1 Kawasan Sempadan Pantai

Kawasan perlindungan sempadan pantai meliputi daratan sepanjang tepian yang panjangnya proporsional dengan bentuk dan kondisi pantai, lebar garis sempadan ini adalah 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Tujuan perlindungan kawasan ini adalah melindungi pantai dari kegiatan budidaya yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Penetapan kawasan lindung sempadan pantai di kawasan pesisir dan pantai meliputi seluruh kelurahan dan desa yang memiliki wilayah pantai. Arahan perlindungan kawasan sempadan pantai di wilayah pesisir dan pantai Kecamatan Jepara adalah:

- Pada kawasan ini tidak diperkenankan didirikan bangunan, permukiman, atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian ekologi pantai.
- Lahan-lahan sempadan pantai yang masih ditumbuhi tanaman mangrove ditetapkan sebagai kawasan perlindungan mangrove.
- Lahan-lahan kosong di kawasan sempadan pantai yang secara teknis memiliki kesesuaian untuk tanaman mangrove ditetapkan sebagai lahan pengembangan mangrove.
- Lahan-lahan kosong di kawasan sempadan pantai yang secara teknis tidak memiliki kesesuaian untuk tanaman mangrove ditetapkan sebagai lahan penghijauan pantai dengan jenis tanaman yang tahan terhadap air asin.
- Kegiatan yang masih diperkenankan adalah ke pelabuhan (baik pelabuhan samudra dan atau perikanan) dan kegiatan kepariwisataan yang terkait dengan pantai dan laut.

- Kegiatan yang saat ini seperti industri, permukiman dan kegiatan budidaya lainnya yang dapat mengganggu kelestarian ekologi pantai, secara bertahap perlu dipindahkan ke kawasan yang lebih layak dengan proses ganti rugi yang mengikuti kaidah-kaidah kepemilikan lahan.

3.3.2 Kawasan Budidaya

Dalam Rencana Tata Ruang Pesisir dan Pantai tersebut, pengembangan kawasan budidaya di kawasan pesisir Kecamatan Jepara sebagian besar merupakan kawasan yang dikembangkan dengan intensif menjadi bagian perkembangan kawasan perkotaan Jepara. Secara umum pengembangan tersebut berorientasi pada optimalisasi sumber daya dan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam Rencana Tata Guna Lahan Wilayah Pesisir Kecamatan Jepara diatas, terdapat fungsi-fungsi kawasan budidaya di wilayah pesisir Kecamatan Jepara. Jenis fungsi-fungsi kawasan budidaya terdiri atas: Kawasan Permukiman; Kawasan Perdagangan dan Jasa; Kawasan Industri; Kawasan Tambak dan Budidaya Air Payau; Kawasan Hijau Kota; Kawasan Pertanian; dan Kawasan Wisata. Sedangkan kawasan wisata yang dikembangkan adalah kawasan wisata Pantai Kartini (Pulau panjang) dan Pantai Bandengan, kawasan wisata ini sekaligus dimanfaatkan untuk mendukung fungsi lindung sempadan pantai. Adapun Peta Rencana Tata Guna Lahan Wilayah Pesisir



GAMBAR 3.3
PETA RENCANA TATA GUNA LAHAN WILAYAH
PESISIR KECAMATAN JEPARA

3.4 Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jepara

Dalam mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Jepara berpedoman pada pengembangan kepariwisataan yang telah dilakukan Provinsi Jawa Tengah yang dibagi menjadi 4 wilayah atau kawasan pengembangan kepariwisataan (Sub-Daerah Tujuan Wisata) yaitu:

1. Kawasan Merapi-Merbabu (Sub-DTW A) yang meliputi 16 daerah yaitu: Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo.
2. Kawasan Demak-Kudus-Jepara-Rembang (Sub-DTW B) yang meliputi 7 daerah yaitu: Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan.
3. Kawasan Pekalongan-Tegal (Sub-DTW C) yang meliputi 7 daerah yaitu: Kota Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Brebes.
4. Kawasan Cilacap-Banyumas (Sub-DTW D) yang meliputi 5 daerah yaitu: Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen.

Disamping itu sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, wilayah Kabupaten Jepara termasuk jalur

kawasan strategis WANARAKUTI (Juwana-Jepara-Kudus-Pati) yang rutenya melewati wilayah Kecamatan Keling dan Kecamatan Kembang. Jalur ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan wilayah pesisir Kabupaten Jepara dan Pati. Wilayah Kabupaten Jepara yang dibatasi oleh laut dengan garis pantai sepanjang 72 km, memiliki peranan sebagai kawasan strategis dalam pengembangan budidaya perikanan dan pariwisata bahari.

Kondisi geografis wilayah pesisir di Kabupaten Jepara dengan pantai pasir putih berbatu mempunyai nilai ekonomi dan banyak berkembang menjadi kawasan wisata bahari. Potensi wilayah pesisir yang dimiliki ini dikembangkan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan pariwisata bahari. Beberapa wilayah pesisir yang selama ini dikembangkan menjadi kawasan wisata bahari antara lain: Pantai Kartini di Kelurahan Bulu, Pulau Panjang di Kelurahan Ujungbatu, Benteng Portugis di Ujung Watu, Pantai Tirta Samudro di Desa Bandengan, dan Taman Wisata Nasional Karimunjawa.

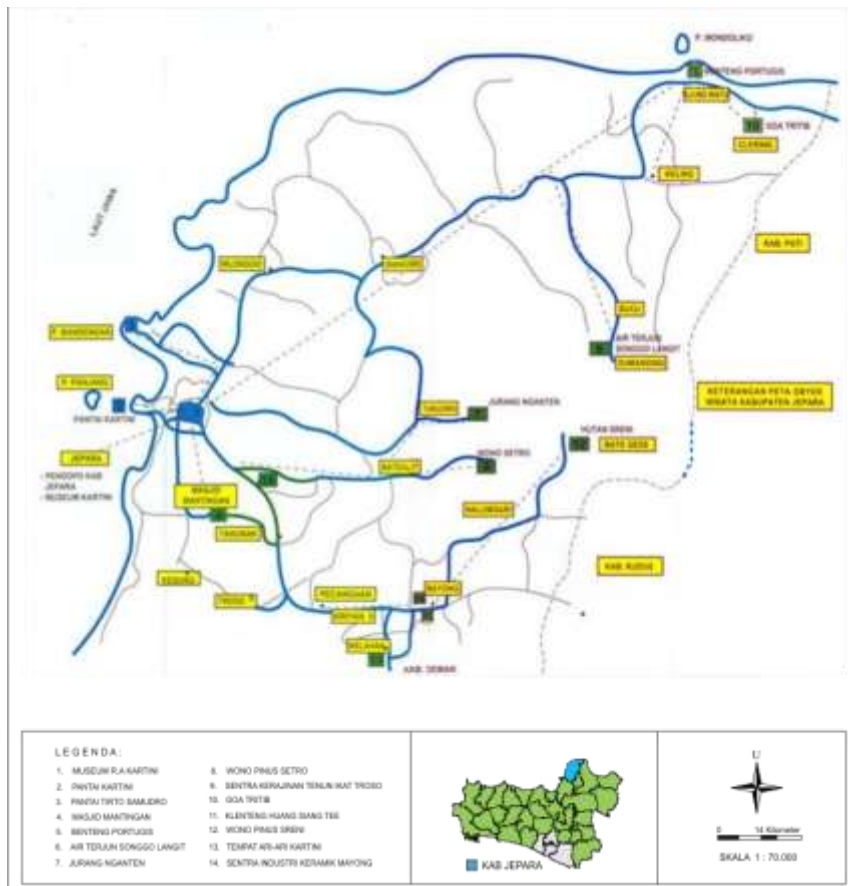
Selain pariwisata bahari di Kabupaten Jepara terdapat pula beberapa objek wisata yang dikunjungi oleh wisatawan. Tabel III.2 dibawah ini menunjukkan bahwa dari beberapa objek wisata yang terdapat di Kabupaten Jepara, Pantai Kartini merupakan objek wisata kedua yang banyak dikunjungi oleh wisatawan setelah objek wisata ziarah Makam dan Masjid Mantingan. Demikian pula Pantai Kartini merupakan objek wisata pantai yang paling banyak dikunjungi wisatawan dari pada objek wisata Pantai Tirta Samudra, Benteng Portugis dan Pulau Panjang.

TABEL III.2
JUMLAH WISATAWAN DI KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2007

NO.	NAMA OBJEK WISATA	LOKASI	JUMLAH
1.	Makam & Masjid Mantingan	Kec.Tahunan	378.150
2.	Pantai Kartini	Kec.Jepara	237.200
3.	Sonder Kalinyamat	Kec. Keling	103.100
4.	Pantai Tirta Samudra	Kec.Jepara	103.457
5.	Benteng Portugis	Kec.Keling	29.525
6.	Museum RA. Kartini	Kec.Jepara	12.700
7.	Pulau Panjang	Kec.Jepara	9.414
8.	Taman Nasional Laut Karimunjawa	Kec.Karimunjawa	7.340
9.	Air Terjun Songgo Langit	Kec.Kembang	2.910
10.	Monumen Ari-Ari RA. Kartini	Kec.Mayong	764

Sumber : Jepara Dalam Angka, 2007

Adapun lokasi pariwisata bahari dan objek wisata lainnya di Kabupaten Jepara ditunjukkan pada Gambar 3.4.



Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara, 2008

GAMBAR 3.4
PETA WISATA KABUPATEN JEPARA

3.5 Kebijakan Penataan Permukiman Pesisir

Permukiman nelayan banyak tumbuh di wilayah pesisir Kabupaten Jepara, Pemerintah Daerah mengambil kebijakan melalui rencana penataan permukiman pesisir. Adapun kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanganan permukiman pesisir di kawasan wisata Pantai Kartini yang selama ini diambil adalah:

1. Pemberian ijin pengalihan status lahan milik negara yang di tempati masyarakat di kawasan wisata Pantai Kartini menjadi hak milik (sertifikat hak milik)
2. Pemerintah Daerah tidak melakukan relokasi (pemindahan) atau permukiman kembali (*resettlement*) terhadap permukiman masyarakat di Pantai Kartini.
3. Dalam mengembangkan kawasan wisata Pantai Kartini, Pemerintah Daerah memilih opsi reklamasi untuk mengatasi lahan pengembangan kawasan wisata yang terbatas.
4. Peningkatan kualitas permukiman pesisir melalui pembangunan dan peningkatan prasarana lingkungan (jalan, penerangan, taman dan sebagainya); penyediaan air bersih; penyediaan sanitasi lingkungan; penyediaan tempat pembuangan sementara sampah; dan bantuan peningkatan kualitas hunian.
5. Hubungan yang terjalin antara Pemerintah Daerah selaku pemilik dan pengelola kawasan wisata Pantai Kartini dengan masyarakat di kawasan wisata bersifat saling menguntungkan (simbiosis mutualisme).
6. Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka usaha lahan milik masyarakat.
7. Pemerintah Daerah memberikan bantuan tempat usaha bagi masyarakat yang tidak memiliki tempat usaha sendiri dengan cara menyewa kepada pengelola.
8. Masyarakat yang tinggal di kawasan wisata ikut menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan baik kepada pengunjung maupun kawasan wisata Pantai Kartini.

BAB IV

ANALISIS DAMPAK PERKEMBANGAN KAWASAN WISATA PANTAI KARTINI DAN PERUBAHAN FUNGSI PERMUKIMAN PESISIR

Pada bab ini dijelaskan analisis deskriptif dampak perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini terhadap masyarakat setempat dan perubahan fungsi permukiman pesisir dengan memberikan gambaran secara kualitatif berdasarkan perhitungan nilai rata-rata, skor terendah dan tertinggi. Kemudian dilakukan pembahasan kecenderungan dari variabel penelitian berdasarkan hasil tabulasi silang dan pengujian hipotesis.

4.1 Analisis Perkembangan Kawasan Wisata Pantai Kartini

Pantai Kartini tidak lepas dari sejarah kehidupan pribadi tokoh emansipasi wanita R.A Kartini. Pantai Kartini jaraknya tidak jauh dari rumah kediaman R.A Kartini terletak 2,5 km ke arah barat dari Pendopo Kabupaten Jepara dimana beliau dibesarkan. Di pantai ini dahulu menjadi daerah tujuan wisata bagi keluarga/kerabat dekat Bupati Jepara termasuk R.A Kartini pada masa kecilnya. Akhirnya sebagai ungkapan penghargaan dan untuk mengingat kebesaran perjuangan R.A Kartini maka pantai tersebut dinamakan “Pantai Kartini” (sumber: <http://www.gojepara.com>).

Kawasan wisata Pantai Kartini merupakan objek wisata alam laut dengan pantai pasir putih dan pemandangan *sunset*.

Perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini sekitar tahun 1980 dimulai dari perluasan kawasan kearah selatan reklamasi laut, bagian barat melintasi permukiman dan utara tambak milik BBPBAP dengan luas lahan ditempati 3,5 ha (tampak pada Gambar 4.1).



Sumber: Hasil Observasi Penulis, 2008

GAMBAR 4.1
PETA PERKEMBANGAN KAWASAN WISATA
PANTAI KARTINI

Dari Gambar 4.1 tampak kawasan wisata Pantai Kartini sudah mengalami tiga tahap perluasan dan selanjutnya

menghadapi kendala keterbatasan lahan milik masyarakat.

Daya tarik wisata alam kawasan wisata Pantai Kartini adalah pemandangan laut dan pantai dengan pasir putih, sebagaimana dijelaskan Yoeti (1985:160-180) bahwa hal-hal yang dapat menarik orang untuk berkunjung ke suatu tempat tujuan wisata diantaranya adalah benda-benda yang tersedia dan terdapat di alam semesta, yang disebut sebagai *natural amenities*.

Perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini sebagai daerah tujuan wisata (destinasi) harus menyediakan berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan agar tujuan kunjungan seorang wisatawan dapat terpenuhi (Pitana dan Gayatri 2007: 101). Untuk menarik wisatawan di Pantai Kartini juga telah dibangun beberapa atraksi buatan yang dinyatakan Yoeti (1985:160-180) sebagai hasil ciptaan manusia (*man made supply*). Beberapa atraksi buatan yang dibangun berupa akuarium laut dengan bentuk Kura-Kura (tampak pada Gambar 4.2).



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008

GAMBAR 4.2
AKUARIUM KURA-KURA SEBAGAI IKON
KAWASAN WISATA PANTAI KARTINI

Selain itu juga dibangun arena permainan anak-anak, sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 4.3 dan Gambar 4.4.



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008

**GAMBAR 4.3
PERMAINAN ANAK-ANAK KOMEDI PUTAR**



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008

**GAMBAR 4.4
PERMAINAN ANAK-ANAK MANDI BOLA**

Selanjutnya dibangun *gazebo* guna melepaskan lelah dengan terpaan angin laut dan menikmati panorama laut lepas, yang tampak pada Gambar 4.5 dibawah ini:



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008

GAMBAR 4.5 **GAZEBO UNTUK MENIKMATI PANORAMA LAUT**

Demikian pula kawasan wisata Pantai Kartini merupakan kawasan strategis, karena lokasinya berada di Kota Jepara sebagai pusat pemerintahan dan terdapat dermaga penyeberangan sebagai jalur transportasi laut menuju objek wisata Taman Laut Nasional Karimunjawa (diperlihatkan pada Gambar 4.6).



Sumber: Dokumentasi Penulis2008

GAMBAR 4.6 **PEMANDANGAN LAUT DAN DERMAGA** **PENYEBERANGAN MENUJU TAMAN LAUT** **NASIONAL KARIMUNJAWA**

Adapun lebih terperinci jumlah atraksi buatan dan fasilitas penunjang bagi wisatawan yang dibangun pemerintah daerah selaku pemilik dan pengelola kawasan wisata Pantai Kartini ditunjukkan pada Tabel IV.1.

TABEL IV.1
OBJEK DAYA TARIK WISATA DI PANTAI KARTINI

No	Nama Objek	Jumlah
Objek dan Daya Tarik Wisata:		
1.	Arena Main Bola	1
2.	Komidi Putar	1
3.	Perahu Arus	1
4.	Panggung Hiburan	1
5.	Taman dan Arena Mainan Anak	3
Fasilitas Wisata:		
6.	Rumah makan	50
7.	Kios Souvenir	25
8.	Mushollla	1
9.	Toilet	5

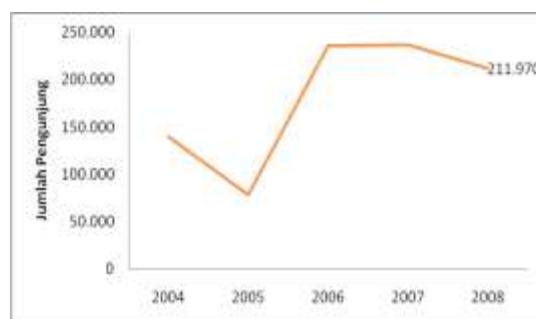
Sumber: Statistik Kepariwisataaan Kabupaten Jepara, 2008

Tabel VI.1 diatas menunjukkan telah dibangun dan disediakan beberapa atraksi wisata buatan dan fasilitas pendukung wisata. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990) dinyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan pendukung pariwisata, di kawasan wisata berbagai fasilitas yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata. Namun di kawasan wisata Pantai Kartini tidak tersedia fasilitas-fasilitas pendukung sebagai sarana pelengkap yang memberikan

kenyamanan bagi wisatawan seperti pusat informasi wisata (*torism information centre*) dan penginapan (*home stays*).

Selain wisata alam dan atraksi buatan diatas menurut Yoeti (1985:160-180) hal-hal yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung adalah tata cara hidup masyarakat yang merupakan tata cara hidup tradisional dari suatu masyarakat. Kebiasaan hidup dan adat istiadat masyarakat ini sebagai daya tarik bagi wisatawan di suatu daerah. Setiap tahun di kawasan wisata Pantai Kartini diselenggarakan wisata budaya tradisional yang disebut “Pesta Lomban” yang berlangsung pada tanggal 8 Syawal atau seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri.

Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata Pantai Kartini selama kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2004 sampai 2008 menunjukkan terjadinya kenaikan jumlah pengunjung (grafik jumlah pengunjung periode tahun 2004-2008 dapat dilihat pada Gambar 4.7).



Sumber: Statistik Kepariwisataaan Kabupaten Jepara, 2008

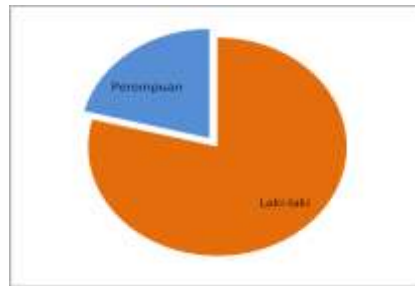
GAMBAR 4.7
GRAFIK KUNJUNGAN WISATAWAN DI
PANTAI KARTINI PERIODE TAHUN 2004-2008

Gambar 4.7 diatas menunjukkan adanya fluktuasi kenaikan dan penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Pada tahun 2004 jumlah kunjungan wisatawan di Pantai Kartini sebanyak 140.256 orang; tahun 2005 sebanyak 78.285 orang dimana terjadi penurunan sebesar 44%. Adapun tahun 2006 kunjungan wisatawan mencapai 236.264 orang secara signifikan terjadi kenaikan 201,8%. Berikutnya pada tahun 2007 jumlah pengunjung 237.200 orang juga mengalami kenaikan sebesar 0,4%. Pada tahun 2008 terjadi penurunan sebesar 10,6% dengan jumlah kunjungan wisatawan hanya mencapai 211.970 orang.

Kemudian di kawasan wisata Pantai Kartini terdapat permukiman masyarakat pesisir. Keberadaan masyarakat pesisir di Pantai Kartini dahulu tinggal di sebuah pulau yang banyak ditumbuhi rimbunan tanaman kelor terkenal dengan sebutan Pulau Kelor. Pada saat itu pulau Kelor masih terpisah dengan daratan di Jepara. Pulau Kelor dahulu dihuni oleh seorang Melayu bernama Encik Lanang. Atas jasanya membantu Belanda dalam perang Bali, beliau diberi hadiah Pulau Kelor. Oleh karena proses sedimentasi, maka lama kelamaan antara pulau-pulau tersebut bersatu (sumber: <http://www.gojepara.com>). Perkembangan selanjutnya pulau Kelor tersebut menjadi permukiman yang ditempati masyarakat nelayan yang berjumlah sekitar 30 Kepala Keluarga. Ketika pada tahun 1971 ada pembangunan Balai Pengembangan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Departemen Pertanian di Pulau Kelor, permukiman masyarakat di Pulau Kelor di relokasi disebelah tenggara dekat dengan lokasi wisata Pantai Kartini dengan luas sekitar 1,5 ha.

Pada saat itu wilayah pesisir Pantai Kartini belum dikembangkan menjadi kawasan wisata dan masih merupakan tempat wisata milik umum (*common property*) yang alami dan letaknya terpencil (jauh) dari wilayah di sekitarnya. Dengan perluasan lahan kawasan wisata Pantai Kartini dan kebutuhan privatisasi kawasan wisata, permukiman masyarakat masuk dalam kawasan wisata. Hal ini menyebabkan aksesibilitas masyarakat melewati pintu masuk kawasan wisata. Demikian pula secara ekonomi dan sosial serta lingkungan fisik permukiman bersentuhan langsung dengan kegiatan pariwisata.

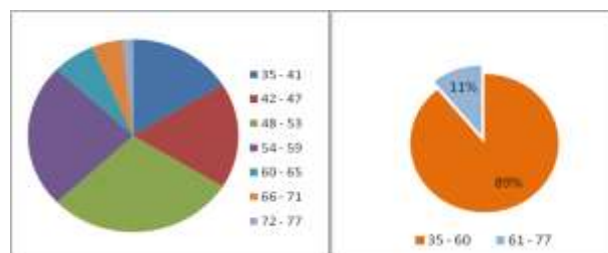
Dari kepala keluarga yang berjumlah 30 tersebut, sekarang ini masyarakat yang tinggal di kawasan wisata Pantai Kartini berkembang menjadi sebanyak 85 Kepala Keluarga. Berdasarkan responden penelitian sebanyak 62 kepala rumah tangga yang tinggal di kawasan wisata Pantai Kartini diketahui bahwa kepala rumah tangga laki-laki mempunyai peranan sebagai kepala rumah tangga sebanyak 79,0%. Peranan laki-laki yang bertugas mencari nafkah menjadikan laki-laki diposisikan sebagai orang paling dominan menjadi kepala rumah tangga. Sedangkan terjadinya perubahan struktur dalam keluarga karena tidak adanya laki-laki yang dominan, perempuan menggantikan posisi laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Data penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 21,0% perempuan berperan sebagai kepala rumah tangga (ditunjukkan pada Gambar 4.8).



Sumber: Hasil Analisis, 2009

GAMBAR 4.8
DIAGRAM JENIS KELAMIN RESPONDEN

Berdasarkan usia, distribusi data usia responden menunjukkan bahwa usia 35-41 tahun sebanyak 16,1%; usia 42-47 tahun sebanyak 17,7%; usia 48-53 tahun sebanyak 29,0%; usia 54-59 tahun sebanyak 24,2%; usia 60-65 tahun sebanyak 6,5%; usia 66-71 sebanyak 4,8%; dan usia 72-77 tahun sebanyak 1,6% (pada Gambar 4.9).



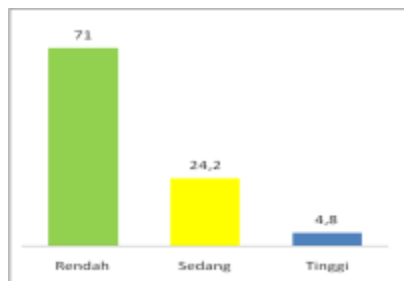
Sumber: Hasil Analisis, 2009

GAMBAR 4.9
DIAGRAM USIA RESPONDEN

Pada Gambar 4.9 diketahui bahwa masyarakat pesisir di kawasan wisata Pantai Kartini sebagian besar tergolong produktif

berusia 35–60 tahun sebanyak 89%.

Data pendidikan responden menunjukkan tingkat pendidikan rendah sebanyak 71,0%; berpendidikan sedang sebanyak 24,2%; dan tingkat pendidikan tinggi sebanyak 4,8% (diagram dapat dilihat pada Gambar 4.10).



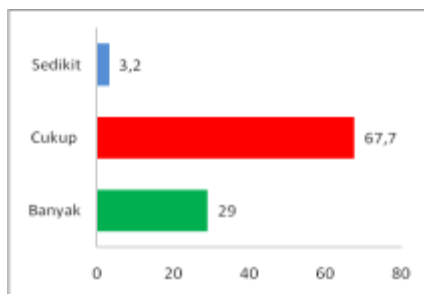
Sumber: Hasil Analisis, 2009

GAMBAR 4.10
DIAGRAM TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN

Gambar 4.10 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat pesisir sebagian besar masih rendah sampai tamat SMP. Tingkat pendidikan masyarakat pesisir ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Dahuri, et. al. (1996: 285) bahwa pendidikan dan pengetahuan masyarakat pesisir umumnya rendah.

Dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang sebagian besar masih rendah ini banyak masyarakat bekerja sektor informal yang tidak menuntut pendidikan dan ketrampilan tertentu termasuk pekerjaan sektor pariwisata. Berdasarkan data penelitian diketahui bahwa masyarakat pesisir cukup banyak bekerja di kawasan wisata sebanyak 67,7%; banyak bekerja di

kawasan wisata sebanyak 29,0% dan sedikit bekerja di kawasan wisata sebanyak 3,2% (diagram tampak pada Gambar 4.11).

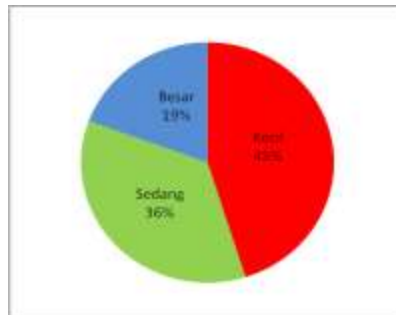


Sumber: Hasil Analisis, 2009

GAMBAR 4.11
DIAGRAM MASYARAKAT BEKERJA
DI KAWASAN WISATA PANTAI KARTINI

Gambar 4.11 menunjukkan bahwa masyarakat pesisir rata-rata bekerja di kawasan wisata, seperti dinyatakan oleh David C. Mc Cleland bahwa kesempatan kerja dan pekerjaan yang timbul dari pariwisata tidak memerlukan pendidikan dan ketrampilan (Erawan, 1987:47 dalam Tashadi, Ed., 1994).

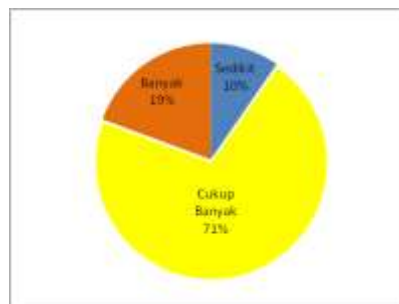
Kemudian struktur rumah tangga sebagian besar termasuk dalam keluarga kecil yang terdiri dari unsur ayah, ibu dan anak-anak. Distribusi data jumlah anggota rumah tangga menunjukkan bahwa struktur rumah tangga kecil sebanyak 45,2%; rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga sedang sebanyak 33,9%; dan rumah tangga dengan jumlah tanggungan besar sebanyak 19,4% (diagram jumlah anggota rumah tangga pada Gambar 4.12).



Sumber: Hasil Analisis, 2009

GAMBAR 4.12
DIAGRAM JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA
RESPONDEN

Dari jumlah anggota rumah tangga sebagian besar yang bekerja cukup banyak 71,0%, banyak 19,4%, dan sedikit 9,7% (diagram dapat dilihat pada Gambar 4.13).



Sumber: Hasil Analisis, 2009

GAMBAR 4.13
DIAGRAM JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA
BEKERJA

Perkembangan kawasan wisata menjadikan masyarakat pesisir di kawasan wisata Pantai Kartini yang menjadi pelaku

ekonomi yang secara langsung bersentuhan dengan kegiatan pariwisata sehingga menimbulkan berbagai dampak, seperti yang dinyatakan oleh Pitana dan Gayatri (2005:109) bahwa pariwisata suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh masyarakat membawa berbagai dampak terhadap masyarakat dan daerah tujuan wisata, yaitu: dampak terhadap sosial ekonomi, dampak terhadap sosial budaya dan dampak terhadap lingkungan fisik.

4.2 Analisis Dampak Ekonomi Perkembangan Kawasan Wisata Pantai Kartini

Dampak perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini dari ekonomi adalah kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan kenaikan harga lahan di daerah tujuan wisata.

4.2.1 Dampak Terhadap Kesempatan Kerja

Masyarakat yang tinggal di kawasan wisata Pantai Kartini memiliki mata pencaharian tidak hanya sebagai nelayan akan tetapi juga pekerjaan yang berkaitan dengan pariwisata. Data penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di kawasan wisata Pantai Kartini memiliki jenis pekerjaan/mata pencaharian beragam. Adapun jenis pekerjaan/mata pencaharian utama kepala rumah tangga di kawasan wisata Pantai Kartini sebagai PNS/TNI/Polri/pensiunan sebanyak 40,3%; pedagang/bakulan sebanyak 21,0%; nelayan sebanyak 14,5%; wiraswasta/pengusaha sebanyak 9,7%; perahu wisata sebanyak 9,7%; pekerjaan lainnya sebanyak 3,2%; dan sebagai

karyawan/pegawai swasta sebanyak 1,6% (diagram jenis pekerjaan responden diperlihatkan pada Gambar 4.14).



Sumber: Hasil Analisis, 2009

GAMBAR 4.14
DIAGRAM JENIS PEKERJAAN RESPONDEN

Untuk menguji keberagaman jenis pekerjaan ini sebagai dampak perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini terhadap kesempatan kerja dilakukan analisis hubungan antara jenis pekerjaan/mata pencaharian utama responden dengan kategori pekerjaan sesuai kondisi wilayah penelitian yaitu sektor perikanan, pariwisata dan lainnya. Distribusi data menggunakan tabulasi silang didapatkan hasil pekerjaan utama kepala rumah tangga sebagai PNS/TNI/Pori/Pensiunan sebanyak 40,3%, dari kategori pekerjaan ini sebanyak 38,7% merupakan sektor lainnya, dan hanya sebanyak 1,6 yang merupakan sektor pariwisata. Pekerjaan responden sebagai pedagang/bakulan sebanyak 21,0%; dari klasifikasi pekerjaan ini sektor pariwisata sebanyak 14,5%; sektor perikanan sebanyak 4,8%; dan sektor lainnya sebanyak 1,6% (pada Tabel IV.2).

TABEL IV.2
TABULASI SILANG ANTARA JENIS PEKERJAAN
DENGAN KATEGORI PEKERJAAN

		Kategori Pekerjaan			Total
		Sektor Perikanan	Sektor Pariwisata	Sektor lainnya	
Jenis Pekerjaan/Mata Pencaharian	PNS/TNI/Polri/ Pensiunan	0 .0%	1 1.6%	24 38.7%	25 40.3%
	Karyawan/ Pegawai swasta	0 .0%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%
	Wiraswasta/ Pengusaha	1 1.6%	4 6.5%	1 1.6%	6 9.7%
	Pedagang/ Bakul an	3 4.8%	9 14.5%	1 1.6%	13 21.0%
	Nelayan	9 14.5%	0 .0%	0 .0%	9 14.5%
	Perahu Wisata	0 .0%	6 9.7%	0 .0%	6 9.7%
	Lainnya	0 .0%	0 .0%	2 3.2%	2 3.2%
Total		13 21.0%	20 32.3%	29 46.8%	62 100.0%

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Dari Tabel IV.2 diatas juga diketahui bahwa pekerjaan responden sebagai nelayan sebanyak 14,5%, dari klasifikasi pekerjaan merupakan sektor perikanan. Berprofesi sebagai wiraswasta/pengusaha sebanyak 9,7%, dari kategori pekerjaan ini sektor pariwisata sebanyak 6,5%; sektor perikanan sebanyak 1,6%; dan sektor lainnya sebanyak 1,6%. Responden bekerja sebagai penarik perahu wisata sebanyak 9,7%, dari klasifikasi pekerjaan ini adalah sektor pariwisata. Adapun yang memiliki pekerjaan lainnya sebanyak 3,2% yang merupakan klasifikasi

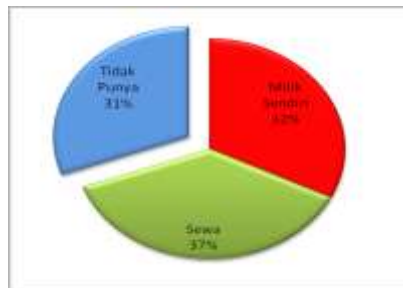
pekerjaan lainnya. Demikian pula pekerjaan sebagai karyawan/pegawai swasta sebanyak 1,6% adalah pekerjaan diluar sektor perikanan dan sektor pariwisata.

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan Chi-Kuadrat diperoleh hasil nilai *Pearson Chi-Square* = 87,518 > 21,026; dk = 12; dan *Asymp. Sig* = 0,000 < 0,05, maka hipotesis nol (H_0) ditolak. Dimana dari beberapa jenis pekerjaan/mata pencaharian masyarakat di kawasan wisata memiliki kecenderungan berbeda secara nyata dan signifikan sebesar 0,765 termasuk kategori sektor pariwisata.

Masyarakat pesisir sebelumnya secara ekonomi memiliki mata pencaharian tradisional dengan kegiatan utama di dominasi oleh usaha perikanan dengan ketrampilan yang dimiliki penduduk umumnya terbatas pada masalah penangkapan ikan sehingga kurang mendukung diversifikasi kegiatan (Dahuri, et, al., 1996: 285). Dengan perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini berdampak terhadap kesempatan kerja, dimana masyarakat pesisir memiliki sumber-sumber mata pencaharian baru sektor pariwisata (deversifikasi usaha). Hasil penelitian ini seperti yang dinyatakan oleh De Kadt (1979:11 dalam Tashadi, Ed., 1994), bahwa dampak pariwisata dari ekonomi adalah terciptanya kesempatan kerja yang berarti mengurangi jumlah pengangguran.

Adapun sumber-sumber mata pencaharian baru sektor pariwisata adalah pedagang/bakulan, industri dan penjual *souvenir* dari limbah laut, penarik perahu wisata, usaha toilet/mandi bilas dan usaha penginapan. Pekerjaan sektor pariwisata paling banyak dari dampak perkembangan kawasan

wisata Pantai Kartini adalah kesempatan kerja sebagai pedagang/bakulan sebanyak 14,5%. Kemudian dalam berusaha ini, kepemilikan tempat usaha lebih banyak sewa kepada pengelola dengan tarif setiap bulan Rp. 25.000,- per kios (diagram kepemilikan usaha tampak pada Gambar 4.15).



Sumber: Hasil Analisis, 2009

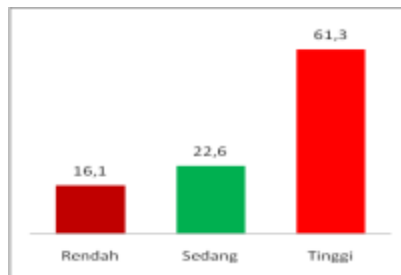
GAMBAR 4.15
DIAGRAM KEPEMILIKAN USAHA DI
KAWASAN WISATA PANTAI KARTINI

Gambar 4.15 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki tempat usaha di kawasan wisata. Adapun kepemilikan tempat usaha secara sewa sebanyak 37,1% dan milik sendiri sebanyak 32,3%. Selain itu terdapat masyarakat yang tidak punya tempat usaha sebanyak 30,6%.

4.2.2 Dampak Terhadap Tingkat Pendapatan

Berdasarkan distribusi data pendapatan responden diketahui bahwa pendapatan seluruh anggota rumah tangga rata-rata perbulan tinggi sebanyak 61,3%, pendapatan seluruh anggota rumah tangga rata-rata perbulan sedang sebanyak 22,6%, dan

pendapatan seluruh anggota rumah tangga rata-rata perbulan rendah sebanyak 16,1% (diagram tingkat pendapatan responden tampak pada Gambar 4.16).



Sumber: Hasil Analisis, 2009

GAMBAR 4.16
DIAGRAM TINGKAT PENDAPATAN RATA-RATA
RESPONDEN

Dari hasil analisis data tingkat pendapatan dapat diperoleh gambaran bahwa pendapatan rumah tangga di kawasan wisata perbulan rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,-. Berdasarkan angka tersebut, tingkat pendapatan masyarakat pesisir di Pantai Kartini tinggi, dimana jika rata-rata tiap keluarga berjumlah 5 orang, maka pendapatan perkapita perbulan adalah sebesar Rp. 300.000,-. Ditinjau dari ketentuan Badan Pusat Statistik (2002) yang menyebutkan bahwa Garis Fakir Miskin (GFM) di lihat dari pengeluaran sebesar Rp. 91.192,00,- perkapita perbulan atau GFM keluarga (5 jiwa) sebesar Rp. 460.960,- termasuk keluarga miskin (*detitute*), maka masyarakat yang tinggal di Pantai Kartini tidak tergolong miskin. Masyarakat pesisir di kawasan wisata Pantai Kartini dapat dikategorikan sebagai

keluarga maju yaitu keluarga yang memiliki pendapatan perkapita sama atau lebih besar dari 3 x Rp. 91.192,- = Rp.276.576,- perbulan atau sebesar 3 x Rp. 460.960,- = Rp.1.382.880,- perkeluarga perbulan.

Untuk menguji dampak perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini terhadap tingkat pendapatan masyarakat pesisir ini dilakukan analisis hubungan antara pendapatan seluruh anggota rumah tangga dengan pendapatan seluruh anggota rumah tangga dari bekerja di kawasan wisata. Berdasarkan distribusi data menggunakan tabulasi silang diperoleh hasil pada Tabel IV.3.

TABEL IV.3
TABULASI SILANG ANTARA PENDAPATAN RUMAH
TANGGA DENGAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA
DARI KAWASAN WISATA

		Pendapatan Rumah Tangga dari Kawasan Wisata				Total
		Tidak Ada	Rendah	Sedang	Tinggi	
Pendapatan Seluruh Anggota Rumah Tangga	Rendah	1	9	0	0	10
		1,6%	14,5%	,0%	,0%	16,1%
	Sedang	2	9	3	0	14
		3,2%	14,5%	4,8%	,0%	22,6%
	Tinggi	5	14	9	10	38
		8,1%	22,6%	14,5%	16,1%	61,3%
Total		8	32	12	10	62
		12,9%	51,6%	19,4%	16,1%	100,0%

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Tabel IV.3 diatas menunjukkan bahwa rumah tangga yang pendapatan seluruh anggota rata-rata perbulan tinggi sebanyak 61,3%, distribusi pendapatan tersebut yang diperoleh dari kawasan wisata rata-rata perbulan rendah sebanyak 22,6%; rata-rata perbulan tinggi sebanyak 16,1%; rata-rata perbulan sedang sebanyak 14,5%; dan tidak ada pendapatan dari kawasan wisata sebanyak 8,1%. Rumah tangga yang memiliki pendapatan rata-rata perbulan sedang sebanyak 22,6%, distribusi pendapatan seluruh anggota rumah tangga tersebut yang diperoleh dari kawasan wisata rata-rata perbulan rendah sebanyak 14,5%; rata-rata perbulan sedang 4,8%; dan tidak ada pendapatan dari kawasan wisata sebanyak 3,2%. Adapun rumah tangga yang memiliki pendapatan rata-rata perbulan rendah sebanyak 16,1%, distribusi pendapatan seluruh anggota tersebut yang diperoleh dari kawasan wisata rata-rata perbulan rendah sebanyak 14,5%; dan tidak ada pendapatan dari kawasan wisata sebanyak 1,6%.

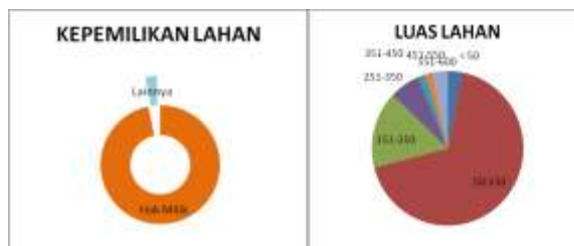
Pada pengujian hipotesis dua sampel diperoleh hasil nilai *Pearson Chi-Square* sebesar $= 13,635 > 12,591$; $dk = 6$; dan *Asymp. Sig* = $0,034 < 0,05$; maka hipotesis nol (H_0) ditolak. Dimana tingkat pendapatan tinggi rumah tangga memiliki kecenderungan signifikan sebesar 0,425 dipengaruhi tingginya tingkat pendapatan dari bekerja/berusaha di kawasan wisata.

Masyarakat pesisir yang pada awalnya memiliki pendapatan rendah dan masih berada pada garis kemiskinan (Lewaherilla, 2002), setelah perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini terjadi perubahan peningkatan pendapatan masyarakat pesisir. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang

dinyatakan oleh De Kadt (1979:11 dalam Tashadi, Ed., 1994) bahwa pariwisata dari ekonomi berdampak meningkatkan pendapatan dan standar hidup masyarakat. Demikian pula masyarakat pesisir yang tinggal di Pantai Kartini, kesejahteraannya meningkat yang termasuk keluarga maju dengan memiliki pendapatan rata-rata perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- perkeluarga perbulan. Pendapatan ini diatas ketentuan Badan Pusat Statistik (2002) sebesar Rp.1.382.880,- perkeluarga perbulan.

4.2.3 Dampak Terhadap Kenaikan Harga Lahan

Berdasarkan data kepemilikan lahan permukiman di kawasan wisata Pantai Kartini mayoritas merupakan hak milik sebanyak 96,8% dan kepemilikan lahan lainnya yaitu milik pemerintah dan sewa sebanyak 3,2% (diagram kepemilikan dan luas lahan dapat dilihat pada Gambar 4.17).

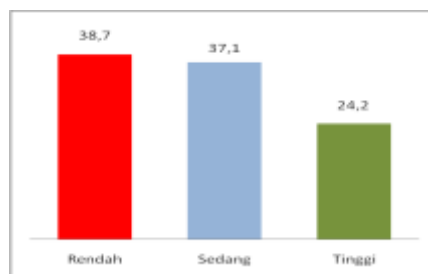


Sumber: Hasil Analisis, 2009

GAMBAR 4.17
DIAGRAM KEPEMILIKAN DAN LUAS LAHAN
PERMUKIMAN

Pada Gambar 4.17 dapat diketahui pula bahwa permukiman di kawasan wisata sebagian besar menempati luas lahan 50-150 m² sebanyak 67,7%. Adapun rumah yang lain memiliki luas lahan 151-250 m² sebanyak 16,1%; luas lahan kurang dari 50 m² sebanyak 3,2%; dan menempati lahan seluas 551-600 m² sebanyak 3,2%.

Kemudian berdasarkan data harga lahan permukiman masyarakat di kawasan wisata terbagi menjadi tiga tingkatan (diagram harga lahan responden tampak pada Gambar 4.18).



Sumber: Hasil Analisis, 2009

GAMBAR 4.18
DIAGRAM HARGA LAHAN PERMUKIMAN DI
KAWASAN WISATA PANTAI KARTINI

Dari Gambar 4.18 tampak bahwa harga lahan rata-rata rendah sebanyak 38,7% yang berada di bagian utara; harga lahan rata-rata sedang sebanyak 37,1% yang berada di tengah permukiman; dan harga lahan tinggi sebanyak 24,2% yang berbatasan langsung dengan kawasan wisata

Untuk menguji dampak perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini terhadap kenaikan harga lahan dilakukan analisis hubungan antara harga lahan permukiman masyarakat di kawasan

wisata dengan harga lahan ditempat lain di luar kawasan wisata menggunakan tabulasi silang dengan hasil pada Tabel IV.4.

TABEL IV.4
TABULASI SILANG ANTARA HARGA LAHAN DI
KAWASAN WISATA DENGAN HARGA LAHAN DI
TEMPAT LAIN

		Harga Lahan di Tempat Lain			Total
		Rendah	Sama	Tinggi	
Harga Lahan	Rendah	8 12,9%	16 25,8%	0 ,0%	24 38,7%
	Sedang	3 4,8%	20 32,3%	0 ,0%	23 37,1%
	Tinggi	2 3,2%	5 8,1%	8 12,9%	15 24,2%
Total		13 21,0%	41 66,1%	8 12,9%	62 100,0%

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Tabel IV.4 diatas menunjukkan bahwa permukiman masyarakat yang harga lahan rendah sebanyak 38,7%, mereka menyatakan harga lahannya sama dengan harga lahan diluar kawasan wisata sebanyak 25,8% dan beranggapan bahwa harga lahannya lebih rendah sebanyak 12,9%. Dengan harga lahan sedang sebanyak 37,1%, mereka menyatakan sama dengan wilayah diluar kawasan wisata sebanyak 32,3% dan beranggapan lebih rendah sebanyak 4,8%. Harga lahan tinggi sebanyak 24,2%, mereka menyatakan harga lahan lebih tinggi dari wilayah lain sebanyak 12,9%; harga lahan sama sebanyak 8,1%; dan lebih rendah sebanyak 3,2%.

Pengujian hipotesis keterkaitan harga lahan dengan harga lahan ditempat lain diluar kawasan wisata yang dilakukan diperoleh nilai *Pearson Chi-Square* = 31,872 > 9,488; dk = 4; dan *Asymp. Sig* = 0,000 < 0,05; maka hipotesis nol (H_0) ditolak. Dimana harga lahan masyarakat tinggi memiliki kecenderungan signifikan sebesar 0,583 lebih tinggi dari tempat lain di luar kawasan wisata.

Lahan-lahan kawasan permukiman di wilayah pesisir pada umumnya tidak memiliki status hukum (legalitas) kepemilikan lahan, terutama area yang direklamasi secara swadaya oleh masyarakat (Suprijanto, 2006). Kondisi ini berbeda dengan kepemilikan lahan permukiman di kawasan wisata Pantai Kartini yang memiliki status hukum (legalitas) dengan mayoritas bersertifikat hak milik (SHM). Perkembangan kawasan wisata berpengaruh terhadap tingginya harga lahan di kawasan wisata Pantai Kartini, seperti yang dinyatakan oleh Sari (2004: 80) bahwa pariwisata berdampak terhadap kenaikan harga lahan.

4.3 Analisis Dampak Sosial Perkembangan Kawasan Wisata Pantai Kartini

Dampak sosial perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini meliputi dampak terhadap kesenjangan sosial, ketergantungan pada pariwisata dan masuknya penduduk pendatang.

4.3.1 Dampak Terhadap Kesenjangan Sosial

Ditinjau dari pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, diperoleh gambaran bahwa rumah tangga di kawasan wisata yang pendapatan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari cukup sebanyak 66,1%; pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kurang sebanyak 32,3%; dan pendapatan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari lebih sebanyak 1,6% (diagram diperlihatkan oleh Gambar 4.19).



Sumber: Hasil Analisis, 2009

GAMBAR 4.19
DIAGRAM PEMENUHAN KEBUTUHAN HIDUP
RUMAH TANGGA

Gambar 4.19 menunjukkan bahwa dengan pendapatan yang diterima seluruh anggota rumah tangga perbulan rata-rata Rp. 1,5 juta dan jumlah tanggungan anggota rumah tangga rata-rata 5 orang sebagian besar masyarakat merasa cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Untuk menguji dampak perkembangan kawasan wisata terhadap kesenjangan sosial dilakukan dengan menganalisis

hubungan antara pendapatan memenuhi kebutuhan hidup dengan kategori pekerjaan utama kepala rumah tangga sesuai wilayah penelitian. Distribusi data penelitian menggunakan tabulasi silang diperoleh hasil pada Tabel IV.5.

TABEL IV.5
TABULASI SILANG ANTARA PEMENUHAN
KEBUTUHAN DENGAN KATEGORI PEKERJAAN

		Pemenuhan Kebutuhan			Total
		Kurang	Cukup	Lebih	
Kategori Pekerjaan	Sektor Perikanan	7 11,3%	6 9,7%	0 ,0%	13 21,0%
	Sektor Pariwisata	9 14,5%	10 16,1%	1 1,6%	20 32,3%
	Sektor Lainnya	4 6,5%	25 40,3%	0 ,0%	29 46,8%
Total		20 32,3%	41 66,1%	1 1,6%	62 100,0%

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Tabel IV.5 menunjukkan bahwa kepala rumah tangga dengan kategori pekerjaan sektor lainnya sebanyak 46,8%; dengan pendapatan dapat memenuhi kebutuhan cukup sebanyak 40,3% dan kurang sebanyak 6,5%. Kepala rumah tangga dengan kategori pekerjaan sektor pariwisata sebanyak 32,3%; dengan pendapatan dapat memenuhi kebutuhan cukup sebanyak 16,1%; kurang sebanyak 14,5% dan pendapatan dapat memenuhi kebutuhan lebih sebanyak 1,6%. Kepala rumah tangga dengan kategori pekerjaan sektor perikanan sebanyak 21,0%; dengan

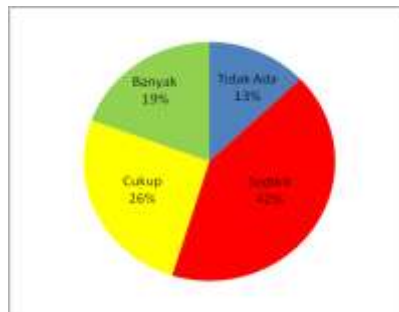
pendapatan memenuhi kebutuhan kurang sebanyak 11,3% dan pendapatan dapat memenuhi kebutuhan cukup sebanyak 9,7%.

Hasil pengujian hipotesis hubungan antara pemenuhan kebutuhan hidup dengan kategori pekerjaan utama kepala rumah tangga sesuai wilayah penelitian menggunakan *Chi-Square* menunjukkan nilai *Pearson Chi-Square* sebesar $= 11,389 > 9,488$; $dk = 4$; dan *Asymp. Sig* $= 0,023 < 0,05$; maka hipotesis (H_0) ditolak. Dimana pekerjaan utama kepala rumah tangga kategori sektor pariwisata memiliki kecenderungan signifikan sebesar 0,394 cukup pemenuhan kebutuhan hidup sehari-harinya. Begitu pula kepala rumah tangga yang bekerja di sektor lainnya memiliki kecenderungan cukup pemenuhan kebutuhan hidup sehari-harinya. Adapun kepala rumah tangga yang mempunyai kategori pekerjaan sektor perikanan cenderung kurang dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-harinya.

Perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini berdampak terhadap kesenjangan sosial masyarakat setempat. Dengan demikian setelah perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini di dalam masyarakat terjadi perbedaan status sosial, dimana masyarakat yang bekerja sektor pariwisata lebih tinggi status sosialnya dari masyarakat yang memiliki pekerjaan di sektor perikanan. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang ditegaskan oleh Wiranatha (2008) bahwa pariwisata berdampak negatif terhadap terjadinya kesenjangan pendapatan/kesejahteraan masyarakat antara pelaku pariwisata dengan masyarakat lain yang tidak bersentuhan dengan pariwisata secara langsung.

4.3.2 Dampak Terhadap Ketergantungan

Berdasarkan analisis data jumlah anggota rumah tangga yang bekerja di kawasan wisata menunjukkan bahwa hampir setiap rumah tangga terdapat anggota yang bekerja di kawasan wisata (diagram ditunjukkan pada Gambar 4.20).



Sumber: Hasil Analisis, 2009

GAMBAR 4.20
DIAGRAM JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA
BEKERJA DI KAWASAN WISATA

Gambar 4.20 diatas menunjukkan bahwa jumlah anggota rumah tangga bekerja di kawasan wisata sedikit sebanyak 41,9%; jumlah anggota rumah tangga bekerja di kawasan wisata cukup banyak sebanyak 25,8%; dan jumlah anggota rumah tangga bekerja di kawasan wisata banyak sebanyak 19,4% (diagram jumlah anggota rumah tangga bekerja di kawasan wisata).

Adapun untuk menguji dampak perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini terhadap ketergantungan masyarakat pada pariwisata dilakukan analisis hubungan antara jumlah seluruh anggota rumah tangga yang bekerja dengan jumlah anggota

rumah tangga yang bekerja/berusaha di kawasan wisata. Distribusi data penelitian menggunakan tabulasi silang diperoleh hasil pada Tabel IV.6.

TABEL IV.6
TABULASI SILANG ANTARA JUMLAH ANGGOTA
BEKERJA DENGAN JUMLAH ANGGOTA BEKERJA
DI KAWASAN WISATA

		Jumlah Anggota Rumah Tangga Bekerja di Kawasan Wisata				Total
		Tidak Ada	Sedikit	Cukup	Banyak	
Jumlah Anggota Rumah Tangga Bekerja	Sedikit	4 6,5%	2 3,2%	0 ,0%	0 ,0%	6 9,7%
	Cukup	4 6,5%	23 37,1%	15 24,2%	2 3,2%	44 71,0%
	Banyak	0 ,0%	1 1,6%	1 1,6%	10 16,1%	12 19,4%
Total		8 12,9%	26 41,9%	16 25,8%	12 19,4%	62 100,0%

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Pada Tabel IV.6 diketahui bahwa jumlah anggota rumah tangga bekerja cukup banyak sebanyak 71,0%; dari jumlah tersebut yang bekerja di kawasan wisata sedikit sebanyak 37,1%; bekerja di kawasan wisata cukup banyak sebanyak 24,2%; tidak ada anggota bekerja di kawasan wisata sebanyak 6,5%; dan bekerja di kawasan wisata banyak sebanyak 3,2%. Jumlah anggota rumah tangga yang bekerja banyak sebanyak 19,4%; dari anggota rumah tangga tersebut yang bekerja di kawasan wisata banyak sebanyak 16,1%; bekerja di kawasan wisata cukup

banyak sebanyak 1,6%; dan bekerja di kawasan wisata sedikit sebanyak 1,6%. Adapun jumlah anggota rumah tangga bekerja sedikit sebanyak 9,7%; dari jumlah anggota rumah tangga tersebut tidak ada yang bekerja di kawasan wisata sebanyak 6,5%; dan bekerja di kawasan wisata sedikit sebanyak 3,2%.

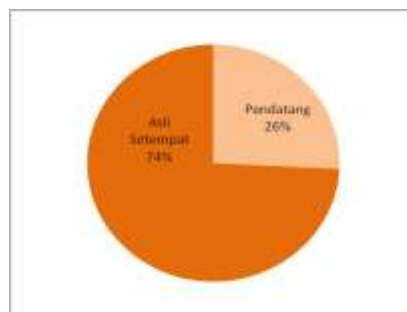
Hasil pengujian hipotesis hubungan antara jumlah seluruh anggota rumah tangga yang bekerja dengan jumlah seluruh anggota rumah tangga yang bekerja di kawasan wisata menggunakan *Chi-Square* menunjukkan nilai *Pearson Chi-Square* sebesar $= 55,606 > 12,591$; $dk = 6$; dan *Asymp. Sig* $= 0,000 < 0,05$; maka hipotesis nol (H_0) ditolak. Dimana jumlah anggota rumah tangga yang bekerja di kawasan wisata memiliki kecenderungan signifikan sebesar 0,688 berpengaruh terhadap jumlah anggota rumah tangga yang bekerja. Jumlah anggota keluarga yang bekerja banyak memiliki kecenderungan banyak bekerja/berusaha di kawasan wisata.

Sebelum kawasan wisata Pantai Kartini berkembang masyarakat pesisir memiliki keterampilan yang umumnya terbatas pada masalah penangkapan ikan sehingga kurang mendukung diversifikasi kegiatan (Dahuri, et. al., 1996: 285), maka masyarakat pesisir memiliki ketergantungan kehidupan dari sumber-sumber perikanan di laut. Perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini berdampak terhadap ketergantungan masyarakat pesisir pada pariwisata. Kemudian tingkat ketergantungan masyarakat pada pariwisata ditunjukkan dari hampir semua rumah tangga terdapat anggota yang bekerja/berusaha di kawasan wisata. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dinyatakan Sari

(2004: 79) bahwa pariwisata berdampak terhadap ketergantungan yang berlebihan pada pariwisata karena mata pencaharian penduduk menjadi sangat tergantung pada kunjungan wisatawan.

4.3.3 Dampak Terhadap Migrasi

Berdasarkan data proporsi masyarakat yang bermukim di kawasan wisata dari penduduk asli setempat dan penduduk pendatang diperoleh gambaran bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan wisata merupakan penduduk asli setempat sebanyak 74,2% dan penduduk pendatang sebanyak 25,8% (diagram asal daerah responden tampak pada Gambar 4.21)



Sumber: Hasil Analisis, 2009

GAMBAR 4.21
DIAGRAM ASAL DAERAH RESPONDEN

Pada Gambar 4.21 diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat di kawasan wisata merupakan penduduk asli setempat. Adapun lama tinggal penduduk asli setempat dan pendatang dapat dilihat pada Gambar 4.22.



Sumber: Hasil Analisis, 2009

GAMBAR 4.22
DIAGRAM LAMA TINGGAL RESPONDEN

Gambar 4.22 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di kawasan wisata dengan lama tinggal 33-37 tahun sebanyak 74,2%, mereka ini penduduk asli setempat yang lahir atau dibesarkan di wilayah pesisir. Kemudian lama tinggal penduduk pendatang dengan lama tinggal 23-27 tahun sebanyak 8,1%; dengan lama tinggal 13-17 tahun sebanyak 6,5%; dengan lama tinggal 18-22 tahun sebanyak 4,8%; dengan lama tinggal 28-32 tahun sebanyak 3,2%; dengan lama tinggal 8-12 tahun sebanyak 1,6%; dan dengan lama tinggal 2-7 tahun sebanyak 1,6%.

Untuk menguji dampak perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini terhadap migrasi dilakukan analisis hubungan antara asal daerah masyarakat yang tinggal di kawasan wisata dengan kategori mata pencaharian/pekerjaan utama kepala rumah tangga yang disesuaikan kondisi wilayah penelitian. Hasil pengolahan data menggunakan tabulasi silang didapatkan hasil pada Tabel IV.7.

TABEL IV.7
TABULASI SILANG ANTARA ASAL DAERAH
DENGAN KATEGORI PEKERJAAN

		Kategori Pekerjaan			Total
		Sektor Perikanan	Sektor Pariwisata	Sektor lainnya	
Asal Daerah	Pendatang	3 4,8%	6 9,7%	7 11,3%	16 25.8%
	Asli Setempat	10 16,1%	14 22,6%	22 35,5%	46 74.2%
Total		13 21,0%	20 32,3%	29 46,8%	62 100.0%

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Pada Tabel IV.7 tampak bahwa masyarakat asli setempat sebanyak 74,2%, dimana mereka memiliki pekerjaan tidak sektor perikanan dan sektor pariwisata sebanyak 35,5%; memiliki pekerjaan sektor pariwisata sebanyak 22,6%; dan memiliki pekerjaan sektor perikanan sebanyak 16,1 %. Adapun masyarakat pendatang sebanyak 25,8%, dimana memiliki pekerjaan utama sektor lainnya sebanyak 11,3%; memiliki pekerjaan sektor pariwisata sebanyak 9,7%; dan memiliki pekerjaan sektor perikanan sebanyak 4,8%.

Hasil pengujian hipotesis antara asal daerah dengan kategori pekerjaan menggunakan *Chi-Square* menunjukkan nilai *Pearson Chi-Square* = 0,276 < 5,991; dk = 2; dan *Asymp. Sig* = 0,871 > 0,05; maka hipotesis nol (H_0) diterima. Dimana penduduk pendatang memiliki kecenderungan signifikan sebesar 0,067 mempunyai pekerjaan/mata pencaharian kategori sektor lainnya.

Perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini tidak berdampak terhadap masuknya penduduk pendatang berusaha di kawasan wisata. Dengan demikian tidak menimbulkan persaingan antara penduduk asli setempat dengan pendatang berusaha pariwisata. Hasil penelitian ini berbeda dengan pendapat Cohen (1984 dalam Pitana dan Gayatri, 2005: 117) yang menyatakan pariwisata berdampak terhadap migrasi dari dan ke daerah pariwisata. Kemudian menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat lokal dalam hal persaingan ekonomi dengan investor dari luar daerah (Wiranatha, 2008).

4.4 Analisis Dampak Lingkungan Fisik Perkembangan Kawasan Wisata Pantai Kartini

Lingkungan fisik permukiman perlu dilakukan penataan dengan penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar agar dapat memberikan dukungan dan kenyamanan terhadap manusia dalam melakukan kegiatan dan kelangsungan hidup secara optimal. Menurut Sujarto (1993:134) bahwa dampak terhadap lingkungan fisik diperlihatkan oleh peningkatan kondisi dan kualitas lingkungan fisik melalui penyediaan dan perbaikan prasarana dasar bagi permukiman yang memadai.

Data di wilayah penelitian diperoleh gambaran, dari penyediaan prasarana jalan lingkungan dan air bersih menunjukkan bahwa kondisi prasarana jalan lingkungan permukiman di kawasan wisata baik dinyatakan oleh responden sebanyak 100%, karena dapat dipergunakan untuk pergerakan

masyarakat di lingkungan permukiman, memiliki lebar 1 m dan perkerasan dengan *pavingblock*. Demikian pula prasarana air bersih juga tersedia bagi masyarakat yang tinggal di kawasan wisata Pantai Kartini yang tunjukkan hasil penelitian 100% responden menyatakan menggunakan air bersih yang berasal dari PDAM untuk air minum, memasak, mandi dan mencuci dan setiap rumah tangga telah memiliki saluran air bersih (foto kondisi jalan lingkungan pada Gambar 4.23).



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008

GAMBAR 4.23
KONDISI JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Kemudian dampak fisik yang lain diperlihatkan oleh peningkatan kondisi sarana dasar bagi permukiman yang memadai yaitu kualitas lingkungan fisik yang bersih, nyaman dan bebas banjir (Sujarto, 1993:134). Kondisi sarana saluran pematusan dan persampahan di wilayah penelitian menunjukkan bahwa saluran pematusan berfungsi dengan baik yang

ditunjukkan dari adanya saluran pematusan yang baik untuk mengalirkan air hujan dan responden sebanyak 96,8% menyatakan bahwa tidak terjadi genangan bila musim penghujan.

Demikian pula kondisi sarana persampahan yang ditunjukkan oleh kepemilikan tempat sampah diluar rumah. Data yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan sebanyak 96,8% responden memiliki tempat sampah diluar rumah dan sebanyak 3,2% responden tidak memiliki tempat sampah diluar rumah. Rumah tangga yang tidak memiliki tempat sampah diluar rumah karena lokasi permukiman dekat dengan Tempat Penampungan Sementara (TPS). Sampah rumah tangga tersebut diangkut oleh masing-masing rumah tangga menuju lokasi TPS karena tidak ada petugas sampah yang mengangkut sampah Dari Rumah Tangga Ke TPS. Adanya Tempat penampungan sementara (TPS) ini dinyatakan oleh sebanyak 95,2% responden dan sebanyak 4,8% responden menyatakan tidak terdapat TPS di sekitar permukiman. Dalam menunjang kesehatan lingkungan permukiman, diwilayah penelitian terdapat sarana sanitasi rumah tangga berupa WC yang dinyatakan oleh responden sebanyak 88,7% memiliki WC dan tidak memiliki WC sebanyak 11,3% responden.

Untuk menguji dampak perkembangan kawasan wisata terhadap lingkungan fisik dilakukan analisis hubungan antara penataan lingkungan fisik permukiman dengan upaya pengembangan kawasan wisata. Berdasarkan pengolahan data menggunakan tabulasi silang didapatkan hasil seperti tampak pada Tabel IV.8.

TABEL IV.8
TABULASI SILANG ANTARA PENATAAN
LINGKUNGAN PERMUKIMAN DENGAN
PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA

		Pengembangan Kawasan Wisata		Total
		Tidak	Ya	
Penataan Lingkungan Permukiman	Sanitasi/MCK	17 27.4%	2 3.2%	19 30.6%
	Pemugaran Rumah	15 24.2%	3 4.8%	18 29.0%
	Jalan Lingkungan	11 17.7%	14 22.6%	25 40.3%
Total		43 69.4%	19 30.6%	62 100.0%

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Pada Tabel IV.8 ditunjukkan bahwa penataan lingkungan fisik berupa jalan lingkungan sebanyak 40,3%; penataan jalan ini berkaitan pengembangan kawasan wisata dinyatakan oleh responden sebanyak 22,6% dan tidak berkaitan dengan pengembangan kawasan wisata dinyatakan oleh responden sebanyak 17,1%. Penataan lingkungan berupa sanitasi/MCK sebanyak 30,6%; hal ini tidak berkaitan pengembangan kawasan wisata dinyatakan oleh masyarakat sebanyak 27,4% dan berkaitan pengembangan kawasan wisata dinyatakan oleh masyarakat sebanyak 3,2%. Penataan lingkungan berupa pemugaran rumah sebanyak 29,0%; tidak terkait dengan pengembangan kawasan wisata dinyatakan oleh sebanyak 24,2% dan berkaitan pengembangan kawasan wisata dinyatakan oleh sebanyak 4,8%.

Pengujian hipotesis diperoleh hasil nilai *Pearson Chi-Square* = 12,835 > 5,991; dk = 2; dan *Asymp. Sig* = 0,002 < 0,05; maka hipotesis nol (H_0) ditolak. Dimana penataan lingkungan fisik memiliki kecenderungan signifikan 0,414 berkaitan dengan pengembangan kawasan wisata. Adapun penataan lingkungan fisik yang paling berpengaruh adalah peningkatan jalan lingkungan. Sedangkan penataan lingkungan fisik berupa pemugaran rumah dan penyediaan fasilitas MCK merupakan program perbaikan lingkungan yang memiliki kecenderungan tidak berkaitan dengan pengembangan kawasan wisata.

Sebelum kawasan wisata Pantai Kartini berkembang, masyarakat pesisir menghadapi permasalahan lingkungan fisik permukiman yang kondisi sarana pelayanan dasar termasuk prasarana fisik masih terbatas; kondisi lingkungan kurang terpelihara, air bersih dan sanitasi jauh dari mencukupi sehingga kurang memenuhi persyaratan kesehatan (Dahuri, et. al., 1996: 285). Perkembangan kawasan wisata menyebabkan adanya program penataan lingkungan fisik permukiman di kawasan wisata Pantai Kartini, hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Wiranatha 2008) bahwa pariwisata berdampak salah satunya peningkatan infrastruktur/fasilitas di daerah tujuan wisata.

4.5 Analisis Dampak Positif dan Negatif Perkembangan Kawasan Wisata Pantai Kartini

Dampak pengembangan pariwisata seperti dinyatakan Erawan (1987:47 dalam Tashadi, Ed., 1994) sebagai dampak yang positif dan dampak negatif. Dampak positif merupakan keuntungan (*benefit*) berkembangnya pariwisata dan dampak negatif dapat ditelusuri sebagai kerugian (*cost*) yang timbul akibat pengembangan pariwisata. Beberapa hasil analisis penelitian diatas telah cukup memberi gambaran yang positif terhadap dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini. Untuk selanjutnya dibuat matrik perbandingan berdasarkan hasil penelitian indikator dampak positif dan dampak negatif tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Tabel IV.9.

TABEL IV.9
MATRIK PERBANDINGAN DAMPAK PARIWISATA
LITERATUR DAN DAMPAK PERKEMBANGAN
KAWASAN WISATA PANTAI KARTINI

NO	DAMPAK PARIWISATA LITERATUR	SIFAT DAMPAK LITERATUR	DAMPAK KAWASAN WISATA PANTAI KARTINI	INDIKATOR DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF	KESIMPULAN HASIL PENELITIAN
Dampak Ekonomi					
1.	Kesempatan Kerja	Positif	Kesempatan kerja sektor pariwisata	Positif: ▪ Deversifikasi usaha masyarakat sektor pariwisata (32,3%) Negatif: ▪ Terjadi kesenjangan sosial dengan sektor perikanan (11,3%)	Positif

NO	DAMPAK PARIWISATA	SIFAT DAMPAK LITERATUR	DAMPAK KAWASAN WISATA PANTAI KARTINI	INDIKATOR DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF	KESIMPULAN HASIL PENELITIAN
2.	Peningkatan Pendapatan	Positif	Tingkat pendapatan tinggi	Positif: ▪ Tingginya tingkat pendapatan dipengaruhi pendapatan pariwisata (16,1%) Negatif: ▪ Kesenjangan sosial dengan sektor pariwisata (11,3%)	Positif
3.	Kenaikan Harga Lahan	Negatif	Kenaikan harga lahan	Positif: ▪ Status (legalitas) kepemilikan lahan hak milik (96,8%) ▪ Kenaikan harga lahan (12,9%)	Positif
Dampak Sosial					
4.	Kesenjangan Sosial	Negatif	Terjadi kesenjangan sosial	Negatif: ▪ Kecemburuan sosial, sektor pariwisata (32,2%) dengan sektor perikanan (21,0%)	Negatif
5.	Ketergantungan pada Pariwisata	Negatif	Ketergantungan pada pariwisata	Negatif: ▪ Hampir setiap rumah tangga bekerja di kawasan wisata (87,1%)	Negatif
6.	Migrasi	Negatif	Tidak berdampak terhadap migrasi	Positif: ▪ Asli setempat (74,2%) ▪ Pendatang sektor pariwisata (9,7%)	Positif
Dampak Lingkungan Fisik					
7.	Tersedia Prasarana & Sarana Permukiman	Positif	Tersedia prasarana dan sarana permukiman	Positif: ▪ Penataan jalan lingkungan (100%), air bersih (100%), saluran pematasan/sanita si (96,8%), dan persampahan (96,8%)	Positif

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2009

Berdasarkan Tabel IV.9 dari 7 dampak perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini, terdapat 5 dampak yang positif yaitu dampak terhadap kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, kenaikan harga lahan, lingkungan fisik, dan tidak menyebabkan migrasi. Adapun 2 dampak yang negatif yaitu terjadi kesenjangan sosial dan ketergantungan masyarakat pesisir pada pariwisata. Kesimpulan penelitian ini bahwa perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini berdampak positif terhadap masyarakat setempat.

4.6 Analisis Faktor-Faktor Berpengaruh Terhadap Perubahan Fungsi Permukiman di Kawasan Wisata Pantai Kartini

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 dinyatakan bahwa permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Adapun Turner (1972: 212-213) menyatakan bahwa rumah dapat diartikan dalam arti fisik adalah rumah dipandang sebagai tempat berlindung dari perubahan iklim, cuaca, dan penyakit yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Sedangkan rumah dalam arti sosial adalah rumah dipandang sebagai tempat melakukan proses sosialisasi baik bagi keluarga atau pergaulan dengan masyarakat.

Berdasarkan data di wilayah penelitian fungsi fisik permukiman sebagai tempat hunian dan membentuk keluarga

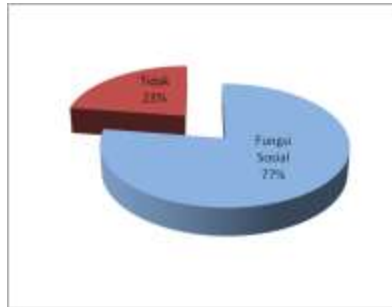
(komunitas) dilakukan oleh mayoritas permukiman di kawasan wisata ditempati sebagai tempat tinggal sebanyak 98,4% (dapat dilihat pada Gambar 4.24).



Sumber: Hasil Analisis, 2009

GAMBAR 4.24
DIAGRAM FUNGSI FISIK RUMAH

Pada Gambar 4.24 tampak bahwa hanya sebanyak 1,6% yang tidak ditempati keluarga sebagai tempat tinggal, karena untuk penginapan dan keluarga tinggal di tempat lain. Kemudian fungsi sosial yang memandang rumah sebagai tempat melakukan proses sosialisasi baik bagi keluarga atau pergaulan dengan masyarakat dilakukan oleh sebanyak 77,4% yaitu untuk kegiatan kemasyarakatan seperti pertemuan rukun tetangga, dan kegiatan keagamaan. Adapun rumah tangga yang tidak rumah difungsikan sosial untuk kegiatan kemasyarakatan sebanyak 22,6%, disebabkan kepala rumah tangga adalah perempuan (dapat dilihat pada Gambar 4.25).



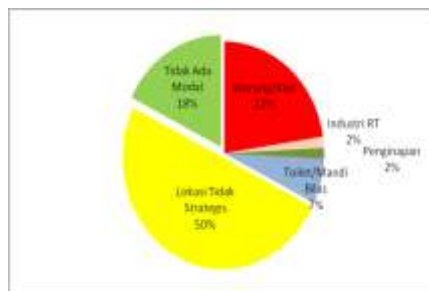
Sumber: Hasil Analisis, 2009

GAMBAR 4.25
DIAGRAM FUNGSI SOSIAL PERMUKIMAN

Untuk mengetahui perubahan fungsi permukiman, seperti yang disampaikan Spreiregen (1985) bahwa permukiman/kota terbentuk sebagai akibat adanya fungsi dari aktivitas manusia yang luas dan kompleks dan disisi lain juga dapat dilihat sebagai hasil dari bentukan fisik buatan manusia yang terbentuk dari waktu ke waktu dan tumbuh tidak hanya secara fisik namun tumbuh bersama masyarakatnya. Aktivitas pariwisata yang berkembang dan permukiman masyarakat dalam sebuah kawasan mempengaruhi fungsi permukiman yang terbentuk di kawasan tersebut.

Budihardjo (1994:39) menyatakan bahwa rumah-rumah di Indonesia berbeda dengan rumah di negara maju yang memang merupakan tempat hunian semata-mata, rumah kebanyakan penduduk kota di Indonesia berfungsi ganda sebagai wahana menambah penghasilan. Kegiatan usaha non formal seperti warung, kios, tempat jahit, urut, cukur, persewaan buku, lazim disebut usaha emper depan (*front-porch business*). Kemudian

fungsi ekonomi rumah menurut Turner (1972: 212-213) adalah rumah dipandang sebagai investasi sehingga dapat dipergunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan ekonomi serta merupakan pendorong kegiatan ekonomi lainnya seperti perdagangan dan industri. Berdasarkan data di wilayah penelitian diperoleh hasil fungsi ekonomi rumah ini tidak dilakukan oleh sebagian besar permukiman dengan alasan karena lokasi rumah tidak strategis sebanyak 50,0%. Begitu pula tidak dilakukan fungsi ekonomi ini karena alasan tidak adanya modal oleh sebanyak 17,7% (diagram fungsi ekonomi permukiman ditunjukkan oleh Gambar 4.26).



Sumber: Hasil Analisis, 2009

GAMBAR 4.26
DIAGRAM FUNGSI EKONOMI PERMUKIMAN

Dari Gambar 4.26 juga tampak bahwa terdapat fungsi ekonomi permukiman yang dilakukan oleh masyarakat pesisir di kawasan wisata Pantai Kartini. Dimana rumah yang difungsikan untuk usaha warung/kios sebanyak 22,6% (Gambar 4.27).



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008

GAMBAR 4.27
RUMAH UNTUK USAHA KIOS/WARUNG MAKAN

Sedangkan fungsi ekonomi rumah untuk toko cinderamata (*souvenir*) sebagaimana tampak pada Gambar 4.28 berikut ini:



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008

GAMBAR 4.28
RUMAH UNTUK USAHA TOKO CINDERAMATA

Fungsi ekonomi lain yaitu rumah sebagai tempat usaha toilet/mandi bilas bagi pengunjung sebanyak 6,5% (diperlihatkan pada Gambar 4.29).



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008

GAMBAR 4.29 **RUMAH UNTUK USAHA TOILET DAN MANDI BILAS**

Selanjutnya rumah berfungsi ekonomi sebagai penginapan/sewa kamar sebanyak 1,6%. Fungsi rumah untuk usaha penginapan ini tidak ditempati untuk tempat tinggal karena pemilik rumah pendatang (tampak pada Gambar 4.30).



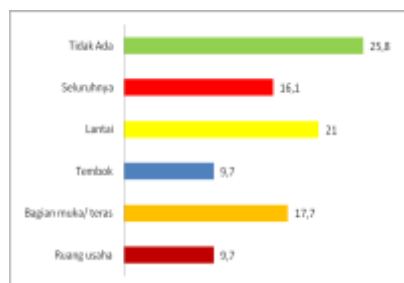
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008

GAMBAR 4.30 **RUMAH UNTUK USAHA PENGINAPAN**

Selain beberapa rumah yang berfungsi sebagai tempat usaha melayani wisatawan, di kawasan wisata juga terdapat

rumah yang berfungsi ekonomi sebagai tempat usaha industri rumah tangga sebanyak 1,6%. Industri rumah tangga ini juga terkait dengan pariwisata berupa pemanfaatan material laut untuk dibuat *souvenir* yang dijual kepada wisatawan.

Perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini menyebabkan masyarakat di kawasan wisata yang menjadi pelaku ekonomi pariwisata. Dimana permukiman masyarakat disamping fungsi fisik sebagai hunian dan fungsi sosial untuk bermasyarakat permukiman juga memiliki fungsi ekonomi yaitu untuk kegiatan usaha. Kondisi ini mengakibatkan permukiman pesisir yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat hunian masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan telah mengalami perubahan fisik, sebagaimana dinyatakan Rapoport (1990) bahwa hubungan perubahan rumah dan lingkungan binaan merupakan cerminan dari adanya perubahan aktivitas penghuni/pengguna. Adapun jenis perubahan fisik permukiman yang dilakukan masyarakat di kawasan wisata (diagram ditunjukkan pada Gambar 4.31).



Sumber: Hasil Analisis, 2009

GAMBAR 4.31
DIAGRAM JENIS PERUBAHAN FISIK RUMAH DI
KAWASAN WISATA PANTAI KARTINI

Gambar 4.31 menunjukkan permukiman pesisir sejumlah 62 rumah di kawasan wisata telah melakukan perubahan fisik terhadap tempat tinggal mereka sebanyak 74,2%. Jenis perubahan fisik yang dilakukan selama ini oleh masyarakat yaitu lantai sebanyak 21,0%, bagian muka/teras sebanyak 17,7%, seluruhnya (renovasi) sebanyak 16,1%, ruang usaha sebanyak 9,7%, tembok sebanyak 9,7%, dan tidak ada perubahan fisik terhadap rumah sebanyak 25,8%.

Berdasarkan dampak perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini ada beberapa variabel yang dipengaruhi yaitu kesempatan kerja, tingkat pendapatan, harga lahan, kesenjangan pendapatan, ketergantungan, migrasi dan penataan lingkungan permukiman. Variabel-variabel tersebut diduga berpengaruh terhadap perubahan fungsi permukiman masyarakat pesisir menjadi fungsi ekonomi untuk usaha.

4.6.1 Pengaruh Kesempatan Kerja Terhadap Perubahan Fungsi Permukiman

Pengaruh kesempatan kerja terhadap perubahan fungsi permukiman dianalisis dari kategori pekerjaan utama responden. Jenis pekerjaan utama kepala rumah tangga di kawasan wisata Pantai Kartini beragam, namun jenis pekerjaan tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga sektor yaitu perikanan, pariwisata dan lainnya. Berdasarkan distribusi data penelitian hubungan kategori pekerjaan dengan perubahan fungsi permukiman menggunakan tabulasi silang diperoleh hasil pada Tabel IV.10.

TABEL IV.10
TABULASI SILANG ANTARA KATEGORI PEKERJAAN
DENGAN PERUBAHAN FUNGSI PERMUKIMAN

		Perubahan Fungsi Permukiman		Total
		Tidak	Ya	
Kategori Pekerjaan	Sektor Perikanan	11 17,7%	2 3,2%	13 21,0%
	Sektor Pariwisata	9 14,5%	11 17,7%	20 32,3%
	Sektor lainnya	21 33,9%	8 12,9%	29 46,8%
Total		41 66,1%	21 33,9%	62 100,0%

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Tabel IV.10 menunjukkan bahwa pekerjaan utama kepala rumah tangga yang tidak berkaitan wisata sebanyak 69,4%; rumah mereka yang tidak berubah fungsi sebanyak 53,2% dan berubah fungsi sebanyak 6,1%. Sedangkan pekerjaan yang berkaitan pariwisata sebanyak 30,6% dimana rumah berubah fungsi sebanyak 17,7% dan tidak berubah fungsi sebanyak 12,9%.

Hasil pengujian hipotesis hubungan antara jumlah seluruh anggota rumah tangga yang bekerja dengan jumlah seluruh anggota rumah tangga yang bekerja di kawasan wisata menggunakan *Chi-Square* menunjukkan nilai Pearson *Chi-Square* = 6,481 > 5,991; dk = 2; dan *Asymp. Sig* = 0,039 < 0,05; maka hipotesis nol (H_0) ditolak. Berdasarkan *Contingency Coefficient* kategori pekerjaan sektor pariwisata berbeda nyata

dan berpengaruh signifikan sebesar 0,308 terhadap perubahan fungsi permukiman pesisir di kawasan wisata Pantai Kartini. Dimana masyarakat yang pekerjaan utama sektor pariwisata cenderung merubah fungsi permukimannya.

4.6.2 Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Perubahan Fungsi Permukiman

Pengaruh tingkat pendapatan terhadap perubahan fungsi permukiman dianalisis berdasarkan hubungan pendapatan seluruh anggota rumah tangga yang bekerja di kawasan wisata dengan fungsi ekonomi permukiman untuk usaha. Hasil pengolahan data menggunakan tabulasi silang diperoleh hasil pada Tabel IV.11.

TABEL IV.11
TABULASI SILANG ANTARA PENDAPATAN DARI
KAWASAN WISATA DENGAN PERUBAHAN FUNGSI
PERMUKIMAN

		Perubahan Fungsi Permukiman		Total
		Tidak	Ya	
Pendapatan Rumah Tangga dari Kawasan Wisata	Tidak Ada	6 9,7%	2 3,2%	8 12,9%
	Rendah	26 41,9%	6 9,7%	32 51,6%
	Sedang	5 8,1%	7 11,3%	12 19,4%
	Tinggi	4 6,5%	6 9,7%	10 16,1%
Total		41 66,1%	21 33,9%	62 100,0%

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Tabel IV.11 memperlihatkan bahwa pendapatan seluruh anggota rumah tangga dari kawasan wisata rendah sebanyak 51,6%; tidak berubah fungsi sebanyak 41,9% dan berubah fungsi sebanyak 9,7%. Pendapatan dari kawasan wisata sedang sebanyak 19,4%; merubah fungsi sebanyak 11,3% dan tidak berubah fungsi sebanyak 8,1%. Pendapatan dari kawasan wisata tinggi sebanyak 16,1%; rumah berubah fungsi sebanyak 9,7% dan tidak berubah fungsi sebanyak 6,5%. Tidak ada pendapatan dari kawasan wisata sebanyak 12,9%; tidak berubah fungsi sebanyak 9,7%; dan berubah fungsi untuk usaha sebanyak 3,2%.

Hasil pengujian hipotesis hubungan antara pendapatan seluruh anggota rumah tangga dari bekerja di kawasan wisata dengan perubahan fungsi permukiman menggunakan *Chi-Square* menunjukkan nilai *Pearson Chi-Square* = 9,801 > 7,815; dk = 3; dan *Asymp. Sig* = 0,020 < 0,05; maka hipotesis nol (H_0) ditolak. Berdasarkan *Contingency Coefficient* tingginya tingkat pendapatan yang diterima anggota rumah tangga dari kawasan wisata cenderung signifikan sebesar 0,369 berpengaruh terhadap perubahan fungsi permukiman. Dimana masyarakat yang pendapan dari bekerja di kawasan wisata Pantai Kartini tinggi cenderung merubah fungsi permukimannya untuk usaha.

4.6.3 Pengaruh Harga Lahan Terhadap Perubahan Fungsi Permukiman

Pengaruh tingginya harga lahan terhadap perubahan fungsi permukiman dianalisis dari hubungan perubahan ini dengan harga

lahan di kawasan wisata dibandingkan di tempat lain. Hasil analisis menggunakan tabulasi silang menunjukkan bahwa masyarakat yang menyatakan harga lahan di kawasan wisata sama dengan wilayah disekitar di luar kawasan sebanyak 66,1%; kondisi rumahnya tidak berubah fungsi sebanyak 45,2% dan berubah fungsi ekonomi sebanyak 21,0%. Menyatakan bahwa harga lahan lebih rendah dari wilayah disekitarnya diluar kawasan wisata sebanyak 21,0%, tidak merubah fungsi sebanyak 17,7% dan berubah fungsi sebanyak 3,2%. Harga lahan di kawasan wisata yang lebih tinggi dari wilayah disekitar dinyatakan sebanyak 12,9%, merubah fungsi ekonomi rumah sebanyak 9,7% dan tidak merubah fungsi sebanyak 3,2% (pada Tabel IV.12).

TABEL IV.12
TABULASI SILANG ANTARA HARGA LAHAN DENGAN
PERUBAHAN FUNGSI PERMUKIMAN

		Perubahan Fungsi Permukiman		Total
		Tidak	Ya	
Harga Lahan	Rendah	20 32,3%	4 6,5%	24 38,7%
	Sama	18 29,0%	5 8,1%	23 37,1%
	Tinggi	3 4,8%	12 19,4%	15 24,2%
Total		41 66.1%	21 33.9%	62 100.0%

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Pengujian hubungan antara perbedaan harga lahan di kawasan wisata dari tempat lain disekitar Pantai Kartini dengan perubahan fungsi permukiman pesisir menggunakan *Chi-Square* memperoleh hasil nilai *Pearson Chi-Square* = 18,933 > 5,991; dk = 2; dan *Asymp. Sig* = 0,000 < 0,05; maka hipotesis nol (H_0) ditolak. Berdasarkan *Contingency Coefficient* tingginya harga lahan di kawasan wisata memiliki kecenderungan signifikan sebesar 0,484 berpengaruh terhadap perubahan fungsi permukiman pesisir di kawasan wisata. Dimana masyarakat yang harga lahannya tinggi cenderung merubah fungsi permukimannya untuk usaha.

4.6.4 Pengaruh Kesenjangan Sosial Terhadap Perubahan Fungsi Permukiman

Pengaruh kesenjangan sosial terhadap perubahan fungsi permukiman pesisir dianalisis dari hubungan antara pendapatan rumah tangga memenuhi kebutuhan dengan perubahan fungsi permukiman. Hasil analisis menggunakan tabulasi silang menunjukkan bahwa pendapatan responden dapat memenuhi kebutuhan cukup sebanyak 66,1%; dimana yang tidak merubah fungsi permukiman sebanyak 40,3% dan merubah fungsi permukiman 25,8%. Pendapatan responden dalam memenuhi kebutuhan kurang sebanyak 32,3%; dimana yang tidak merubah fungsi sebanyak 25,8% dan merubah fungsi sebanyak 6,5%. Adapun pendapatan reponden dapat memenuhi kebutuhan lebih sebanyak 1,6% dan merubah fungsi sebanyak 1,6% (diperlihatkan

pada Tabel IV.13).

TABEL IV.13
TABULASI SILANG ANTARA PEMENUHAN
KEBUTUHAN DENGAN PERUBAHAN FUNGSI
PERMUKIMAN

		Perubahan Fungsi Permukiman		Total
		Tidak	Ya	
Pemenuhan Kebutuhan	Lebih	0 0,0%	1 1,6%	1 1,6%
	Cukup	25 40,3%	16 25,8%	41 66,1%
	Kurang	16 25,8%	4 6,5%	20 32,3%
Total		41 66,1%	21 33,9%	62 100,0%

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Pengujian hipotesis hubungan antara pendapatan memenuhi kebutuhan dengan perubahan fungsi permukiman menggunakan *Chi-Square* diperoleh nilai *Pearson Chi-Square* = 4,157 < 5,991; dk = 2; *Asymp. Sig.* = 0,125 > 0,05; maka hipotesis nol (H_0) diterima. Berdasarkan *Contingency Coefficient* tingkat pemenuhan kebutuhan sehari-hari memiliki kecenderungan signifikan sebesar 0,251 berpengaruh terhadap fungsi permukiman. Dimana mereka yang pemenuhan kebutuhannya lebih cenderung merubah fungsi permukimannya untuk usaha.

4.6.5 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Terhadap Perubahan Fungsi Permukiman

Pengaruh tingkat ketergantungan pada pariwisata terhadap perubahan fungsi permukiman pesisir di kawasan wisata Pantai Kartini dianalisis dari hubungan antara perubahan fungsi permukiman dengan jumlah anggota rumah tangga yang bekerja di kawasan wisata Pantai Kartini. Tabulasi silang kedua sampel diperoleh hasil pada Tabel IV.14.

TABEL IV.14
TABULASI SILANG ANTARA JUMLAH ANGGOTA
RUMAH TANGGA BEKERJA DI KAWASAN WISATA
DENGAN PERUBAHAN FUNGSI PERMUKIMAN

		Perubahan Fungsi Permukiman		Total
		Tidak	Ya	
Jumlah Anggota Rumah Tangga Bekerja di Kawasan Wisata	Tidak Ada	6 9,7%	2 3,2%	8 12,9%
	Sedikit	21 33,9%	5 8,1%	26 41,9%
	Cukup	8 12,9%	8 12,9%	16 25,8%
	Banyak	6 9,7%	6 9,7%	12 19,4%
Total		41 66,1%	21 33,9%	62 100,0%

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Tabel IV.14 diatas memperlihatkan bahwa rumah tangga yang jumlah anggota bekerja di kawasan wisata sedikit sebanyak 41,9%; dimana rumahnya tidak berubah fungsi sebanyak 33,9%

dan berubah fungsi sebanyak 8,1%. Rumah tangga yang anggota bekerja di kawasan wisata cukup banyak sebanyak 25,8%; mereka merubah fungsi sebanyak 12,9% dan tidak merubah fungsi sebanyak 12,9%. Rumah tangga yang anggota bekerja di kawasan wisata banyak sebanyak 12,9%; dimana rumah berubah fungsi sebanyak 9,7% dan rumah tidak berubah fungsi sebanyak 9,7%. Rumah tangga yang tidak ada anggota bekerja di kawasan wisata sebanyak 12,9%; dimana tidak berubah fungsi sebanyak 9,7% dan berubah fungsi sebanyak 3,2%.

Hasil pengujian hipotesis dari hubungan antara jumlah anggota rumah tangga yang bekerja di kawasan wisata dengan perubahan fungsi permukiman pesisir menggunakan *Chi-Square* menunjukkan nilai *Pearson Chi-Square* = 6,021 < 7,815; dk = 3; dan *Asymp. Sig* = 0,111 > 0,05; maka hipotesis nol (H_0) diterima. Berdasarkan *Contingency Coefficient* jumlah anggota rumah tangga yang bekerja di kawasan wisata signifikan sebesar 0,298 berpengaruh terhadap perubahan fungsi permukiman masyarakat pesisir. Dimana jumlah anggota rumah tangga yang bekerja di kawasan wisata Pantai Kartini sedikit cenderung tidak berubah fungsi permukimannya.

4.6.6 Pengaruh Asal Daerah Terhadap Perubahan Fungsi Permukiman

Pengaruh asal daerah penduduk terhadap perubahan fungsi permukiman dianalisis dari hubungan penduduk asli setempat dan pendatang dengan perubahan fungsi permukiman. Hasil analisis

menggunakan tabulasi silang yang diperoleh menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan wisata asli setempat sebanyak 74,2%, diantaranya tidak melakukan perubahan fungsi untuk kegiatan ekonomi sebanyak 48,4% dan melakukan perubahan fungsi sebanyak 25,8%. Masyarakat pendatang sebanyak 25,8% dimana sebagai pendatang di kawasan wisata mereka tidak melakukan perubahan fungsi terhadap rumah yaitu 17,7% dan melakukan perubahan fungsi ekonomi sebanyak 8,1% (pada Tabel IV.15).

TABEL IV.15
TABULASI SILANG ANTARA ASAL DAERAH
DENGAN PERUBAHAN FUNGSI PERMUKIMAN

		Perubahan Fungsi Permukiman		Total
		Tidak	Ya	
Asal Daerah	Pendatang	11 17.7%	5 8.1%	16 25.8%
	Asli Setempat	30 48.4%	16 25.8%	46 74.2%
Total		41 66.1%	21 33.9%	62 100.0%

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Berdasarkan hasil pengujian hubungan antara asal daerah dengan perubahan fungsi permukiman pesisir di kawasan wisata menggunakan *Chi-Square* menunjukkan nilai *Pearson Chi-Square* = 0,066 < 3,841; dk = 1; dan *Asymp. Sig* = 0,797 > 0,05; maka hipotesis nol (H_0) diterima. Berdasarkan *Contingency*

Coefficient asal daerah signifikan sebesar 0,033 berpengaruh terhadap perubahan fungsi permukiman pesisir di kawasan wisata Pantai Kartini. Dimana asal penduduk asli setempat dan pendatang memiliki kecenderungan yang sama untuk tidak merubah fungsi permukimannya.

4.6.7 Pengaruh Lingkungan Fisik Terhadap Fungsi Permukiman

Pengaruh penataan lingkungan fisik terhadap fungsi permukiman dianalisis dari hubungan antara penataan lingkungan fisik permukiman di kawasan wisata dengan perubahan fungsi permukiman. Berdasarkan analisis data menggunakan tabulasi silang didapatkan hasil bahwa responden yang menyatakan penataan lingkungan fisik di kawasan wisata berupa jalan lingkungan sebanyak 40,3%, mereka merubah fungsi rumah menjadi tempat usaha 25,8% dan tidak merubah fungsi 14,5%. Menyatakan penataan lingkungan fisik berupa sanitasi dan MCK sebanyak 30,6%, mereka lebih banyak tidak merubah 29,0% dan yang merubah hanya 1,6%. Demikian pula menyatakan penataan lingkungan fisik berupa pemugaran rumah sebanyak 29,0%, mereka cenderung tidak merubah fungsi 22,6% dan merubah fungsi 6,5% (tampak pada tabel IV.16 dibawah ini).

TABEL IV.16
TABULASI SILANG ANTARA PENATAAN
LINGKUNGAN DENGAN PERUBAHAN FUNGSI
PERMUKIMAN

		Perubahan Fungsi Permukiman		Total
		Tidak	Ya	
Penataan Lingkungan Permukiman	Sanitasi/ MCK	18 29.0%	1 1.6%	19 30.6%
	Pemugaran Rumah	14 22.6%	4 6.5%	18 29.0%
	Jalan Lingkungan	9 14.5%	16 25.8%	25 40.3%
Total		41 66.1%	21 33.9%	62 100.0%

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Hasil pengujian hubungan antara penataan lingkungan fisik permukiman dengan perubahan fungsi permukiman di kawasan wisata menggunakan *Chi-Square* menunjukkan nilai *Pearson Chi-Square* = 18,165 > 5,991; dk = 2; dan *Asymp. Sig* = 0,000 < 0,05; maka hipotesis nol (H_0) ditolak. Berdasarkan *Contingency Coefficient* ada signifikansi penataan lingkungan permukiman sebesar 0,476 dengan perubahan fungsi permukiman pesisir di kawasan wisata Pantai Kartini. Hasil tersebut menunjukkan penataan lingkungan fisik permukiman di kawasan wisata berpengaruh terhadap perubahan fungsi permukiman pesisir. Dimana penataan lingkungan fisik jalan lingkungan cenderung berpengaruh terhadap perubahan fungsi permukiman.

Kemudian hasil analisis yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa perubahan fungsi permukiman pesisir di

kawasan wisata Pantai Kartini hanya dipengaruhi oleh faktor kategori pekerjaan utama masyarakat sektor pariwisata, tingkat pendapatan masyarakat dari kawasan wisata, tingginya harga lahan permukiman di kawasan wisata dan adanya penataan lingkungan fisik di kawasan wisata. Adapun faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap perubahan fungsi permukiman berdasarkan nilai *Contingency Coefficient* adalah:

1. Tingginya harga lahan di kawasan wisata dengan nilai *Contingency Coefficient* sebesar 0,484.
2. Adanya penataan lingkungan permukiman di kawasan wisata dengan nilai *Contingency Coefficient* sebesar 0,476.
3. Tingginya tingkat pendapatan masyarakat dari kawasan wisata dengan nilai *Contingency Coefficient* sebesar 0,369.
4. Kategori pekerjaan masyarakat sektor pariwisata dengan nilai *Contingency Coefficient* sebesar 0,308.

4.7 Temuan Studi

Hal-hal yang diketemukan berdasarkan kajian literatur dan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pantai Kartini secara spasial memiliki karakteristik spesifik karena di kawasan wisata yang berfungsi untuk kegiatan pariwisata terdapat fungsi lain berupa kawasan permukiman.
2. Pengembangan kawasan wisata Pantai Kartini menghadapi kendala keterbatasan lahan untuk pengembangan, sementara untuk pembebasan lahan permukiman milik masyarakat di kawasan wisata harganya tinggi.

3. Kondisi ekonomi masyarakat pesisir yang dicirikan perikanan dan ketergantungan pada sumber daya laut, ternyata dengan perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini banyak berubah menjadi pekerjaan yang berkaitan pariwisata dan sangat bergantung pada pariwisata.
4. Tingkat pendapatan masyarakat pesisir yang awalnya masih rendah dan berada pada garis kemiskinan, dengan perkembangan kawasan wisata tingkat pendapatan masyarakat tinggi dan kehidupan/kesejahteraannya meningkat.
5. Lahan permukiman pesisir yang umumnya tidak memiliki status hukum (legalitas), dengan perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini kepemilikan lahan menjadi hak milik.
6. Perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini yang cukup pesat tidak menarik minat pendatang/investor berusaha di kawasan wisata.
7. Perubahan fungsi permukiman pesisir dipengaruhi oleh faktor-faktor yang merupakan dampak perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian yang telah kemukakan pada Bab IV, maka dapat dirumuskan kesimpulan hasil penelitian bahwa perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini dijelaskan dari perluasan lahan kawasan wisata mencapai 3,5 ha, peningkatan jumlah atraksi wisata buatan dan fasilitas penunjang pariwisata serta peningkatan jumlah kunjungan wisatawan selama lima tahun terakhir.

Masyarakat pesisir yang tinggal kawasan wisata Pantai Kartini pada mulanya memiliki mata pencaharian nelayan yang sangat tergantung dari hasil perikanan laut dengan tingkat pendapatan masih rendah dan berada pada garis kemiskinan. Lahan yang ditempati tidak memiliki status hukum (legalitas), dan penyediaan sarana pelayanan dasar lahan permukiman masih terbatas. Fungsi permukiman pesisir mempunyai fungsi utama sebagai tempat hunian dan membentuk komunitas masyarakat nelayan. Setelah adanya perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini terbukti memberikan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan fisik terhadap masyarakat setempat baik positif maupun negatif. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi ekonomi, sosial, lingkungan fisik dan fungsi permukiman masyarakat pesisir.

Perubahan kondisi ekonomi masyarakat dijelaskan oleh berkurangnya mata pencaharian masyarakat dari sumber-sumber perikanan laut yang tinggal 21,0%, karena munculnya 32,3% sumber-sumber pekerjaan baru sektor pariwisata seperti: usaha warung/kios makanan, industri dan penjual *souvenir* dari limbah laut, kios, penarik perahu wisata, usaha toiler/mandi bilas dan usaha penginapan. Tingkat pendapatan masyarakat tinggi, karena 53,2% berasal dari pendapatan sektor pariwisata. Peningkatan harga lahan, karena kepemilikan lahan permukiman dikawasan wisata Pantai Kartini merupakan hak milik (96,8%) dan harga lahan tinggi sekitar Rp. 451.000–Rp.710.000,- per m² (24,2%).

Perubahan kondisi sosial masyarakat dapat dijelaskan bahwa masyarakat pesisir kehidupan awalnya tergantung sumber-sumber perikanan laut, saat ini berubah ketergantungan tinggi 69,1% pada pariwisata. Terjadinya kesenjangan sosial antara sektor perikanan dan pariwisata, karena masyarakat yang memiliki mata pencaharian perikanan hanya 9,7% yang dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari bahkan selebihnya kurang, sedangkan masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata 17,7% cukup memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan lebih. Namun perkembangan kawasan wisata Pantai Kartini yang cukup pesat tidak menarik migrasi, karena dari penduduk pendatang 25,8% hanya 9,7% yang bekerja sektor pariwisata.

Perubahan lingkungan fisik dijelaskan dari kondisi jalan lingkungan yang baik (100%) dengan lebar 1 m perkerasan *pavingblock*; masyarakat seluruhnya (100%) menggunakan air bersih dari PDAM untuk keperluan air minum, memasak, mandi,

dan mencuci; kondisi saluran pematuan air hujan baik dan tidak terjadi genangan pada musim penghujan (96,8%); dan dari kondisi pengelolaan sampah rumah tangga telah memiliki tempat sampah diluar rumah (96,8%), dimana sampah rumah tangga tersebut diangkut sendiri oleh masing-masing rumah tangga menuju lokasi TPS (95,2%) karena tidak ada petugas sampah yang mengangkut sampah dari rumah tangga ke TPS.

Selain dampak ekonomi, sosial dan lingkungan fisik tersebut, maka tidak dapat dihindarkan pula adanya dampak perubahan fungsi permukiman. Dampak perubahan fungsi permukiman ini dijelaskan oleh karena permukiman pesisir pada awalnya berfungsi untuk pembentukan komunitas berubah menjadi komoditas 33,9% untuk menghasilkan keuntungan bagi masyarakat. Perubahan fungsi permukiman ini dipengaruhi oleh tingginya harga lahan (0,484), penataan lingkungan permukiman (0,476), tingginya tingkat pendapatan pariwisata (0,369), dan pekerjaan sektor pariwisata (0,308).

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi hasil penelitian ini penulis sampaikan kepada penelitian selanjutnya bahwa untuk menjelaskan variabel dampak ekonomi, sosial dan lingkungan fisik indikatornya sangat luas, penelitian ini menggunakan beberapa indikator dari variabel dampak tersebut. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan indikator variabel dampak ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lainnya. Demikian pula untuk variabel

perubahan fungsi permukiman dapat menggunakan teknik analisis statistik yang lain seperti regresi logistik, karena variabel perubahan fungsi permukiman merupakan variabel dikotomi (berubah dan tidak berubah).

Kepada pengelola kawasan wisata dan Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan pengembangan kawasan wisata Pantai Kartini yaitu:

1. Untuk menanggulangi dampak negatif terhadap kesenjangan sosial antara sektor perikanan dengan pariwisata, perlu upaya pemerintah daerah lebih meningkatkan sektor perikanan.
2. Memberikan kesempatan berusaha kepada masyarakat di kawasan wisata khususnya permukiman masyarakat di lokasi yang kurang strategis untuk usaha dengan menyediakan akses pengunjung/wisatawan jalur wisata.
3. Memberikan bantuan/pinjaman modal bergulir kepada masyarakat di kawasan wisata untuk pengembangan usaha-usaha jasa di bidang pariwisata.
4. Memfokuskan pengembangan kawasan wisata Pantai Kartini pada penyediaan atraksi wisata yang berupa objek dan daya tarik wisata yang menarik pengunjung, sedangkan tempat usaha diberikan kesempatan kepada masyarakat setempat.
5. Mengatasi keterbatasan lahan pengembangan kawasan wisata dan keberkelanjutan pariwisata di Pantai Kartini dapat dilakukan dengan memadukan kawasan wisata dengan permukiman masyarakat sebagai pendukung pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, 2003. *Kajian Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Daerah Tujuan Wisata*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan Kelompok Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata, LPPM ITB.
- Agung, I Gusti Ngurah, 2001. *Statistika Analisis Hubungan Kausal Berdasarkan Data Kategorik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amir, Mohammad Faisal, 2006. *Mengolah dan Membuat Interpretasi Hasil Olahan SPSS untuk Penelitian Ilmiah*. Jakarta: EDSA Mahkota.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta.: BPFE.
- Bappeda dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, 2008. *Jepara Dalam Angka 2008*.
- Bappeda Kabupaten Jepara, 2006. *Penataan Ruang dan Detail Plan Lambiran Pesajen-Bulu*.
- Bengen, D.G. 2001. *Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut (Sinopsis)*, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL). Institut Pertanian Bogor.
- BPS dan Depsos, 2002, *Penduduk Fakir Miskin Indonesia 2002*, BPS Jakarta Indonesia.
- Budihardjo, Eko, 1994. *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Budiharsono, S., 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bungin, B., 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dahuri, Rohmin et. al., 1996. *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

- Dahuri, Rohmin, 2003. *Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan*. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Bidang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. IPB.
- French, Peter W., 1997. *Coastal & Estuarine Management*. London : Routledge.
- Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit-Undip.
- Ginting, S.P, 1998. *Konflik Pengelolaan Sumberdaya Kelautan di Sulawesi Utara dapat Mengancam Kelestarian Pemanfaatannya*. Jurnal Pesisir dan Lautan. Vol. 1 No.2. 1998, PKSPL-IPB Bogor.
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Gunn, Clare A., 1994. *Tourism Planning. Basics, Concepts, Cases*. Third Edition. Taylor & Francis Publisher.
- Hastono, S.P., 2003. *Model: Analisis data*, Jakarta: FKUI.
- Honour, TF dan Mainwaring, R.M, 1988. *Sosiologi dan Bisnis* alih bahasa A. Hasymi Ali. Jakarta: Bina Aksara.
- Kartasapoetra, G. dan Kreimers, L.J.B, 1987. *Sosiologi Umum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Lewaherilla, Niki Elistus, 2002. *Pariwisata Bahari; Pemanfaatan Potensi Wilayah Pesisir dan Lautan*. Makalah Program Pasca Sarjana / S3 Institut Pertanian Bogor.
- Muchdie dkk. (ed.) 2001. *Tiga Pilar Pengembangan Wilayah : Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Teknologi*. Jakarta: BPPT.
- Musianto, Lukas S., 2002. *Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian*, Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Vol. 4, No. 2, September: 123 – 136 Jurusan Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi – Universitas Kristen Petra (<http://puslit.petra.ac.id/journals/management/>)
- Noor, Ariadi, 2003. *Pengembangan Marikultur Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi DKI Jakarta (Tesis)* : Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Nurisya, Siti, 2001. *Rencana Pengembangan Fisik Kawasan Wisata Bahari di Wilayah Pesisir Indonesia*. Buletin Taman Dan Lanskap Indonesia. Perencanaan, Perancangan dan Pengelolaan Volume 3, Nomor 2, 2000.

- Studio Arsitektur Pertamanan Fakultas Pertanian IPB Bogor.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 1998 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara*.
- Pitana, I Gde dan Gayatri, Putu G., 2005. *Sosiologi Pariwisata*, Yogyakarta : Andi Offset.
- Prianto, Eddy, ed., 2005. Proseding “*Fenomena Aktual Tema Doktoral Arsitektur dan Perkotaan*” , Semarang : Badan Penerbit Undip.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*, Yogyakarta: Gava Media.
- Rencana Tata Ruang Pesisir dan Pantai Kecamatan Jepara*, 2006. Bappeda Kabupaten Jepara.
- Rossi, Aldo, 1982. *The Architecture of The City*, Massachusetts: The MIT Press.
- Rustiadi, E., 2001. *Pengembangan Wilayah Pesisir sebagai Kawasan Strategis Pembangunan Daerah*, Pelatihan Pengelolaan dan Perencanaan Wilayah Pesisir secara Terpadu (ICZM). Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Sari, Suzanna Ratih, 2004. *Peranan Pariwisata dalam Pembangunan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, ed. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Soekanto, Soerjono, 1997. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Edisi Baru) Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soemarwoto, Otto, 2007. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Spellerberg, I.F., 1998. *Ecological Effects of Roads and Traffic: a Literature Review*. Global Ecology and Biogeography 7: 317-333.
- Sugiyono dan Eri Wibowo, 2004. *Statistika untuk Penelitian* (cetakan keempat). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono dan Eri Wibowo, 2005. *Statistika untuk Penelitian* (cetakan ketujuh). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Bisnis* (cetakan kelima). Bandung: Alfabeta.
- Sujarto, Djoko, 1996. *Penataan Ruang dalam Pengembangan Kota Baru*, Jakarta: BPPT.

- Sukanti, S.C, 1979. *Kota di Dunia Ketiga*. Jakarta: Barata Karya Aksara.
- Suparmoko, M dan Maria RS, 2000. *Ekonomika Lingkungan*, Yogyakarta: BPFE.
- Suprijanto, Iwan, 2006. *Karakteristik Spesifik, Permasalahan dan Potensi Pengembangan Kawasan Kota Tepi Laut/Pantai (Coastal City) di Indonesia* (Proceeding - Studi Dampak Timbal Balik Antar Pembangunan Kota dan Perumahan di Indonesia dan Lingkungan Global).
- Suratmo, F. Gunarwan, 2007. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tarigan, Robinson, 2006, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Tashadi, Ed., 1994. *Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Depdiknas.
- Turner, John F.C dan Fichter, Robert, 1972. *Housing as a Verb dalam Freedom to Build*. New York: Macmillan Publishing Co.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang *Kepariwisata*.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang *Perumahan dan Permukiman*.
- Wahab, Salah, 2003. *Manajemen Kepariwisata*, alih bahasa Fans Gromang. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wiranatha, Agung Suryawan., 21 Januari 2008. *Pengelolaan Objek Wisata Berbasis Masyarakat* (Debat Publik), Bali Post.
- Yoeti, Oka A., 1985. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung: Penerbit Aksara.

